QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA LANGSA TAHUN 2012-2017



PEMERINTAH KOTA LANGSA
TAHUN 2015

WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA LANGSA TAHUN 2012-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan Rencana Pembangunan yang memberikan arahan bagi Pembangunan yang terintegrasi baik di tingkat pusat dan daerah;

b. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi perubahan materi yang berkaitan dengan target indikator kinerja daerah, kondisi keuangan daerah dengan asumsi-asumsi keuangan terkini serta perubahan struktur organisasi daerah;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan terhadap Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

17. Qanun ...

17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
18. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang RPJMA Tahun 2012-2017 (Berita Aceh Tahun 2012 Nomor 121);
20. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);
21. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3);
22. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 429);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA LANGSA TAHUN 2012-2017.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
   (1) RPJM Kota menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota, Rencana Kerja Pembangunan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kota serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kota.

(2) Rencana ...

(2) Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA-PPAS dan APBK setiap tahun.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 Nopember 2015 M
28 Muharram 1437 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 10 Nopember 2015 M
28 Muharram 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAHRUL ILYAS

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 19

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADHB	:	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	:	Atas Dasar Harga Konstan
AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKH	:	Angka Harapan Hidup
AKHB	:	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
ALE	:	Analisis Lingkungan Eksternal
ALI	:	Analisis Lingkungan Internal
AMH	:	Angka Melek Huruf
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBK	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
ASB	:	Analisa Standar Biaya
Balita	:	Bawah Lima Tahun
BAPPEDA	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BKKB & PP	:	Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
BKPP	:	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
BLHKP	:	Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan
BLUD	:	Balan Layanan Umum Daerah
BLUD RSUD	:	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPM	:	Badan Pemberdayaan Masyarakat
BPR	:	Bank Pembiayaan Rakyat
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRR	:	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUP	:	Batas Usia Pensiun
c	:	*Celcius*
CBD	:	*Central Bisnis Distric*
CCTV	:	*Closed Circuit Television*
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
CPO	:	*Crude Palm Oil*
D1	:	Diploma 1
D2	:	Diploma 2
D3	:	Diploma 3
D4	:	Diploma 4
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBD	:	Demam Berdarah

DI	:	Daerah Irigasi
DIPERINDAGKOP & UKM	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DISHUBKOMINFO	:	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
DISPORABUDPAR	:	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
DKPP	:	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian
DPKA	:	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
dpl	:	Di Atas Permukaan Laut
DPRK	:	Dewan Perwakilan Rakyat Kota
DUK	:	Daftar Urut Kepangkatan
Fisipol	:	Fisiologi Politik
ha	:	Hektar
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGU	:	Hak Guna Usaha
HM	:	Hak Milik
HP	:	Hak Pakai
HP	:	*Handphone*
HPL	:	Hak Pengelolaan Lahan
ICT	:	*Information Communication Technologies*
ILO	:	*International Labour Organization*
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPTEK	:	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
K1	:	Kategori Satu
K2	:	Kategori Dua
K3	:	Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan
KARIS	:	Kartu Istri
KARPEG	:	Kartu Pegawai
KARSU	:	Kartu Suami
KB	:	Keluarga Berencana
KBLI	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KDH	:	Kepala Daerah
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kesbangpol	:	Kesatuan Bangsa dan Politik
KK	:	Kepala Keluarga
KKN	:	Kolusi Korupsi dan Nepotisme
km	:	Kilometer
KN	:	Kementerian Negara
KP2T	:	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KUA	:	Kebijakan Umum Anggaran
LKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
LPM	:	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPPD	:	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat

MA	:	Madrasah Aliyah
MCK	:	Mandi Cuci Kakus
MDG's	:	*Millenium Development Goals*
MI	:	Madrasah Ibtidaiyah
mm	:	Milimiter
MPU	:	Majelis Permusyawaratan Ulama
MTs	:	Madrasah Tsanawiyah
Nas	:	Nasional
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NTP	:	Nilai Tukar Petani
OKP	:	Organisasi Kepemudaan
Ormas	:	Organisasi Kemasyarakatan
ORSOSPOL	:	Organisasi Sosial dan Politik
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKB	:	Penyuluh Keluarga Berencana
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKK	:	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PLKB	:	Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PLN	:	Perusahaan Litrik Negara
PMDN	:	Penanaman Modal DaLam Negeri
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
Pol WH	:	Polisi Wilayatul Hisbah
Polindes	:	Pos Bersalin Desa
Posyandu	:	Pos Pelayanan Terpadu
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPAS	:	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPh	:	Pajak Penghasilan
PUS	:	Pasangan Usia Subur
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	:	Puskesmas Pembantu
RAPBK	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Renstra	:	Rencana Strategis
RKA	:	Rencana Kerja Anggaran
RKA-PPKD	:	Rencana Kerja Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
RKA-SKPD	:	Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RKPK	:	Rencana Kerja Pembangunan Kota
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMK	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RT	:	Rumah Tangga
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTR	:	Rencana Tata Ruang
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
S1	:	Strata 1
S2	:	Strata 2
S3	:	Strata 3
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
Satpol PP & WH	:	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
SD	:	Sekolah Dasar
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SK	:	Surat Keputusan
SKPK	:	Satuan Kerja Perangkat Kota
SLTA	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SPAL	:	Saluran Pembuangan Air Limbah
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPPN	:	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
SWOT	:	*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*
TASPEN	:	Tabungan Asuransi Pegawai Negeri
TBC	:	*Tuberculosis*
TPA	:	Tempat Pembuangan Akhir
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPD	:	Total Penerimaan Daerah
TPS	:	Tempat Pembuangan Sampah
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
UCI	:	*Universal Child Immunization*
UGM	:	Universitas Gajah Mada
UKBM	:	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia
UKM	:	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UN	:	Ujian Nasional
UNDP	:	*United Nations Development Programme*
UU	:	Undang-Undang
UUPA	:	Undang-Undang Pemerintah Aceh
WH	:	Wilayatul Hisbah
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR SINGKATAN		i
DAFTAR ISI		v
DAFTAR GAMBAR		vii
DAFTAR GRAFIK		viii
DAFTAR TABEL		x
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
	1.4. Sistematika Penulisan	I-6
	1.5. Maksud dan Tujuan	I-8
BAB II	GAMBARAN UMUM KOTA	II-1
	2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-14
	2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-31
	2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-72
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-9
	3.3. Kerangka Pendanaan	III-16
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
	4.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan	IV-1
	4.2. Isu-Isu Strategis	IV-9
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
	5.1. Visi	V-1
	5.2. Misi	V-2
	5.3. Tujuan dan Sasaran	V-3
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
	6.1. Strategi Pembangunan	VI-1
	6.2. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Langsa	VI-4
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
BAB VIII	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
	8.1. Indikasi Program Prioritas	VIII-1
	8.2. Pendanaan	VIII-2
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN	X-1

10.1. Pedoman Transisi X-1
10.2. Kaedah Pelaksanaan X-1

BAB XI PENUTUP XI-1

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Hubungan RPJM Kota Langsa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
Gambar 2.1	Peta Adminstrasi Kota Langsa	II-2
Gambar 2.2	Peta Ketinggian Kota Langsa	II-4
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Kota Langsa	II-5
Gambar 2.4	Peta Klimatologi/Curah Hujan/Iklim	II-6
Gambar 2.5	Peta Penggunaan Lahan Kota Langsa	II-8
Gambar 2.6	Peta Rawan Bencana Kota Langsa	II-12
Gambar 7.1	Skema Kuadran dan Kriteria Review Program RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017	VII-29

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1	Jumlah Penduduk Kota Langsa Tahun 2012-2014 (Jiwa)	II-13
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kota Langsa Tahun 2011-2014 (persen)	II-15
Grafik 2.3	Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Langsa Tahun 2011-2014 (juta Rupiah)	II-16
Grafik 2.4	Laju Implisit (Inflasi) Kota Langsa Tahun 2011-2014	II-18
Grafik 2.5	PDRB per Kapita ADHB Kota Langsa Tahun 2010-2014 (juta rupiah)	II-19
Grafik 2.6	Persentase Penduduk Miskin Kota Langsa Tahun 2009-2013 (persen)	II-20
Grafik 2.7	Garis Kemiskinan Kota Langsa Tahun 2009-2013 (rupiah)	II-20
Grafik 2.8	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011-2013 Kota Langsa	II-22
Grafik 2.9	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010-2014 Kota Langsa (tahun)	II-23
Grafik 2.10	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/SLTP/SLTA Tahun 2013 Kota Langsa	II-24
Grafik 2.11	Perkembangan AKB dan AKHB Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-26
Grafik 2.12	Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2010-2014 Kota Langsa (Tahun)	II-27
Grafik 2.13	Perkembangan IPM Tahun 2010-2014 Kota Langsa	II-30
Grafik 2.14	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Pendidikan Dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) Tahun 2011-2013 Kota Langsa	II-32
Grafik 2.15	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Pendidikan Menengah (usia 16-19 tahun) Tahun 2011-2013 Kota Langsa	II-33

Grafik 2.16	Angka Kelulusan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2013 Kota Langsa (persen)	II-35
Grafik 2.17	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-39
Grafik 2.18	Perkembangan Persentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik Tahun 2011-2013 Kota Langsa (persen)	II-42
Grafik 2.17	Persentase Distribusi Luas Areal Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kota Langsa ..	II-61
Grafik 2.20	Konstribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 Kota Langsa (persen)	II-68
Grafik 2.21	Kontribusi Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 Kota Langsa (persen)	II-68
Grafik 2.22	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 Kota Langsa (persen)	II-69
Grafik 2.23	Kontribusi Sektor Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 Kota Langsa (persen)	II-70
Grafik 2.24	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 Kota Langsa (persen)	II-70
Grafik 2.25	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 Kota Langsa (persen)	II-71
Grafik 2.26	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 Kota Langsa	II-72
Grafik 2.27	Nilai Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Langsa ADHB Tahun 2010-2014 Kota Langsa (juta rupiah)	II-73
Grafik 3.1	Perkembangan Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015 (Persen)	III-6
Grafik 3.2	Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2012-2015 (Persen)	III-14
Grafik 3.3	Realisasi, Proyeksi dan Komposisi Keuangan Daerah Tahun 2012-2017	III-18

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Administrasi Kota Langsa Dirinci per Kecamatan dan Desa/Gampong	II-2
Tabel 2.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2013	II-14
Tabel 2.3	Jumlah Rumah Tangga Kota Langsa Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2012-2013	II-14
Tabel 2.4	Nilai dan Kontribusi PDRB ADHK Kota Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2010-2014	II-17
Tabel 2.5	Jumlah Tindak Kriminal di Kota Langsa Tahun 2012-2014	II-21
Tabel 2.6	Perkembangan APM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)	II-25
Tabel 2.7	Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-26
Tabel 2.8	Banyaknya Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Tahun 2013 Kota Langsa.....	II-28
Tabel 2.9	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2011-2013 Kota Langsa	II-29
Tabel 2.10	Perkembangan Grup dan Gedung Kesenian Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-29
Tabel 2.11	Perkembangan Klub dan Gedung Olah Raga Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-30
Tabel 2.12	Jumlah Pesantren, Ustadz dan Santri Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-36
Tabel 2.13	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-36
Tabel 2.14	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu, dan Polindes Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-37
Tabel 2.15	Jumlah Rumah Sakit Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-38
Tabel 2.16	Jumlah Dokter Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-38
Tabel 2.17	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2012-2013 Kota Langsa (km)	II-39

Tabel 2.18	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, dan Kelas Jalan Tahun 2012-2013 Kota Langsa (km)	II-40
Tabel 2.19	Rasio Tempat Ibadah Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-41
Tabel 2.20	Jumlah Desa Berlistrik dan Banyaknya Pelanggan dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2013	II-42
Tabel 2.21	Perkembangan Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)	II-43
Tabel 2.22	Perkembangan Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)	II-43
Tabel 2.23	Perkembangan Rumah Layak Huni Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)	II-44
Tabel 2.24	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-47
Tabel 2.25	Jumlah Kendaraan Bermotor Angkutan Menurut Jenis Tahun 2012-2013 Kota Langsa	II-47
Tabel 2.26	Lalu Lintas Barang Dirinci Menurut Jenis Pelayaran di Pelabuhan Kuala Langsa Tahun 2011-2013	II-47
Tabel 2.27	Penanganan Sampah Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-48
Tabel 2.28	Perkembangan Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-49
Tabel 2.29	Perkembangan Urusan Pertanahan Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-50
Tabel 2.30	Perkembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-50
Tabel 2.31	Perkembangan Partisipasi Perempuan Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-51
Tabel 2.32	Kondisi Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-51
Tabel 2.33	Kondisi Perkembangan Rasio Akseptor KB Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-52
Tabel 2.34	Jumlah Panti Asuhan dan PMKS yang Tertangani Tahun 2013-2014 Kota Langsa	II-53

Tabel 2.35	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-54
Tabel 2.36	Perkembangan Indikator Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-54
Tabel 2.37	Perkembangan Aktivitas Seni Budaya Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-55
Tabel 2.38	Perkembangan Sarana Prasarana Olah Raga Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-56
Tabel 2.39	Perkembangan Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-56
Tabel 2.40	Jumlah Polisi Pamong Praja, Personil Wilayatul Hisbah, Berbagai Pelanggaran dan Penyelesaian Ketertiban Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-57
Tabel 2.41	Jumlah Pelanggaran dan Penyelesaian Qanun Syariat Islam Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-59
Tabel 2.42	Jumlah Jama'ah Haji Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2014 Kota Langsa	II-59
Tabel 2.43	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 Kota Langsa	II-60
Tabel 2.44	Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Tanaman Padi dan Palawija Tahun 2013 Kota Langsa	II-61
Tabel 2.45	Jumlah Populasi Ternak Besar, Ternak kecil dan Unggas Tahun 2013 Kota Langsa	II-62
Tabel 2.46	Perkembangan Jumlah Lembaga & Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012- 2014 Kota Langsa	II-63
Tabel 2.47	Perkembangan Indikator Kearsipan Tahun 2012- 2014 Kota Langsa	II-65
Tabel 2.48	Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Tahun 2012- 2014 Kota Langsa	II-66
Tabel 2.49	Perkembangan Indikator Kepustakaan Tahun 2012- 2014 Kota Langsa	II-67
Tabel 2.50	Perkembangan Produktivitas Padi Tahun 2013-2014 Kota Langsa	II-67
Tabel 2.51	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2012-2014 Provinsi Aceh	II-73

Tabel 2.52	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2011-2013 Kota Langsa	II-74
Tabel 2.53	Pola Ruang Eksisting Kota Langsa	II-75
Tabel 2.54	Jumlah Bank dan Kantor Tahun 2013 Bank Kota Langsa	II-76
Tabel 2.55	Jumlah Kamar dan Tempat Tidur pada Akomodasi Tahun 2013 Kota Langsa	II-77
Tabel 2.56	Indikator Hotel dan Akomodasi Penginapan Tahun 2013 Kota Langsa	II-78
Tabel 2.57	Perkembangan Indikator Pelayanan Perizinan Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-78
Tabel 2.58	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2012-2014 Kota Langsa	II-79
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015 (Rupiah)	III-4
Tabel 3.2	Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015 (Persen)	III-5
Tabel 3.3	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	III-7
Tabel 3.4	Derajat Desentralisasi Kota Langsa Tahun 2012 – 2015	III-7
Tabel 3.5	Pengelompokan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 Untuk Kabupaten dan Kota	III-8
Tabel 3.6	Perkembangan Tingkat Kemandirian Kota Tahun 2012 – 2015	III-9
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2015 (Rupiah)	III-12
Tabel 3.8	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2015 (Persen)	III-13
Tabel 3.9	Kondisi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2015 (Rupiah)	III-16
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Tahun 2012-2015 (Rupiah)	III-16
Tabel 3.11	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2017 (Rupiah)	III 19
Tabel 3.12	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012-2017 (Rupiah)	III-20

Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2017 (Rupiah)	III-21
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	V-3
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	VI-5
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Langsa	VII-2
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kota Langsa	VIII-3
Tabel 8.2	Perkiraan Pagu Dana Indikatif Menurut Urusan dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VIII-21
Tabel 8.3	Perkiraan Pagu Dana Indikatif Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah	VIII-27
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	IX-3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah maka diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada penyelenggaraan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan harus berdasarkan pada azas demokrasi yang di dalamnya terkandung kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, partisipasi, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, pemerataan dan kesatuan nasional. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang disusun berlandaskan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa. RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, baik lintas SKPK maupun kewilayahan, dengan berbagai sumber pendanaan.

Berdasarkan Pasal 240 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terhadap RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nasional.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Langsa Tahun 2012-2017, RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 perlu dilakukan perubahan sebagai akibat adanya penyesuaian substansi peraturan daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah dan terdapat perubahan materi peraturan daerah terkait dengan kebijakan nasional.

Materi muatan perubahan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 berdasarkan hasil evaluasi serta review didasarkan pada pertimbangan :

1. Menyelaraskan target-target tahunan indikator kinerja daerah dengan perkembangan hasil pembangunan;
2. Menyesuaikan prediksi keuangan daerah dengan asumsi-asumsi keuangan terkini;
3. Memperjelas definisi setiap pernyataan indikator kinerja daerah;
4. Mencantumkan prakiraan kebutuhan pendanaan sampai dengan tahun 2017 pada setiap tahun dan juga pada setiap program sesuai dengan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017;
5. Menyesuaikan nomenklatur organisasi perangkat daerah dengan kondisi terkini.

Hasil evaluasi dan review menggambarkan bahwa realisasi capaian target yang ingin dicapai masih jauh dari yang diharapkan dan untuk mengejar target yang sudah direncanakan perlu dilakukan penyesuaian program/kegiatan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan dalam periode dua tahun mendatang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum yang mendasari evaluasi dan penyesuaian RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
18. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Berita Aceh Tahun 2012 Nomor 121);
20. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);
21. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3);
22. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 429).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan yang taktis dan komprehensif, RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah. Dalam lingkup perencanaan nasional, revisi RPJM Kota Langsa Tahun

2012-2017 disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019. Sebagai bahagian dari Provinsi Aceh, maka RPJM Kota Langsa juga memperhatikan RPJM Aceh Tahun 2012–2017. Sementara dalam lingkup Pemerintah Kota Langsa, RPJM disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Langsa Tahun 2007-2027 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Langsa Tahun 2012-2032.

Selanjutnya, RPJM Kota Langsa menjadi pedoman bagi SKPK dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota (Renstra SKPK). Renstra SKPK ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK dan bersifat indikatif.

Gambar 1.1
Hubungan RPJM Kota Langsa dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya

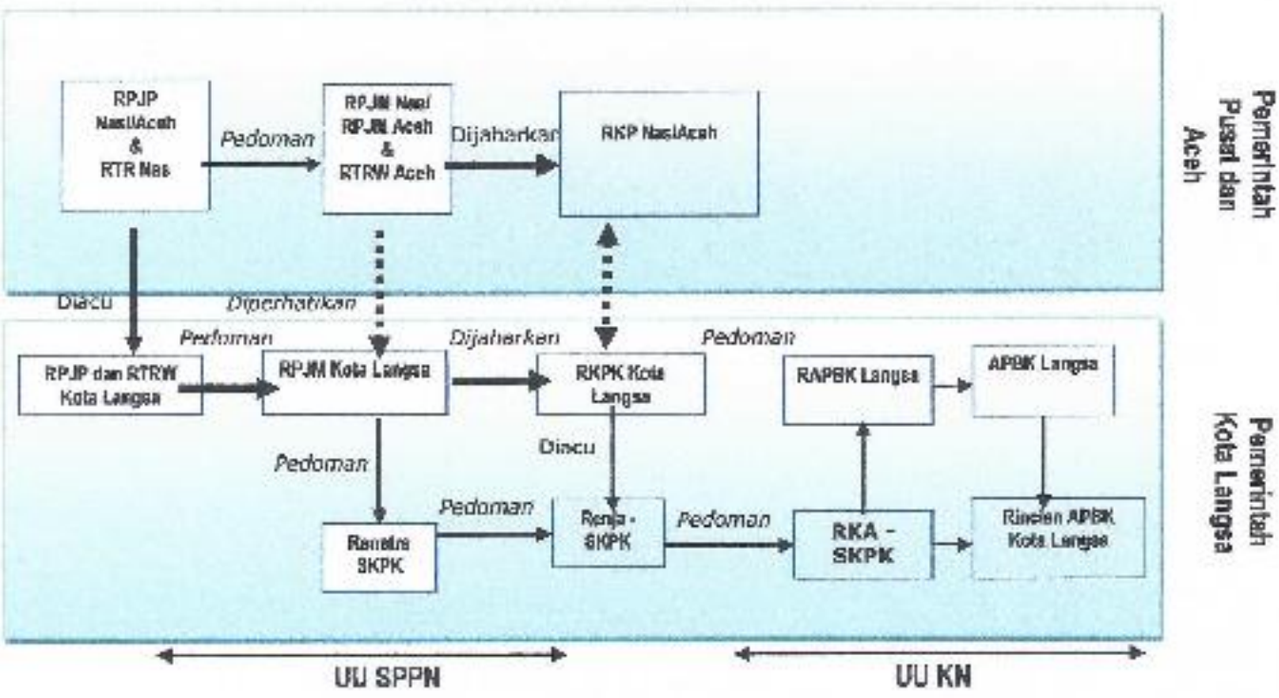

RPJM Kota Langsa juga dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan kota berupa Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK). RKPK memuat rancangan kerangka ekonomi kota, prioritas pembangunan kota, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun sistematika penulisan RPJM Kota Langsa sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA

Disesuaikan dengan kondisi akhir tahun 2014

Memuat antara lain aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Disesuaikan dengan kondisi akhir tahun 2014

Menyajikan kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Disesuaikan dengan kondisi akhir tahun 2014

Dirumuskan permasalahan dan tantangan pembangunan serta isu-isu strategis.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi dan Misi tetap dan tidak berubah, tujuan dan sasaran pembangunan perlu dilakukan penyederhanaan dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

Memuat visi, misi, tujuan pembangunan, dan sasaran pembangunan kota selama lima tahun ke depan.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Disesuaikan dengan kondisi akhir tahun 2014

Berisikan strategi pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan kota yang harus ditempuh untuk pencapaian visi dan misi.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Disesuaikan dengan kondisi akhir tahun 2014

Memuat arah kebijakan yang bersifat umum untuk semua sektor pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang ada di kota.

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Disesuaikan dengan kondisi akhir tahun 2014

Menyajikan indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan selama lima tahun ke depan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Disesuaikan dengan kondisi akhir tahun 2014

Memuat penetapan indikator kinerja yang meliputi pencapaian hasil penyelenggaraanaan pemerintahan dalam hubungannya dengan hasil pembangunan daerah pada setiap akhir periode perencanaan pembangunan.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

Bab ini memuat kaidah pedoman transisi selama rentang waktu berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2017, dan kaedah pelaksanaan seluruh program/kegiatan SKPK yang harus mengarah kepada pencapaian visi dan misi.

BAB XI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari RPJM yang menguraikan beberapa hal penting sebagai penutup dan saran-saran untuk kesempurnaan pelaksanaan RPJM ini.

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Review dan revisi RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 disusun dengan maksud :

1. Menyediakan sebuah acuan resmi bagi pemerintah (eksekutif) dan DPRK (legislatif) di dalam menyusun Renstra SKPK dan RKPK, sekaligus menjadi acuan penentuan pilihan program pembangunan tahunan yang dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kota secara berjenjang;
2. RPJM Kota Langsa Tahun 2012 - 2017 telah ditetapkan melalui Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013, namun dalam pelaksanaannya terdapat program/kegiatan yang dilaksanakan tidak tertampung dalam RPJM Kota Langsa tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 pasal (2) ayat 3 point b.

1.5.2. Tujuan

Tujuan review dan revisi RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 adalah:

1. Penilaian tingkat capaian target dan program/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan serta penyesuaian target nasional dalam RPJMN 2015-2019;
2. Hasil evaluasi dan penyesuaian RPJM Kota Langsa ini akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota Langsa, dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pembangungan Kota (RKPK), sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK).

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Willayah Administrasi

Letak geografis Kota Langsa berada pada koordinat 4°24'35.68" - 4°33'47.03" Lintang Utara dan 97°53'14.59" - 98°04'42.16" Bujur Timur, yang tediri dari 5 kecamatan dan 66 gampong yang sebelumnya terdiri dari 51 gampong, namun saat ini batas-batas gampong belum terdeliniasi dengan benar, dikarenakan masih ada permasalahan batas gampong-gampong tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa, luas wilayah Kota Langsa adalah 26.241 ha dengan panjang garis pantai 16 km. Namun dari hasil perhitungan citra satelit dan tapal batas Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang, dan berdasarkan peta Provinsi Aceh/BRR, luas Kota Langsa adalah 23.982,93 ha, dengan panjang garis pantai 26 km.

Adapun batas-batas administrasi Kota Langsa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur/Selat Malaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur/Aceh Tamiang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Langsa

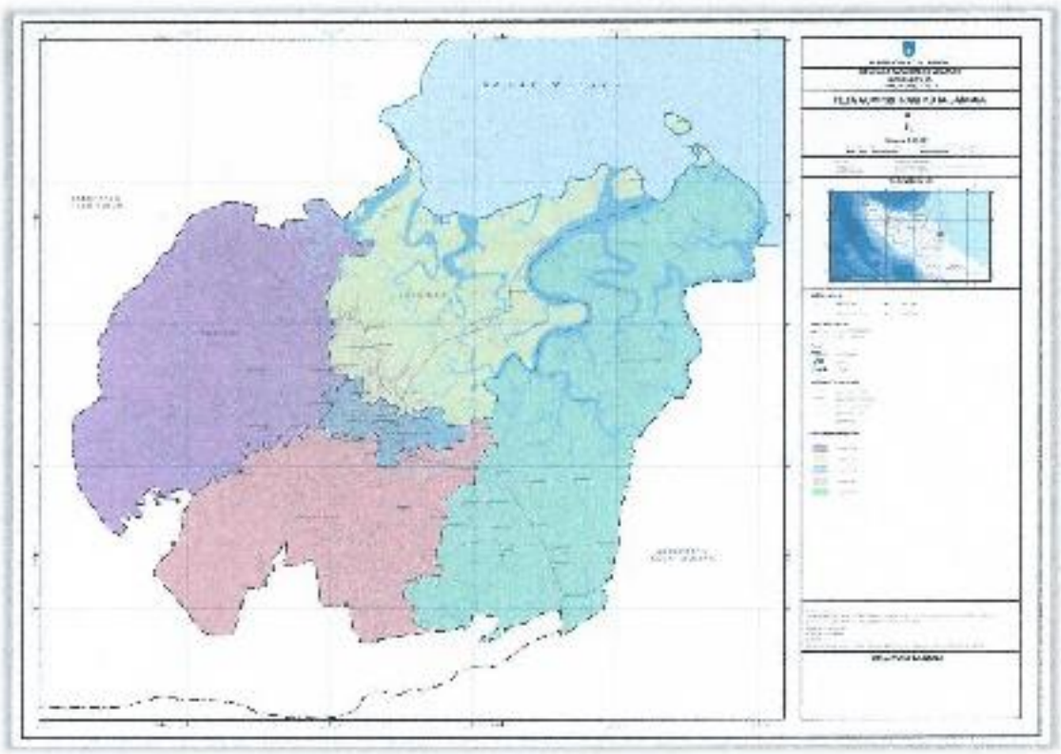

Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Tabel 2.1
Administrasi Kota Langsa Dirinci per Kecamatan dan Desa/Gampong

No	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	DESA/GAMPONG
1.	Langsa Timur	Gampong Seuneubok Antara	Gampong Simpang Wie Gampong Buket Pulo Gampong Matang Panyang Gampong Matang Seutui Gampong Buket Rata Gampong Alue Pineung Gampong Alue Pincung Timue Gampong Alue Merbau Gampong Buket Meutuah Gampong Matang Cengai Gampong Cinta Raja Gampong Sukareju Gampong Sungai Lueng Gampong Kapa Gampong Seuneubok Antara Gampong Buket Medang Ara
2.	Langsa Barat	Gampong Matang Seulimeng	Gampong Seuriget Gampong Serambi Indah Gampong PB. Teungoh Gampong PB. Beuramo Gampong Simpang Lhee Gampong Lhok Banie Gampong Matang Seulimeng Gampang Sungai Pauh Gampang Sungai Pauh Pusaka

No	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	DESA/GAMPONG
			Gampong Sungai Pauh Tanjong Gampong Sungai Pauh Firdaus Gampong Telaga Tujuh Gampong Kuala Langsa
3.	Langsa Kota	Gampong Daulat	Gampong Blang Seumibong Gampong Blang Gampong Alue Beurawe Gampong Teungoh Gampong Tualang Teungoh Gampong Mutia Gampong Daulat Gampong Gampong Jawa Gampong BP. Blang Pase Gampong Peukan Langsa
4.	Langsa Lama	Gampong Meurandeh	Gampong Pondok Kemuning Gampong Seulalah Gampong Seulalah Baru Gampong Pondok Pabrik Gampong Sidodadi Gampong Sidorejo Gampong Baro Gampong Meurandeh Gampong Meurandeh Tengah Gampong Meurandeh Dayah Gampong Meurandeh Aceh Gampong Sukajadi Kebun Ireng Gampong Asam Peutik Gampong Baroh Langsa Lama Gampong Batee Putch
5.	Langsa Baro	Gampong Geudubang Aceh	Gampong Timbang Langsa Gampong Alue Dua Gampong Alue Bakaran Baree Gampong Birem Puntong Gampong Paya Bujuk Seulemak Gampong Pondok Kelapa Gampong Karang Anyar Gampong Paya Bujuk Tunong Gampong Geudubang Jawa Gampong Geudubang Aceh Gampong Sukajadi Makmur Gampong Lengkong

Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Letak Kota Langsa yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai timur Aceh juga merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah pantai timur Aceh, dengan memanfaatkan peluang strategis dari keberadaan daerah *hinterland* di sekitarnya. Selain itu, posisi Kota Langsa yang relatif dekat dengan perbatasan wilayah Sumatera Utara, memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam menjalin transaksi perdagangan dan jasa serta pengembangan pariwisata. Karena itu,

sebagai wujud upaya menjadikan Kota Langsa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kota transit di wilayah pantai timur Aceh, akan diupayakan penyediaan infrastruktur maupun fasilitas layanan pendukung sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Dengan demikian, fungsi keberadaan Kota Langsa sebagai kota transit diharapkan memberikan manfaat ganda (*multiplier effect*) dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Posisi geografis Kota Langsa yang dikelilingi Selat Malaka tepatnya pada bagian utara, merupakan potensi dan peluang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik antar wilayah di pantai timur Aceh, pulau Sumatera, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Peluang lainnya adalah menjalin aktivitas bisnis dan kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor) dengan berbagai negara, seperti Malaysia, Singapura, dan lainnya. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk diwujudkan, mengingat saat ini Kota Langsa telah memiliki fasilitas pelabuhan laut Kuala Langsa berikut dengan sejumlah infrastruktur penunjang yang relatif cukup memadai.

Gambar 2.2
Peta Ketinggian Kota Langsa

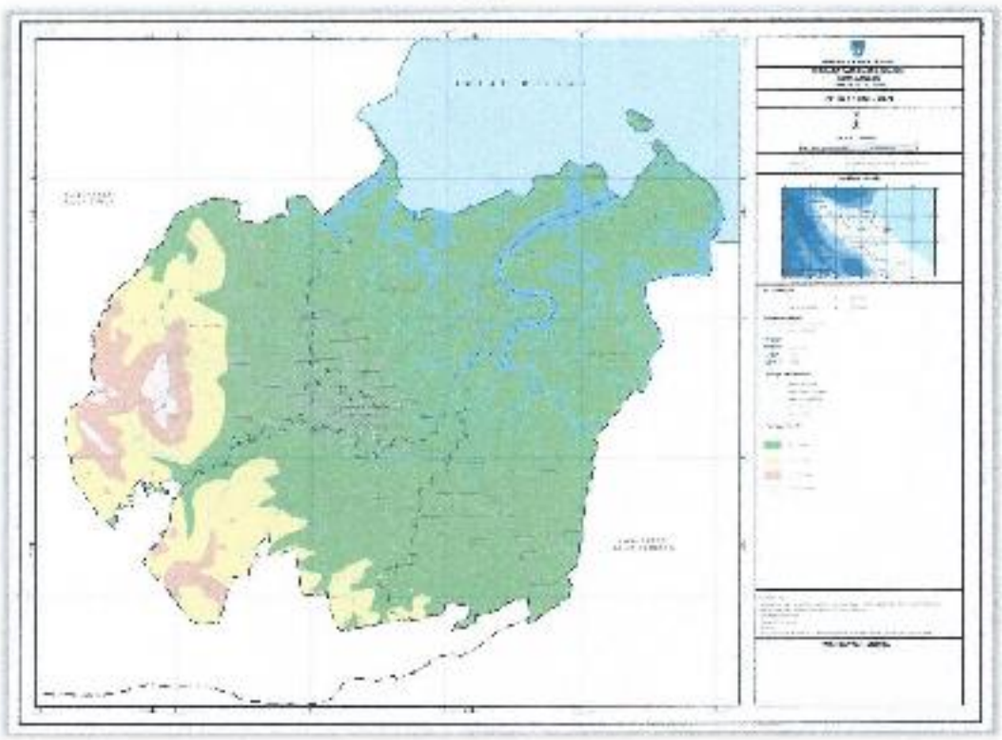

Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

2.1.1.2. Topografi

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Langsa berkisar antara 0 - 160 meter diatas permukaan laut (dpl). Bentuk permukaan lahan (fisiografi), memiliki relief permukaan bumi yang cukup datar dengan kemiringan lahan antara 0 - 30%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian utara Kecamatan Langsa Barat atau pesisir pantai.

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Kota Langsa

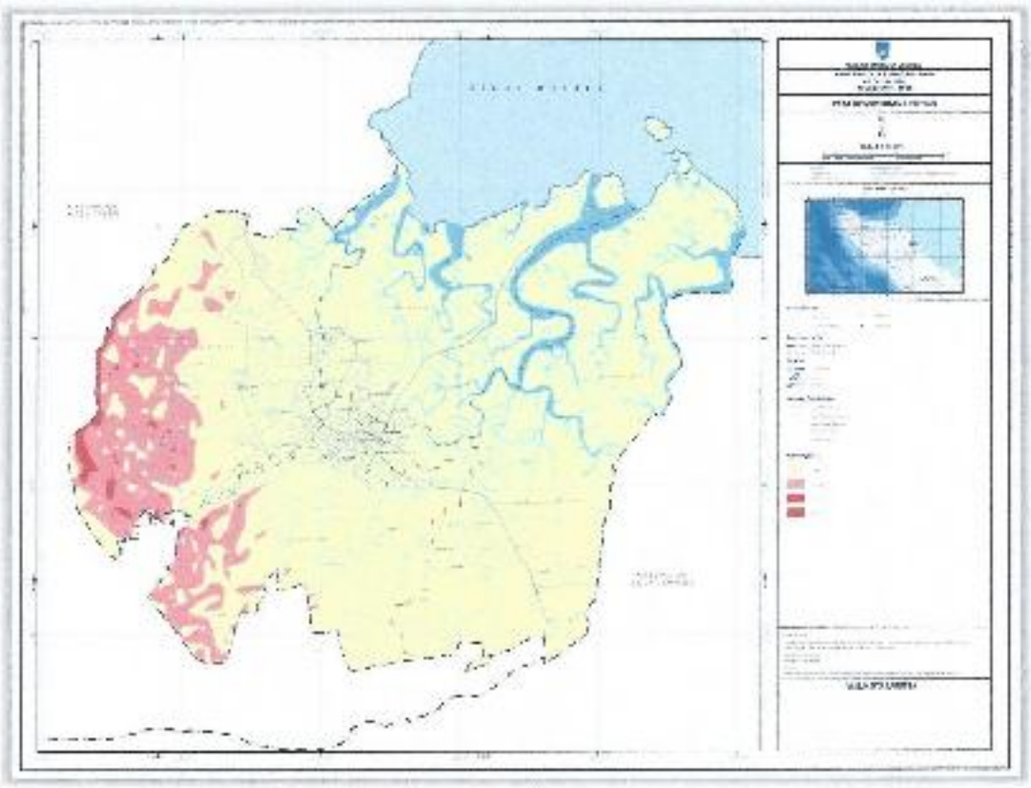

Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

2.1.1.3. Klimatologi

Kota Langsa memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim Muson sehingga menyebabkan adanya musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi dari bulan Mei sampai bulan Desember dengan curah hujan maksimal bulan September dan Oktober. Sedangkan musim kemarau terjadi dari bulan Januari sampai dengan bulan April dengan kemarau maksimal pada bulan Maret dan April. Curah hujan rata-rata di Kota Langsa 2.000 mm/tahun dengan rata-rata

hari hujan 4 hari, sedangkan temperatur rata-rata 28°C - 32°C dengan kelembaban udara rata-rata 80%.

Gambar 2.4
Peta Klimatologi/Curah Hujan/Iklim

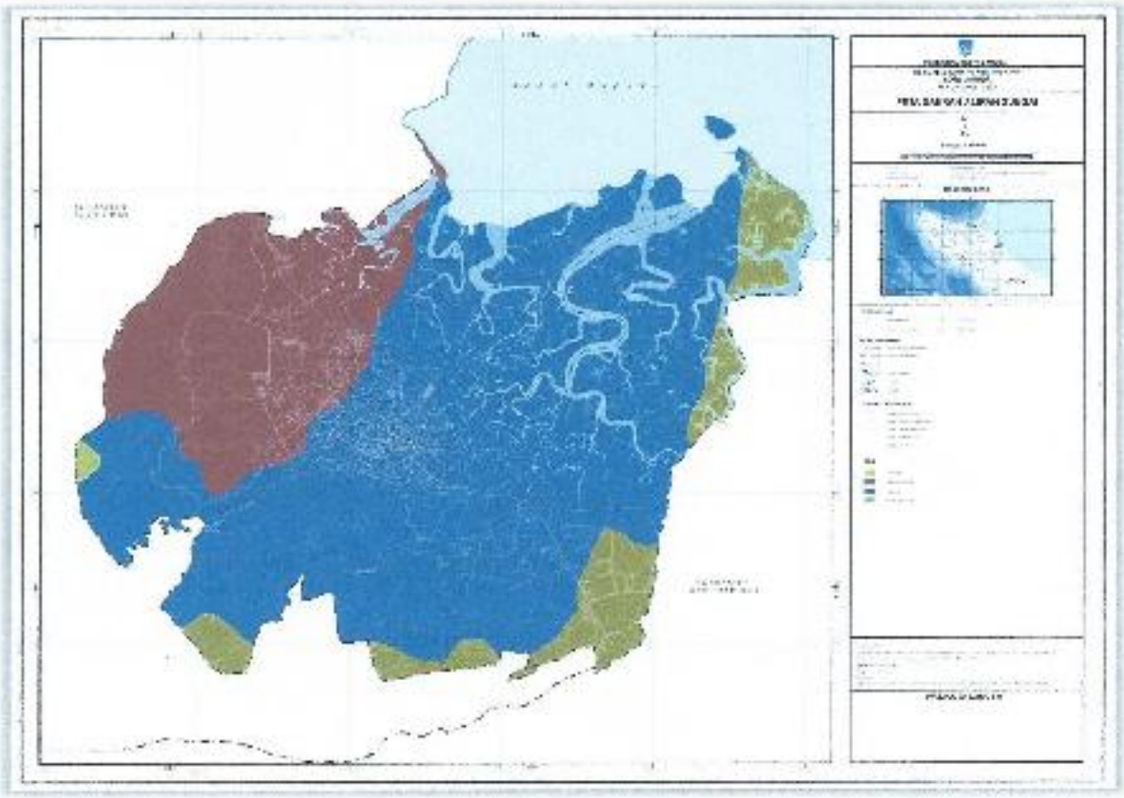

Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

2.1.1.4. Hidrologi

Sistem hidrologi di Kota Langsa terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sistem hidrologi alami dan sistem hidrologi buatan. Sistem hidrologi alami terdiri dari sungai, sumur dan air tanah sedangkan sistem hidrologi buatan yaitu drainase. Kota Langsa memiliki 1 (satu) buah sungai yaitu Krueng Langsa yang memiliki volume air yang besar dengan warna air kekuning-kuningan.

Berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390 Tahun 2007, Kota Langsa memiliki Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Lintas Kabupaten yaitu D.I. Paya Ketenggar/Alue Merbau.

Sedangkan untuk Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kota yaitu :

1. Daerah Irigasi Alue Jreng
2. Daerah Irigasi Asam Peutek

3. Daerah Irigasi Bukit Meutuah
4. Daerah Irigasi Matang Seutui
5. Daerah Irigasi Medang Ara
6. Daerah Irigasi Merandeh
7. Daerah Irigasi Simpang Wie
8. Daerah Irigasi Suka Makmur

2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Secara umum Kota Langsa berbentuk konsentrik. Hal ini disebabkan oleh aktivitas perkotaan yang berkembang dan terdistribusi dibentuk oleh sistem jaringan jalan dan aktivitas perkotaan, seperti kegiatan perdagangan, pemerintahan, perindustrian dan kegiatan perkotaan lainnya, sehingga Kota Langsa memiliki pola konsentrik (memusat) dan berkembang mengikuti jaringan jalan yang ada, seperti :

- Sebelah utara, dibentuk oleh kegiatan industri dan jaringan jalan utama menuju ke kawasan pelabuhan;
- Sebelah selatan, dibentuk oleh sistem jaringan jalan utama dan beberapa fasilitas perkotaan lainnya, seperti : pendidikan, pemerintahan, tempat pembuangan akhir sampah dan perkebunan;
- Pusat kota, dibentuk oleh kegiatan *Central Bisnis Distric* (CBD), pemerintahan dan kesehatan;
- Sebelah barat, dibentuk oleh jaringan jalan alternatif dan kegiatan pemerintahan disekitarnya, industri ringan, sedang dan pergudangan;
- Sebelah timur, dibentuk oleh kegiatan pertanian.

Gambar 2.5
Peta Penggunaan Lahan Kota Langsa

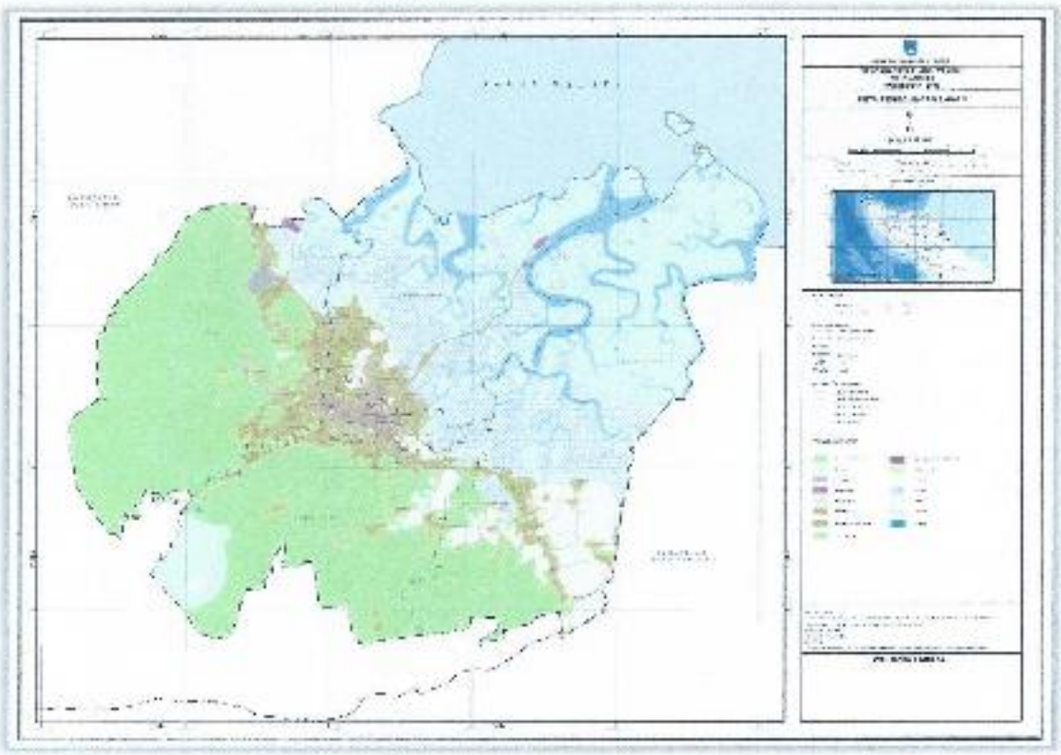

Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Landsekap Kota Langsa dicirikan oleh kondisi topografi yang tergantung mulai dari daerah pantai pada bagian utara kota sampai pada perbukitan pada bagian barat dan selatan kota. Disamping itu landsekap kota dicirikan juga oleh alur Sungai/Krueng Langsa yang mengalir pada bagian selatan kota serta kombinasi vegetasi berupa tanaman perkebunan kelapa sawit, karet dan tanaman pekarangan. Kondisi topografi dan keragaman vegetasi merupakan unsur fisik alam yang paling potensial bagi pengembangan estetika lingkungan kota. Secara sederhana landsekap Kota Langsa dapat dikelompokkan pada beberapa tipe spesifik.

a. Landsekap Pedesaan

Kondisi landsekap pedesaan sebagian besar terdapat pada daerah-daerah pinggiran kota terutama sepanjang jalan utama Medan - Banda Aceh serta pada bagian barat kota. Landsekap tipe ini ditandai oleh dominannya lahan persawahan dan daerah perkebunan kelapa sawit/karet. Perumahan sepanjang jalan masih bergaya sederhana dengan pagar tanaman khas pedesaan.

b. Landsekap Pantai Pesisir

Kondisi lansekap pantai/pesisir terdapat pada kawasan sepanjang jalan menuju pelabuhan Kuala Langsa. Pada kawasan ini dicirikan oleh sederetan kawasan permukiman nelayan dengan kondisi kumuh, dengan latar belakang daerah rawa-rawa dan daerah tambak udang yang dilengkapi dengan komunitas literal hutan bakau yang mulai terancam punah akibat berkembangnya kawasan permukiman dan tambak udang. Vegetasi hutan bakau tersebut merupakan tanaman asli dan hasil usaha penghijauan/rehabilitasi kawasan mangrove.

c. Landsekap Pusat Kota

Kondisi landsekap pada kawasan pusat kota ditandai oleh dua unsur utama fisik buatan yaitu jalan dan bangunan. Jalan Ahmad Yani merupakan koridor pergerakan utama yang paling penting, sehingga menjadi *"landmark"* Kota Langsa. Penataan pola hijau di sepanjang jalan tersebut relatif terbatas serta jalur pejalan kaki (pedestrian) yang kurang terpelihara.

Alun-alun dan taman kota di depan Pendopo Walikota merupakan daerah *"open space"* yang cukup menonjol di kawasan pusat kota. Salah satu bangunan yang cukup potensial menjadi *"landmark"* kota, seperti misalnya *"Gedung Joeang"* yang mempunyai nilai sejarah dan arsitektur yang cukup tinggi. Di Kota Langsa terdapat sejumlah monumen/relief dan bangunan artistik adat Aceh, yang umumnya diletakkan pada perapatan jalan sebagai monumen peringatan atau ornamen jalan.

Menara Mesjid Raya Langsa merupakan *landmark* lainnya Kota Langsa. Hal ini disebabkan karena bangunan tersebut memiliki ketinggian yang sangat menonjol dibandingkan dengan bangunan lain, selain itu mesjid sangat sesuai dengan kultur masyarakat Kota Langsa yang mayoritas menganut agama Islam.

Adapun tutupan lahan di Kota Langsa, adalah sebagai berikut :

- Kecamatan Langsa Barat : mayoritas penggunaan lahan adalah rawa/tambak dan berada hampir di seluruh wilayah kecamatan. hutan manggrove terletak di sebelah utara kecamatan, dan permukiman berada di sebelah selatan kecamatan berbatasan dengan sebelah utara Kota Langsa, dan terkonsentrasi di sepanjang jalan utama (jalan lintas Medan - Banda Aceh);

- Kecamatan Langsa Kota : mayoritas penggunaan lahan adalah untuk kawasan perdagangan dan jasa. Konsentrasi kegiatan perdagangan dan jasa terutama berlangsung di Kecamatan Langsa Kota yang merupakan pusat Kota Langsa. Selain itu penggunaan lahan lainnya adalah permukiman, perkantoran, pendidikan, yang hampir keseluruhannya terpusat di Jalan Ahmad Yani;
- Kecamatan Langsa Timur : penggunaan di sebelah barat kecamatan berupa lahan rawa, sawah, dan perkebunan. Di sebelah selatan berupa sawah dan perkebunan, sedangkan permukiman dan kegiatan perdagangan dan jasa terkonsentrasi di sepanjang arteri primer (jalan Langsa - Medan). Untuk kawasan permukiman tersebar juga di daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong sentra produksi pertanian dan perkebunan;
- Kecamatan Langsa Lama : dominasi penggunaan lahannya adalah perkebunan sawit dan karet. Hampir seluruh lahan yang ada dimanfaatkan untuk tanaman karet dan sawit utamanya oleh BUMN PTP I Nusantara. Di sebelah selatan kecamatan terdapat hutan lindung darat, tempat pembuangan akhir sampah yang terletak di sebelah barat Gampong Pondok Pabrik sampai ke sebelah timur Gampong Pondok Kemuning. Di sebelah barat daya kecamatan tepatnya di Gampong Pondok Kemuning terdapat hutan produksi. Lokasi permukiman berada di sebelah utara kecamatan tepatnya di sepanjang jalan Ahmad Yani;
- Kecamatan Langsa Baro : dominasi penggunaan lahan berupa perkebunan sawit dan karet, serta diantara perkebunan sawit dan karet terdapat hutan produksi yang berada di Gampong Geudubang Aceh. Lokasi permukiman sebelah timur kecamatan yaitu disepanjang jalan Ahmad Yani.

2.1.1.6. Kawasan Rawan Bencana

Kondisi topografi lahan di Kota Langsa yang sebagian besar merupakan dataran rendah dinilai memiliki potensi dan sangat rawan bencana alam banjir. Wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana banjir, terutama seperti di kawasan pusat perkotaan, kawasan dengan kondisi drainase yang kurang baik, serta kawasan yang berada di sekitar

Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada umumnya bencana banjir di perkotaan kerap terjadi ketika intensitas curah hujan tinggi, sementara drainase tidak berfungsi secara optimal akibat terbatasnya daya tampung debit air. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta membuang sampah sembarangan turut pula menjadi penyebab tersumbatnya saluran drainase sehingga air meluap ke jalan dan menggenangi kawasan permukiman warga kota. Bencana banjir harus ditanggulangi secara komprehensif mengingat dampaknya yang buruk terhadap aktivitas sosial-ekonomi, disamping juga rusaknya infrastruktur kota. Peningkatan kualitas drainase kota menjadi agenda penting Pemerintah Kota dalam jangka menengah ke depan dalam upaya pengurangan resiko bencana banjir.

Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kota Langsa terdiri atas:

a. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi :
   1. Gelombang pasang dengan intensitas tinggi terdapat di Gampong Telaga Tujuh seluas 151,96 ha dan Kuala Langsa seluas 707,53 ha di Kecamatan Langsa Barat; dan
   2. Gelombang pasang dengan intensitas sedang terdapat di Gampong Sungai Pauh seluas 96,53 ha di Kacamatan Langsa Barat, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,60 ha di Kecamatan Langsa Lama, Gampong Sungai Lueng seluas 12,95 ha di Kecamatan Langsa Timur; dan
   3. Gelombang pasang dengan intensitas rendah terdapat di Gampong Matang Seulimeng seluas 2,08 ha di Kecamatan Langsa Barat.

b. Kawasan rawan banjir dengan luas 378,54 ha, meliputi :
   1. Gampong Paya Bujok Seuleumak seluas 12,14 ha dan Gampong Birem Puntong seluas 17,86 ha yang berada di Kecamatan Langsa Baro;
   2. Gampong Teungoh seluas 37,48 ha dan Gampong Jawa seluas 18,09 ha yang berada di Kecamatan Langsa Kota; dan
   3. Gampong Pondok Kemuning seluas 74,19 ha, Gampong Seulalah seluas 30,40 ha, Gampong Pondok Pabrik seluas 9,50 ha, Gampong Sidodadi seluas 7,18 ha, Gampong Sidorejo seluas 20,41 ha, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,16 ha,

Gampong Baro seluas 16,51 ha dan Gampong Meurandeh 101,90 ha yang berada di Kecamatan Langsa Lama.

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Kota Langsa

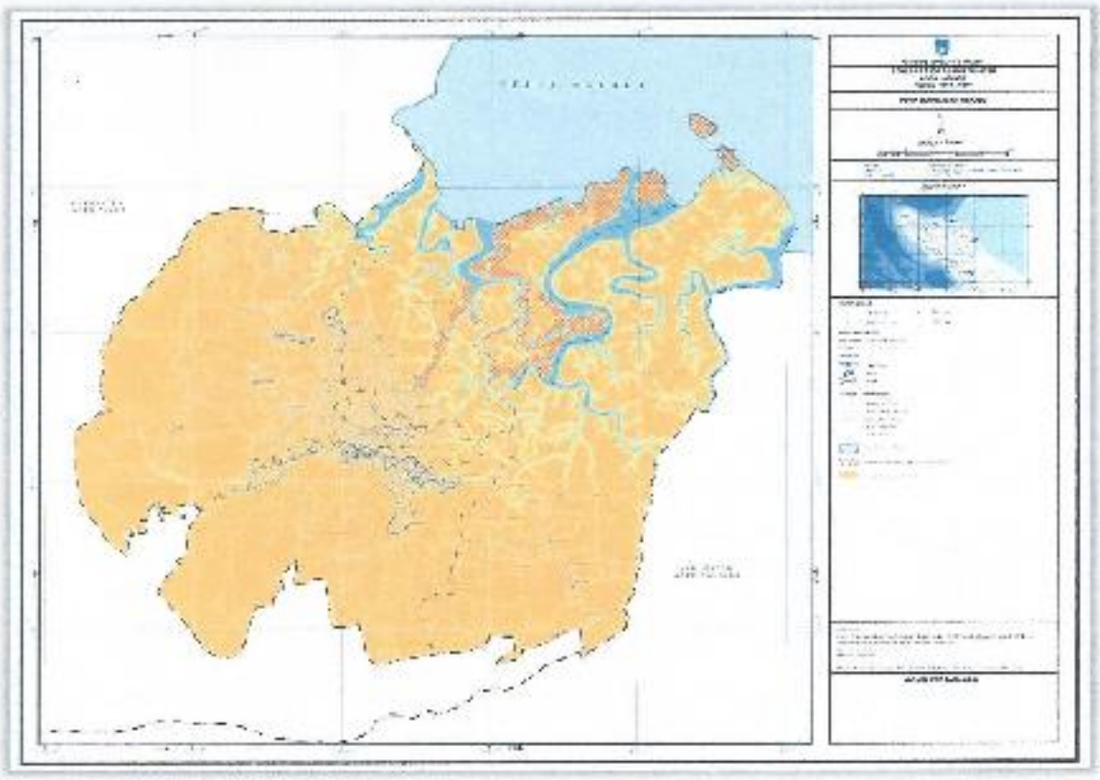

Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Keberadaan kawasan permukiman di daerah perkotaan dengan kondisi perumahan yang relatif padat antara kawasan pertokoan dan permukiman warga, juga menjadikan daerah ini rawan bencana kebakaran. Berdasarkan pemetaan sejumlah potensi bencana yang diperkirakan terjadi di Kota Langsa, berbagai upaya pencegahan dan antisipasi secara dini, termasuk melalui upaya mitigasi bencana yang harus disosialisasikan kepada masyarakat akan terus ditingkatkan dan diintensifkan. Selain itu, upaya mitigasi bencana berbasis masyarakat akan terus didorong sehingga masyarakat turut andil dan siaga dalam mengatasi berbagai bencana.

2.1.2. Demografi

Pertumbuhan penduduk Kota Langsa secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Sebagai kota yang berada di wilayah lintas utama Sumatera, Kota Langsa

memiliki karakteristik penduduk yang heterogen. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota Langsa adalah sebanyak 154.722 jiwa, jumlah ini terus meningkat secara signifikan hingga mencapai sebanyak 162.814 jiwa pada tahun 2014. Distribusi dan sebaran jumlah penduduk kota relatif belum merata di setiap wilayah kecamatan. Pada tahun 2013, tercatat hampir 28,08 persen atau sebanyak 44.095 jiwa penduduk kota tinggal di Kecamatan Langsa Baro. Selanjutnya diikuti penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Langsa Kota, yaitu sebanyak 38.003 jiwa atau 24,20 persen. Sedangkan jumlah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Langsa Barat berjumlah 32.368 jiwa atau sekitar 20,62 persen, selebihnya jumlah penduduk Kota Langsa terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Timur, masing-masing sebanyak 28.124 jiwa (17,91 persen) dan sebanyak 14.421 jiwa (9,18 persen).

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Kota Langsa Tahun 2012-2014 (Jiwa)

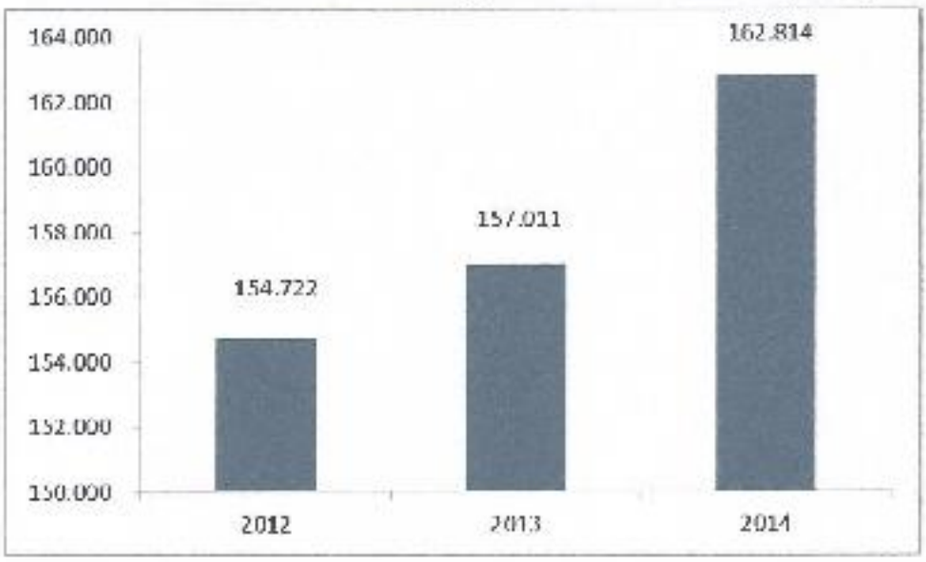

Sumber : BPS Kota Langsa, 2015

Dengan luas wilayah yang mencapai 239,83 kilometer persegi (km^2) dan didiami oleh 157.011 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Langsa tahun 2013 adalah sebanyak 598 orang per kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Langsa Kota, yaitu sebanyak 6.240 orang per kilometer persegi, sedangkan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, yakni sebanyak 184 orang per kilometer persegi.

Tabel 2.2
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2013

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Langsa Timur	78,23	14.421	184
2	Langsa Lama	15,05	26.124	624
3	Langsa Barat	48,78	32.368	664
4	Langsa Baro	61,68	44.095	715
5	Langsa Kota	6,09	38.003	6.240
	Jumlah	**239,83**	**157.011**	**598**

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2014

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah rumah tangga di Kota Langsa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 juga ikut mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah rumah tangga di Kota Langsa sebanyak 33.029 RT dan pada tahun 2013 meningkat sebanyak 1.998 RT pada tahun 2013 menjadi 35.027 RT.

Tabel 2.3
Jumlah Rumah Tangga Kota Langsa Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2012-2013

Kecamatan	Rumah Tangga	
	2012	2013
Langsa Timur	2.797	2.893
Langsa Lama	6.194	7.022
Langsa Barat	6.646	6.817
Langsa Baro	9.540	9.923
Langsa Kota	7.852	8.372
Jumlah RT	**33.029**	**35.027**

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan pendekatan. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

PDRB Kota Langsa menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan daerah khususnya perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB harga konstan tahun 2010. Penggunaan harga tahun dasar 2010 bertujuan untuk menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi) dan menggunakan faktor pengali harga konstan (*at constant price inflation factor*) sehingga diperoleh gambaran peningkatan produksi secara makro.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK
Kota Langsa Tahun 2011-2014 (persen)

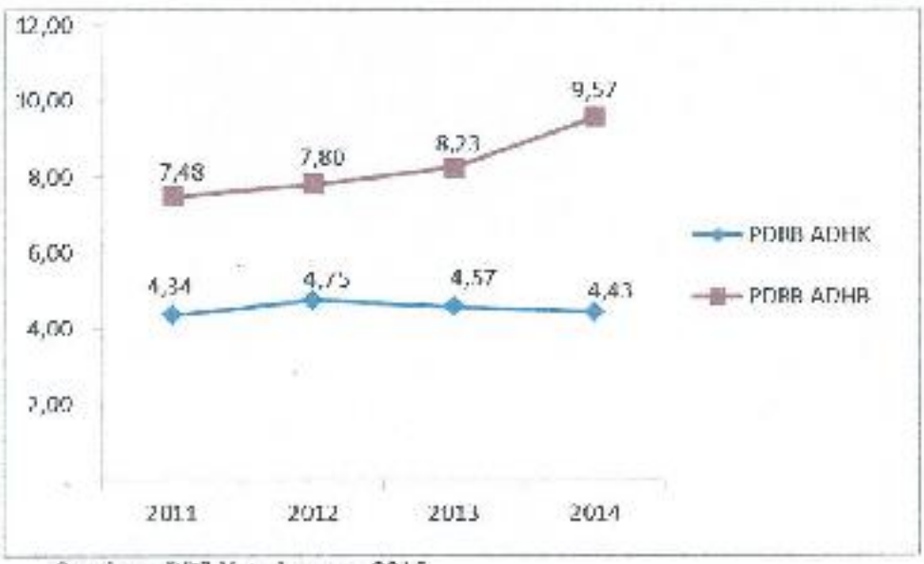

Sumber : BPS Kota Langsa, 2015

Perekonomian Kota Langsa pada tahun 2011 dengan menggunakan penghitungan metode baru tahun dasar 2010 mencapai 4,34%. Pada tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kota Langsa di tahun 2012 terjadi lebih cepat mencapai 4,75%. Pada tahun tersebut pertumbuhan merata di segala kategori, mulai dari kategori pertanian hingga jasa-jasa. Perekonomian Kota Langsa mulai melambat di tahun 2013 dan tahun 2014 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa melambat

dengan persentase 4,57% dan pada tahun 2014 pertumbuhan menjadi lebih lambat lagi menjadi hanya sebesar 4,43%

Melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh berbagai kategori. Salah satu kategori yang menurun laju pertumbuhannya yaitu kategori pertanian. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan kategori pertanian berada pada level negatif yang artinya produksi kategori pertanian yang dihasilkan pada tahun 2010 turun drastis menjadi -0,64% dibandingkan dengan tahun 2013. Banyak faktor yang menyebabkan laju pertumbuhan di kategori pertanian menurun drastis. Turunnya harga jual komoditas tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit, ditambah lagi dengan semakin meningkatnya biaya perawatan tanaman seperti pupuk dan pestisida, serta cuaca yang tidak menentu, kemudian dengan adanya berbagai hama dan penyakit yang menimpa sebagian besar tanaman padi mengakibatkan kategori pertanian semakin menurun laju pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 2.3
Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK
Kota Langsa Tahun 2011-2014 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kota Langsa, 2015

Selain kategori pertanian, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa pada tahun 2014 juga disebabkan oleh kategori-kategori lain diantaranya kategori industri pengolahan yang melambat sebesar 2,83% dan 2,33% pada tahun 2013 dan 2014, kategori pengadaan listrik dan gas yang juga melambat sebesar 5,17%, kategori jasa keuangan dan asuransi yang laju pertumbuhannya menurun

menjadi -2,95%, dan kategori jasa lainnya yang melambat 2,13% pada tahun 2014.

Tabel 2.4
Nilai dan Kontribusi PDRB ADHK Kota
Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2010-2014

No.	Kategori	2010		2011		2012		2013*		2014**	
		Juta	%	Juta	%	Juta	%	Juta	%	Juta	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	257.120	9,85	257.809	9,65	270.908	9,50	279.561	9,37	277.776	8,92
2	Pertambangan dan Penggalian	15.956	0,61	16.131	0,59	16.597	0,58	16.977	0,57	17.357	0,56
3	Industri Pengolahan	255.903	9,81	258.078	9,65	279.224	9,79	287.126	9,63	297.805	9,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.279	0,16	4.398	0,16	4.590	0,16	4.730	0,16	4.843	0,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.192	0,05	1.258	0,05	1.339	0,05	1.399	0,05	1.456	0,05
6	Kontruksi	248.291	9,51	255.348	9,42	255.320	8,94	280.026	9,39	296.517	9,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	739.379	28,34	777.254	28,55	819.167	28,72	863.955	28,97	908.583	29,17
8	Transportasi dan Pergudangan	237.899	9,12	247.573	9,09	261.768	9,18	277.281	9,30	293.976	9,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50.314	1,91	52.504	1,93	56.001	1,96	59.496	2,00	63.529	2,04
10	Informasi dan Komunikasi	150.484	5,77	157.331	5,78	169.697	5,95	178.199	5,98	190.281	6,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	76.930	2,95	85.803	3,15	86.951	3,05	88.871	2,98	86.250	2,77
12	Real Estate	115.748	4,44	120.100	4,41	124.832	4,38	129.975	4,36	136.773	4,39
13	Jasa Perusahaan	23.497	0,90	24.629	0,90	25.582	0,90	26.695	0,90	28.201	0,91
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	196.897	7,55	204.615	7,52	212.534	7,45	217.529	7,29	228.688	7,34
15	Jasa Pendidikan	46.262	1,77	47.996	1,76	49.201	1,73	51.322	1,72	53.662	1,72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127.910	4,90	132.304	4,86	140.097	4,91	148.838	4,99	156.906	5,04
17	Jasa Lainnya	61.165	2,34	63.392	2,33	66.999	2,35	70.134	2,35	71.628	2,30
	PDRB ADHK	2.609.185	100,00	2.722.523	100,00	2.851.806	100,00	2.982.110	100,00	3.114.271	100,00

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015
Keterangan: * : *angka sementara*
** : *angka sangat sementara*

2.2.1.2. Laju Inflasi

Dalam makro ekonomi, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari

barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarannya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Perhitungan inflasi di Kota Langsa dilakukan dengan perhitungan indeks harga implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB riil dengan PDRB nominal. Peningkatan indeks harga implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa (dari sisi produsen) dalam periode satu tahun. Selama kurun waktu 2012-2014 tingkat inflasi di Kota Langsa menunjukkan tren yang meningkat. Inflasi paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 4,92 persen. Perkembangan angka inflasi Kota Langsa disajikan pada grafik berikut :

Grafik 2.4
Laju Implisit (Inflasi) Kota Langsa Tahun 2011-2014

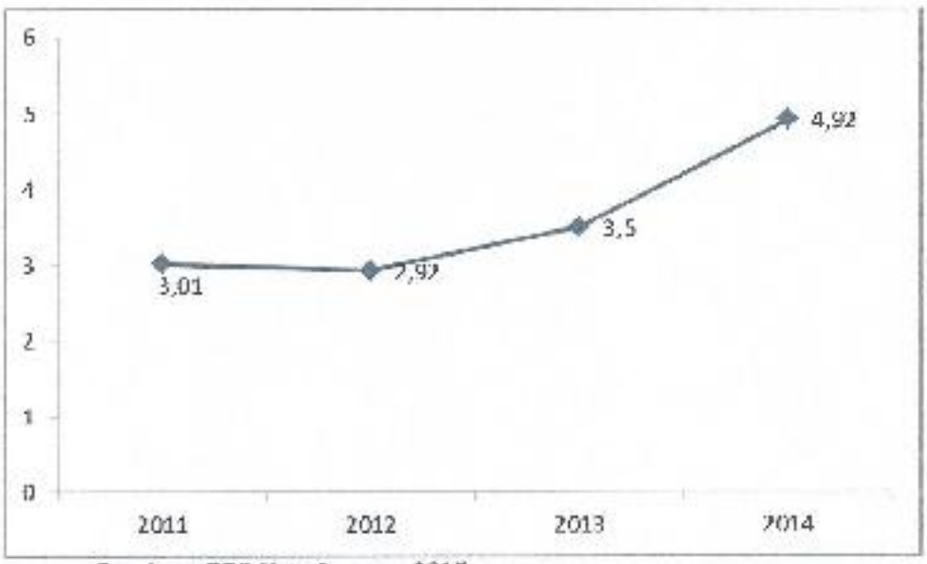

Sumber : BPS Kota Langsa, 2015

2.2.1.3. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk.

Grafik 2.5
PDRB per Kapita ADHB Kota Langsa
Tahun 2010-2014 (juta rupiah)

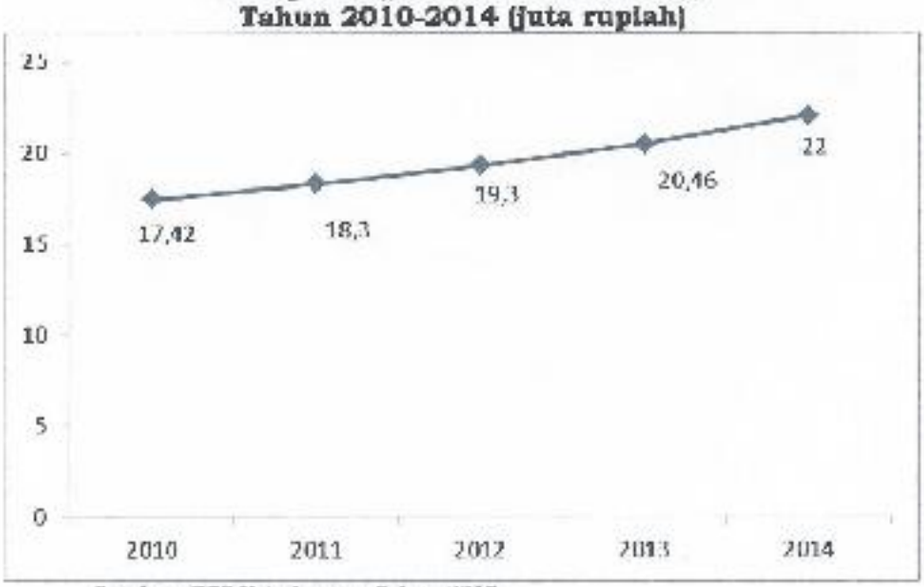

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa PDRB per kapita Kota Langsa ADHB selama kurun waktu 2010-2014 cenderung meningkat. Pada tahun 2010 nilai PDRB per kapita Kota Langsa sebesar 17,42 juta rupiah dan nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 2014 PDRB per kapita Kota Langsa menjadi 22 juta rupiah

Peningkatan PDRB per kapita yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2010-2014 tersebut merupakan cerminan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Langsa. Perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang berakibat kepada meningkatnya tambahan permintaan terhadap barang atau jasa yang selanjutnya akan meningkatkan siklus distribusi barang atau jasa. Kondisi akhir yang diharapkan dari dampak kenaikan pendapatan per kapita adalah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

2.2.1.4. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar antara pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Persentase penduduk miskin di Kota Langsa pada tahun 2009

sebesar 16,20 persen turun menjadi 15,01 persen pada tahun 2010. Penurunan ini terus berlanjut secara signifikan hingga pada tahun 2013 menjadi 12,62 persen dari jumlah penduduk Kota Langsa.

Grafik 2.6
Persentase Penduduk Miskin Kota Langsa
Tahun 2009-2013 (persen)



Sumber : BPS Aceh, Tahun 2015

Selain angka tingkat kemiskinan, indikator kemiskinan lain juga dapat ditinjau dari angka garis kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Hingga tahun 2013 angka garis kemiskinan Kota Langsa berada pada level Rp.298.749. Angka ini masih berada sedikit jauh dari Provinsi Aceh yang sebesar Rp.348.172.

Grafik 2.7
Garis Kemiskinan Kota Langsa
Tahun 2009-2013 (rupiah)



Sumber : BPS Aceh, Tahun 2015

Dalam rangka meningkatan efektifitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, berbagai program kegiatan dari berbagai sumber pendanaan dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa dalam rangka menekan angka kemiskinan. Diantaranya adalah dengan membangun rumah sehat sederhana bagi penduduk miskin yang berada di setiap desa baik berupa bangun baru ataupun rehab. Selain beberapa kegiatan yang bersifat fisik, Pemerintah Kota Langsa juga melaksanakan kegiatan non fisik seperti memberikan dukungan penuh (*sharing*) terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

2.2.1.5. Angka Kriminalitas

Dinamika perkembangan Kota Langsa yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas infrastruktur daerah akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan angka kriminalitas.

Tabel 2.5
Jumlah Tindak Kriminal di Kota Langsa Tahun 2012-2014

NO.	JENIS KRIMINALITAS	2012	2013	2014
1	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-
2	Jumlah kasus pembunuhan	1	-	-
3	Jumlah kejahatan seksual	17	21	20
4	Jumlah kasus penganiayaan	133	108	131
5	Jumlah kasus pencurian	412	351	436
6	Jumlah kasus penipuan	80	63	58
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	1	-	1
	Jumlah	**644**	**543**	**646**

Sumber : Polres Kota Langsa, Tahun 2015

Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Dalam kurun waktu selama tiga tahun perkembangan angka kriminalitas di Kota Langsa sangat berfluktuasi, jumlah tindak kriminal yang terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 543 kasus dan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 646 kasus. Diantara

tujuh jenis tindak kriminal di Kota Langsa, jumlah kasus pencurian merupakan kasus yang paling tinggi yaitu dengan rata-rata 400 kasus setiap tahunnya.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menjadi indikator kunci dasar keberhasilan bidang pendidikan. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, indikator angka melek huruf juga menjadi dasar bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya terkait pengembangan pembelajaran berkelanjutan dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi, serta penggalian potensi. Perkembangan Angka Melek Huruf periode 2011-2013 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2011 berada pada angka 99,3 persen dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 99,36 persen. Untuk lebih jelasnya perkembangan Angka Melek Huruf Kota Langsa dapat dilihat dalam gambar berikut.

Grafik 2.8
Perkembangan Angka Melek Huruf
Tahun 2011-2013 Kota Langsa (persen)

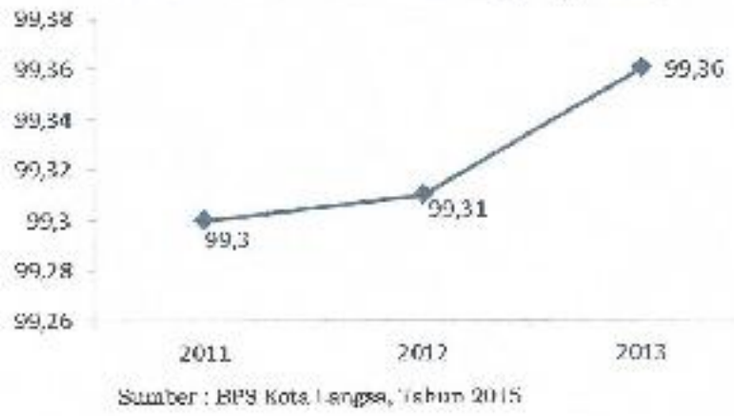

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.2.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan

formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Langsa, selama 2010-2014 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 10,33 di tahun 2010 menjadi 10,48 di tahun 2014 (setara SLTA). Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kota Langsa ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Langsa semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Grafik 2.9
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2010-2014 Kota Langsa (Tahun)

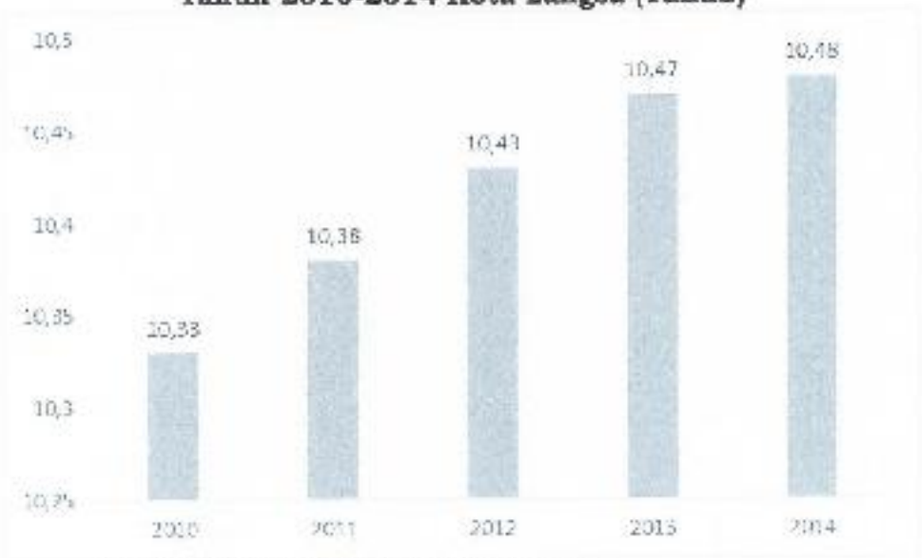

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.2.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar

Kota Langsa pada tahun 2013 pada tingkat SD mencapai 101,38 persen, tingkat SLTP sebesar 100,36 persen dan tingkat SLTA hanya sebesaar 84,25 persen.

Grafik 2.10
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/SLTP/SLTA
Tahun 2013 Kota Langsa

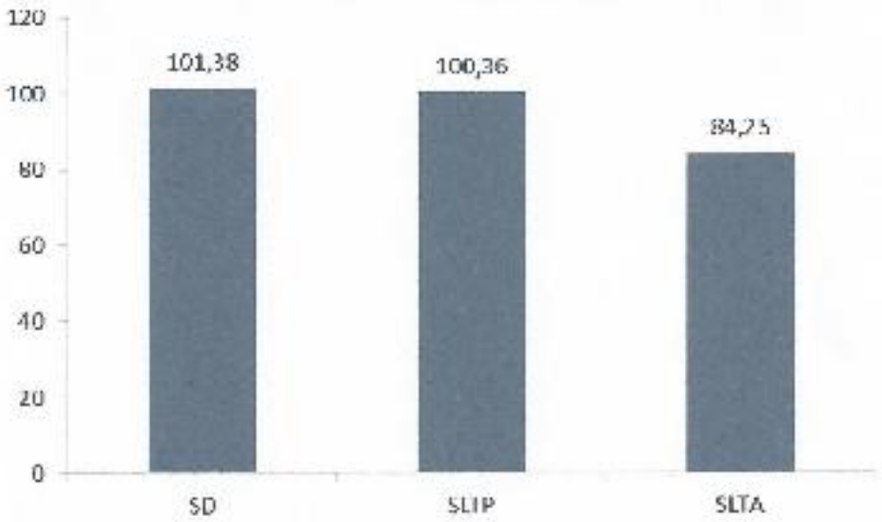

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.2.2.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Perkembangan APM pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2012 sebesar 98,65% turun menjadi 75,69% pada tahun 2013, dan hingga tahun 2014 kembali turun menjadi 70,59%.

Tabel 2.6
Perkembangan APM Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)

No.	Uraian	2012	2013	2014
1	APM SD/MI/Paket A	98,65	75,69	70,59
2	APM SMP/MTs/Paket B	72,69	89,31	51,87
3	APM SMA/SMK/MA/Paket C	59,6	73,03	65,3

Sumber : LPPD Kota Langsa, Tahun 2015

Perkembangan APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sangat bervariasi, dimana pada tahun 2012 sebesar 72,69% naik menjadi 89,31% pada tahun 2013 dan turun pada tahun 2014 menjadi 51,87%. Hal yang sama juga terjadi pada APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C, dimana pada tahun 2012 sebesar 59,6% naik menjadi 73,03% pada tahun 2013, dan turun pada tahun 2014 menjadi 65,3%.

2.2.2.2. Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan antara lain adalah : 1) peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan; 2) perbaikan mutu lingkungan hidup yang menjamin kesehatan; 3) peningkatan status gizi masyarakat; 4) pengurangan kesakitan (morbilitas) dan kematian (mortalitas); serta 5) pengembangan keluarga sehat sejahtera.

2.2.2.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai usia 1 tahun, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Secara garis besar, terdapat dua faktor penyebab kematian bayi yaitu faktor endogen (kematian neonatal) dan faktor eksogen (kemarian *post neonatal*).

Perkembangan AKB di Kota Langsa cenderung mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir yaitu dari 4 bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2012 naik menjadi 14 bayi per 1.000 kelahiran. Namun angka ini masih di bawah target MDGs yakni 17 bayi per 1.000

kelahiran di tahun 2015. Untuk lebih jelasnya, perkembangan AKB dan AKHB Kota Langsa dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.11
Perkembangan AKB dan AKHB Tahun 2012-2014 Kota Langsa

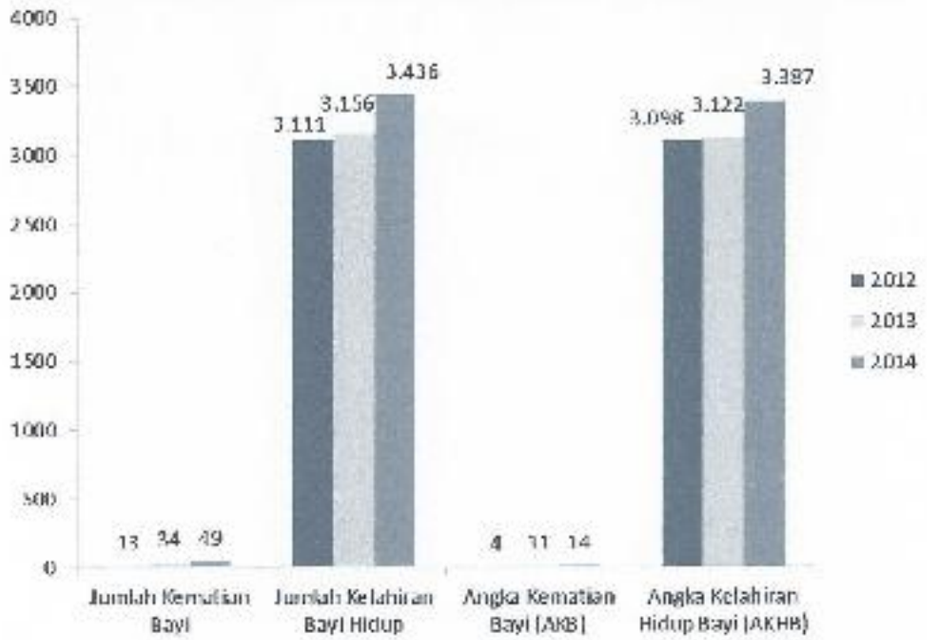

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2015

2.2.2.2.2. Balita Gizi Buruk

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk kondisi status gizi Balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perkembangan jumlah Balita Gizi Buruk Kota Langsa tahun 2014 mengalami penurunan dari 9 Balita pada tahun 2013 menjadi 3 Balita di tahun 2014, dan semua Balita penderita gizi buruk tersebut telah tertangani dengan baik.

Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Keterangan	2012	2013	2014
Jumlah Balita Gizi Buruk	6	9	3
Jumlah Balita Gizi Buruk yang tertangani	6	9	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2015

2.2.2.2.3. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka harapan hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor kesehatan lebih berperan selain faktor lainnya, seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik. Perkembangan angka harapan hidup masyarakat Kota Langsa tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan yaitu dari 68,65 tahun pada tahun 2010 naik menjadi 68,79 tahun pada tahun 2014. Lebih jelasnya data perkembangan angka harapan hidup Kota Langsa dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.12
Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2010-2014
Kota Langsa (Tahun)



Sumber : BPS Kota Langsa, 2015

2.2.2.3. Pertanahan

Bidang pertanahan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan daerah dan memiliki fungsi ekonomis serta sosial. Karena mengandung fungsi ekonomis dan social, maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas. Bukti kepemilikan tanah tersebut antara lain, sertifikat tanah

dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP). Di Kota Langsa, pada tahun 2013 sertifikat hak atas tanah yang paling banyak diterbitkan adalah yang berasal dari hak tertanggung dengan status hak milik yakni sebanyak 769 sertifikat. Secara keseluruhan, penertiban sertifikat hak atas di Kecamatan Langsa Baro adalah lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Langsa. Untuk lebih jelasnya, banyaknya sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan di setiap kecamatan pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Banyaknya Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan
Tahun 2013 Kota Langsa

KECAMATAN	Jual Beli		Hibah		Pemisahan Hak		Warisan		Hak Tertanggung	
	HM	HGB	HM	HGB	HM	HGB	HM	HGB	HM	HGB
Langsa Timur	18		1	-	6	-	3	-	28	-
Langsa Lama	32	-	1	-	15	-	27	-	72	-
Langsa Barat	70	3	6	-	21	2	54	-	164	1
Langsa Baro	124	3	1	-	38	-	191	16	257	-
Langsa Kota	77	16	13	-	25	8	87	5	248	40
Jumlah	**321**	**22**	**22**	**0**	**105**	**10**	**362**	**21**	**769**	**41**

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

Keterangan: HM : Hak Milik
HGB : Hak Guna Bangunan

2.2.2.4. Ketenagakerjaan

Prioritas dalam pembangunan perekonomian adalah penciptaan lapangan pekerjaan atau dengan kata lain berkurangnya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka Kota Langsa dari waktu ke waktu cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,61%, dan hingga pada tahun 2013 meningkat secara signifikan menjadi 11,74%. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan pekerjaan bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja

(*jobless*). Untuk lebih jelasnya, perkembangan indikator ketenagakerjaan Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan
Tahun 2011-2013 Kota Langsa

No	Indikator Ketenagakerjaan	2011	2012	2013
1	Angkatan Kerja (jiwa)	64.107	61.220	61.781
2	Bekerja (jiwa)	59.227	55.837	54.525
3	Pengangguran (jiwa)	4.880	5.383	7.256
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	61,7	58,85	56,51
5	Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) (%)	7,61	8,79	11,74

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

Masih tingginya angka pengangguran disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, serta di sisi lain perkembangan industri kreatif dan wirausahawan belum optimal.

2.2.2.5. Seni Budaya dan Olah Raga

Penguatan budaya yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam perlu terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kota Langsa yang menjadi bagian dari provinsi sebagai kota Syariat Islam. Hal tersebut perlu dilakukan dengan upaya mengantisipasi secara cepat pergerakan globalisasi yang didukung pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, terutama budaya global yang tidak sejalan dengan Syariat Islam itu sendiri. Berdasarkan data yang ada, jumlah grup kesenian di Kota Langsa hingga tahun 2014 adalah sebanyak 84 grup dengan jumlah gedung kesenian sebanyak 3 gedung.

Tabel 2.10
Perkembangan Grup dan Gedung Kesenian
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Uraian	2012	2013	2014
Jumlah Grup Kesenian	71	84	84
Jumlah Gedung Kesenian	3	3	3

Sumber : Disporabudpar Kota Langsa, Tahun 2015

Perkembangan bidang pemuda dan olah raga di Kota Langsa selama kurun waktu 2012 – 2014 dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain ketersediaan sarana dan prasarana olah raga jumlah klub dan cabang olah raga. Jumlah klub olah raga di Kota Langsa hingga tahun 2014 adalah sebanyak 32 klub dengan 1 gedung olah raga.

Terdapat berbagai permasalahan yang harus diatasi dalam upaya pengembangan prestasi olahraga dimasa mendatang, antara lain terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dibidang olahraga, pembinaan dan upaya pembibitan atlit olahraga yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, dan rendahnya penghargaan bagi olahragawan berprestasi.

Tabel 2.11
Perkembangan Klub dan Gedung Olah Raga
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Uraian	2012	2013	2014
Jumlah Klub Olah Raga	32	32	32
Jumlah Gedung Olah Raga	1	1	1

Sumber : Disporabudpar Kota Langsa, Tahun 2015

2.2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah adalah daerah maju, daerah berkembang atau daerah terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Grafik 2.13
Perkembangan IPM Tahun 2010-2014 Kota Langsa

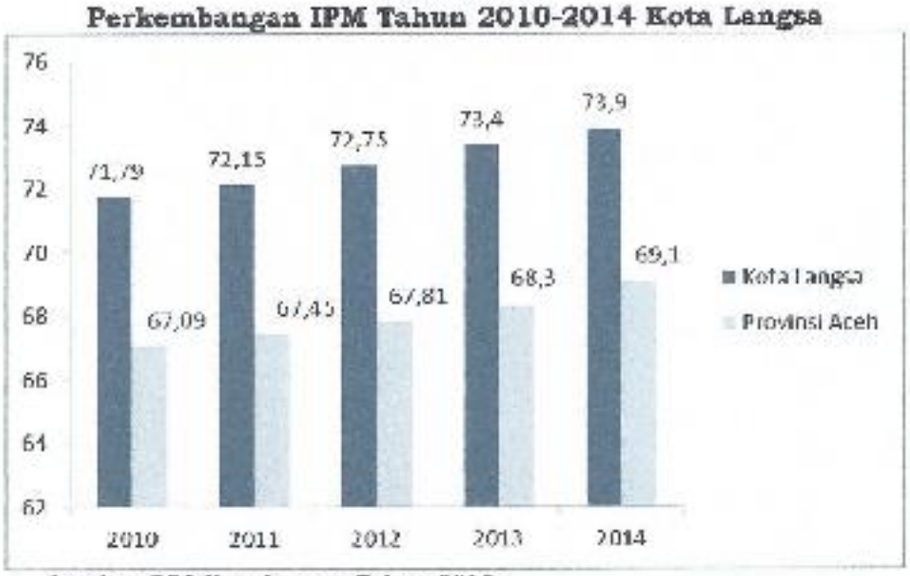

Sumber :BPS Kota Langsa, Tahun 2015

Perkembangan IPM Kota Langsa dari tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan, hal ini menandakan bahwa kualitas

pembangunan Kota Langsa terus mengarah ke arah yang lebih baik. Angka IPM Kota Langsa tahun 2010 adalah sebesar 71,79 dan meningkat hingga tahun 2014 menjadi 73,9, angka ini jauh berada di atas rata-rata angka IPM provinsi.

2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
2.3.1.1. Pendidikan
2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar
2.3.1.1.1.1.Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan kepada perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Perkembangan APS usia 7-12 tahun di Kota Langsa mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu sebesar 98,88 dibandingkan pada tahun 2011 yang mencapai 99,59, namun angka tahun 2013 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 98,66. Perkembangan APS usia 13-15 cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan APS usia 7-12 tahun namun terus mengalami peningkatan selama periode 2011-2013, dimana pada tahun 2011 sebesar 90,78 dan pada tahun 2013 terus meningkat menjadi 96,11.

Grafik 2.14
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Pendidikan Dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) Tahun 2011-2013 Kota Langsa



Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kota Langsa, Tahun 2015 (diolah)

2.3.1.1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Pada rentang usia 7-12 tahun hingga tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah sebanyak 36 sekolah hal ini berarti setiap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun tersedia 36 sekolah SD/MI, sedangkan pada usia 13-15 tahun adalah sebanyak 26 sekolah dimana setiap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun tersedia 26 sekolah SMP/MTs.

2.3.1.1.1.3.Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid

Indikator pendidikan lainnya yang perlu diperhatikan adalah rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah murid sekolah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Rasio guru terhadap murid pendidikan usia 7-12 tahun dalam tiga tahun terakhir (tahun 2011-2013) menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2011 rasio guru adalah sebesar 663 terus meningkat hingga tahun 2013 menjadi 717, ini berarti setiap 10.000 murid usia 7-12 tahun tersedia 717 orang guru SD/MI. Rasio guru terhadap murid pendidikan SMP/MTs dalam tiga tahun terakhir

menunjukkan angka yang bervariasi, pada tahun 2011 rasio guru adalah sebesar 833 terus meningkat hingga tahun 2012 menjadi 857, dan menjelang tahun 2013 rasio guru terhadap murid pendidikan SMP/MTs turun menjadi 821. Rasio ini menunjukkan bahwa setiap 10.000 murid usia 13-15 tahun tersedia sebanyak 821 orang guru SMP/MTs.

2.3.1.1.2. Pendidikan Menengah

2.3.1.1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

Grafik 2.15
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Pendidikan Menengah (usia 16-19 tahun)
Tahun 2011-2013 Kota Langsa

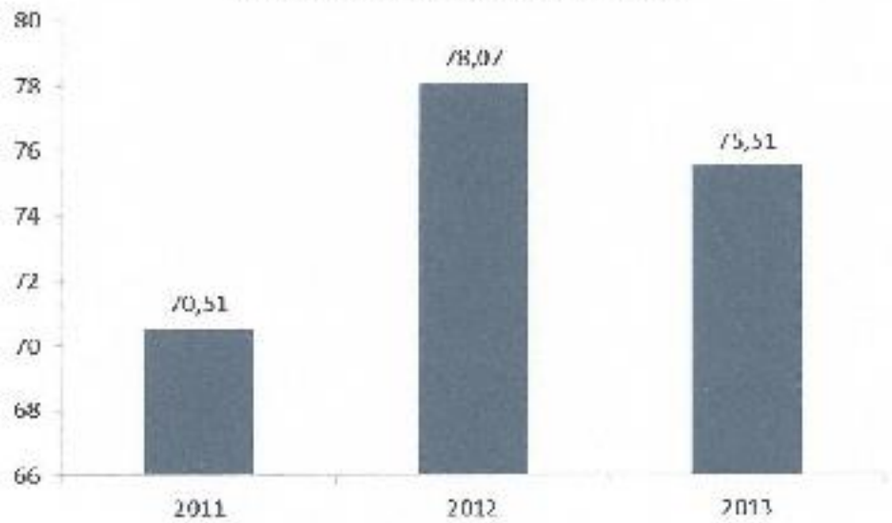

Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kota Langsa, Tahun 2015 (diolah)

APS usia 16-19 tahun di Kota Langsa selama periode 2011-2013 mengalami pasang surut, pada tahun 2011 APS mencapai 70,51 naik pada tahun 2012 menjadi sebesar 78,07 dan kemudian turun pada tahun 2013 menjadi 75,51.

2.3.1.1.2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan

menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.

Perkembangan jumlah gedung sekolah menengah periode 2011-2013 adalah sebanyak 24 unit dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-19 tahun sebanyak 10.830 jiwa. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah sebanyak 22, hal ini berarti bahwa setiap 10.000 ribu penduduk usia 16-19 tahun tersedia sekolah sebanyak 22 unit.

2.3.1.1.2.3.Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Perkembangan jumlah guru sekolah menengah periode 2011-2013 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2011 sebanyak 1.018 orang guru naik menjadi 1.198 guru pada tahun 2013. Kenaikan juga terjadi pada jumlah murid kelompok usia 16-19 tahun. Rasio guru terhadap murid pada tahun 2013 adalah sebanyak 1.177, artinya setiap 10.000 murid usia 16-19 tahun tersedia sebanyak 1.177 orang guru.

2.3.1.1.3. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menggambarkan tingkat kualitas dari pendidikan, jika suatu sekolah banyak terdapat siswanya yang lulus maka sekolah tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding sekolah yang memiliki siswa dengan tingkat kelulusan yang rendah. Pada setiap jenjang pendidikan sekolah formal sebagai syarat kelulusan bagi murid yang telah menduduki kelas tertinggi (kelas 6 untuk SD sederajat, kelas 3 untuk SLTP dan SLTA sederajat) diadakan ujian akhir atau Ujian Nasional (UN). Siswa yang hasil nilai ujian akhirnya memenuhi standar kelulusan akan dinyatakan lulus.

Grafik 2.16
Angka Kelulusan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2012-2013 Kota Langsa (person)

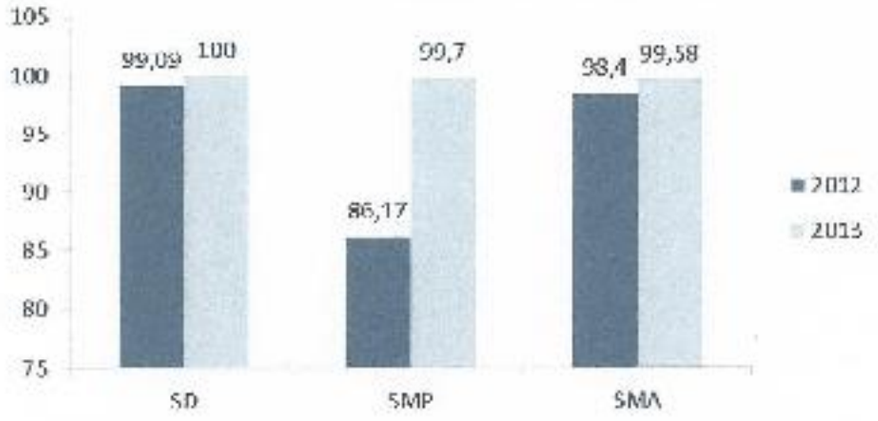

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

Angka Kelulusan pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kota Langsa periode 2012-2013 mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Angka Kelulusan di tahun 2013 yaitu sebesar 100 persen lulus pada jenjang pendidikan SD. Di tingkat pendidikan SMP Angka Kelulusan mencapai 99,7 persen, sedangkan di tingkat pendidikan SMA mencapai 99,58 persen.

2.3.1.1.4. Pendidikan Dayah

Selain pendidikan umum, di Kota Langsa juga terdapat pendidikan keagamaan dalam hal adalah pesantren atau dayah. Jumlah pesantren atau dayah di Kota Langsa meningkat dari 12 pesantren menjadi 14 pesantren baik tradisional maupun modern. Jumlah guru pesantren di Kota Langsa cenderung mengalami penurunan di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, namun pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 172 ustadz/guru. Berbanding terbalik dengan jumlah ustadz/guru, jumlah santri/murid di seluruh pesantren justru terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 sebanyak 3.244 santri naik menjadi 3.994 santri/murid diakhir tahun 2014. Jumlah ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Langsa khususnya para orang tua santri/murid semakin sadar akan pentingnya pendidikan keagamaan bagi putra dan putri mereka.

Tabel 2.12
Jumlah Pesantren, Ustadz dan Santri
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Tahun	Pesantren	Ustadz/Guru	Santri/Murid
2012	12	359	3.244
2013	14	122	3.777
2014	14	175	3.994

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.2. Kesehatan

2.3.1.2.1. Rasio Posyandu Terhadap Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Aktivitas utama Posyandu yang paling utama adalah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.13
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Uraian	2012	2013	2014
Posyandu	108	118	120
Balita	18.879	20.713	17.271
Rasio	**1:6**	**1:6**	**1:7**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, Tahun 2015

Jumlah Posyandu tahun 2012 sebanyak 108 unit, tahun 2013 menjadi 118 unit dan hingga akhir tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebanyak dua unit menjadi 120 unit yang tersebar di lima kecamatan. Jumlah Balita di Kota Langsa pada tahun 2012 sebanyak 18.879 orang, meningkat pada tahun 2013 menjadi 20.713 Balita dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 17.271 Balita. Perkembangan rasio Posyandu per satuan Balita dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada 2013 rasio Posyandu terhadap satuan Balita adalah sebanyak enam Balita dan akhir tahun 2014 menjadi satu Posyandu terhadap tujuh Balita.

2.3.1.2.2. Rasio Puskemas, Poliklinik, Pustu dan Polindes Terhadap Satuan Penduduk

Salah satu upaya Pemerintah Kota Langsa dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas sarana kesehatan kepada masyarakat. Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes di Kota Langsa tahun 2014 sebanyak 82 unit dengan rasio sebesar 0,50, meningkat dari tahun 2013 yang sebesar 0,48. Hal ini berarti, di tahun 2014 sebanyak 1.000 penduduk di Kota Langsa dapat dilayani oleh 0,50 Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes.

Tabel 2.14
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu, dan Polindes
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

No.	Sarana dan Prasarana Kesehatan	2012	2013	2014
1	Jumlah Puskesmas	5	5	5
2	Jumlah Poliklinik Kesehatan	9	10	17
3	Jumlah Puskesmas Pembantu	7	8	8
4	Jumlah Poskesdes/Polindes	50	52	52
5	Sub Jumlah	71	75	82
6	Jumlah Penduduk	154.722	157.011	162.814
7	**Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes Terhadap Satuan Penduduk**	**0,46**	**0,48**	**0,50**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.2.3. Rasio Rumah Sakit Terhadap Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Jumlah rumah sakit di Kota Langsa pada tahun 2014 adalah sebanyak empat unit terdiri satu unit milik pemerintah daerah dan tiga unit milik swasta dengan rasio rumah sakit terhadap satuan penduduk sebanyak 0,02 rumah sakit, artinya setiap 1.000 penduduk dapat dilayani oleh 0,02 rumah sakit.

Tabel 2.15
Jumlah Rumah Sakit Tahun 2012-2014 Kota Langsa

No.	Sarana dan Prasarana Kesehatan	2012	2013	2014
1	Rumah Sakit	3	4	4
	Pemerintah	1	1	1
	Swasta	2	3	3
2	Jumlah Penduduk	154.722	157.011	162.814
3	**Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk**	**0,02**	**0,03**	**0,02**

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.2.4. Rasio Dokter Terhadap Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainnya, misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan. Jumlah dokter di Kota Langsa dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2012 jumlah dokter baik spesialis dan dokter umum berjumlah 90 orang turun pada akhir tahun 2014 menjadi 69 orang dokter dengan rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk mencapai 0,43 orang dokter atau dengan kata lain setiap 1.000 penduduk dapat dilayani oleh 0,43 dokter.

Tabel 2.16
Jumlah Dokter Tahun 2012-2014 Kota Langsa

No.	Uraian	2012	2013	2014
1	Jumlah Dokter	90	89	69
2	Jumlah Penduduk	154.722	157.011	162.814
3	**Rasio Jumlah Dokter Terhadap Jumlah Penduduk**	**0,58**	**0,57**	**0,43**

Sumber : RSUD dan Dinkes Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.2.5. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Di Kota Langsa untuk rasio tenaga medis sebesar 2,26 pada tahun 2014, hal ini berarti setiap 1.000 penduduk di Kota Langsa dapat dilayani oleh 2,26 orang tenaga medis. Perkembangan

rasio tenaga medis persatuan penduduk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dapat di lihat dalam grafik di bawah ini :

Grafik 2.17
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

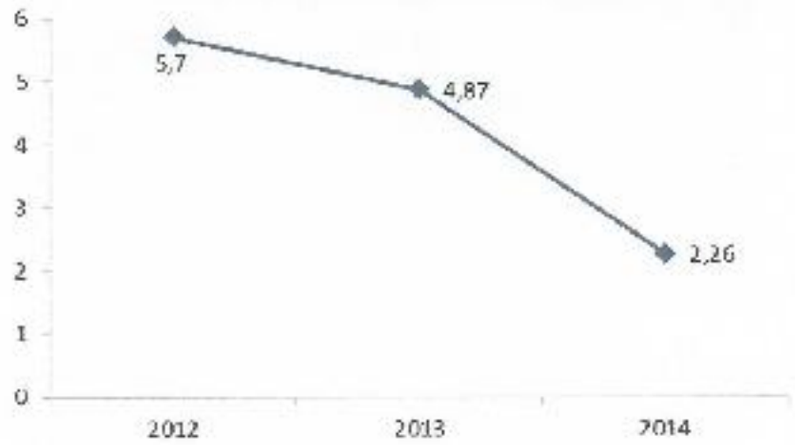

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

2.3.1.3.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan dalam kondisi baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis schingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Langsa pada tahun 2012 mencapai 0,80 atau sekitar 80% dari total panjang jalan kota. Namun, angka ini turun sebesar 0,1 menjadi 0,79 atau sekitar 79% dari total panjang jalan kota yang terbangun.

Tabel 2.17
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Tahun 2012-2013 Kota Langsa (km)

No.	Uraian	2012	2013
1	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	234	247
2	Panjang Jalan Keseluruhan	293	313
3	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**	**0,80**	**0,79**

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

Perkembangan panjang jalan di Kota Langsa berdasarkan status jalan serta jenis permukaan, kondisi dan kelas jalan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, dan Kelas Jalan Tahun 2012-2013 Kota Langsa (km)

Keadaan		Status Jalan					
		Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kota	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013
I	Jenis Permukaan	18,4	18,4	14,9	14,9	293,2	313,4
a	Diaspal	18,4	18,4	14,9	14,9	229,4	246,7
b	Penetrasi Macadam	-	-	-	-	-	-
c	Kerikil	-	-	-	-	24,82	27,26
d	Tanah	-	-	-	-	38,96	39,43
II	Kondisi Jalan	18,4	18,4	14,9	14,9	293,2	313,4
a	Baik	12,12	12,12	12,4	12,4	234,1	246,7
b	Sedang	6,28	6,28	1,4	1,4	29,15	27,26
c	Rusak Ringan	-	-	1,1	1,1	18,11	28,66
d	Rusak Berat	-	-	-	-	11,77	10,77
III	Kelas Jalan	18,4	18,4	14,9	14,9	293,2	313,4
a	Kelas I	-	-	-	-	-	-
b	Kelas II	-	-	-			-
c	Kelas III	18,4	18,4	14,9	14,9	-	-
d	Kelas III-A	-	-	-	-	-	-
e	Kelas III-B	-	-			293,2	313,4
f	Kelas III-C	-	-	-	-	-	-
g	Kelas Tidak Terperinci	-	-	-	-		

Sumber : BPS Kota Langsa, 2015

2.3.1.3.2. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Tempat ibadah dalam hal ini Masjid dan Meunasah, selain merupakan tempat yang digunakan oleh umat Islam untuk beribadah, Masjid dan Meunasah juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim serta kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, dan kajian keagamaan. Mengingat pentingnya keberadaan Masjid dan Meunasah, maka keberadaan sarana dan prasarana tempat ibadah tersebut sangat perlu untuk ditingkatkan. Jumlah tempat ibadah dalam hal ini Masjid dan Meunasah di Kota Langsa pada tahun 2012 adalah berjumlah 191 unit, angka ini meningkat hingga pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 337 unit. Sedangkan rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk adalah sebanyak 2,07 unit, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun

2012, namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013.

Tabel 2.19
Rasio Tempat Ibadah Tahun 2012-2013 Kota Langsa

No.	Uraian	2012	2013	2014
1	Jumlah Masjid dan Meunasah	191	337	337
2	Jumlah Penduduk	154.722	157.011	162.814
3	**Rasio**	**1,23**	**2,15**	**2,07**

Sumber : Dinas Syariat Islam dan BPS Kota Langsa, 2015

2.3.1.4. Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan.

2.3.1.4.1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Syarat-syarat air minum yang baik adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Pencapaian pada tahun 2014 menunjukkan persentase penduduk berakses air minum layak di Kota Langsa yang mencapai 96,17% atau sekitar 31.750 RT dari total 33.015 RT.

2.3.1.4.2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan sebagai sumber daya ekonomis yang paling utama yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan usaha. Di masa mendatang, kebutuhan listrik akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan dan perkembangan baik dari jumlah penduduk maupun jumlah investasi yang semakin meningkat yang dapat memunculkan berbagai industri-industri baru. Penggunaan listrik merupakan faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat, baik pada sektor rumah tangga, penerangan, komunikasi, industri dan sebagainya. Perkembangan rumah tangga dengan penerangan listrik di Kota Langsa dapat dikatakan

sudah sangat baik dimana hampir 100 persen rumah tangga di Kota Langsa sudah teraliri listrik.

Grafik 2.18
Perkembangan Persentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik Tahun 2011-2013 Kota Langsa (persen)

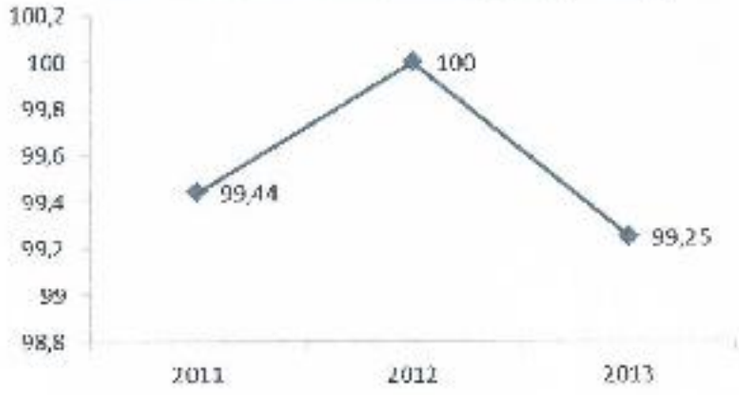

Sumber : BPS Kota Langsa, 2015

Dalam hal penggunaan listrik, gampong/desa di Kota Langsa pada tahun 2013 sudah teraliri listrik secara keseluruhan. Jumlah pelanggan listrik di Kota Langsa pada tahun 2013 mencapai 31.474 pelanggan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Langsa. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik bagi pelanggan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Langsa telah menyediakan mesin pembangkit listrik dengan kemampuan yang dihasilkan mencapai 80.106.228 kwh yang terletak di Kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Barat. Dengan keterbatasan produksi listrik yang hasilkan oleh PLN cabang Langsa, PLN mencoba menutup kekurangan kebutuhan listrik tersebut dengan mendatangkannya dari wilayah lain.

Tabel 2.20
Jumlah Desa Berlistrik dan Banyaknya Pelanggan dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2013

Kecamatan	Jumlah Desa Berlistrik	Jumlah Pelanggan
Langsa Timur	16	3.908
Langsa Lama	15	4.812
Langsa Barat	13	5.889
Langsa Baro	12	8.276
Langsa Kota	10	8.559
Jumlah	**66**	**31.474**

Sumber : BPS Kota Langsa (Langsa Dalam Angka Tahun 2014)

2.3.1.4.3. Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah tangga bersanitasi diasumsikan bahwa rumah tangga yang telah menggunakan fasilitas sanitasi secara layak antara lain meliputi: 1) pembuangan tinja (MCK); 2) pembuangan air limbah (SPAL); dan 3) pembuangan sampah. Perkembangan persentase rumah tangga bersanitasi di Kota Langsa sepanjang tahun 2012-2013 cenderung mengalami penurunan dari 88,42% RT menjadi 84,12% pada tahun 2014. Penurunan ini diakibatkan dari peningkatan jumlah rumah tangga yang tidak diikuti dengan peningkatan rumah tangga yang memiliki sanitasi.

Tabel 2.21
Perkembangan Rumah Tangga Bersanitasi
Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)

Uraian	2012	2013	2014
Rumah Tangga Bersanitasi	88,42	84,13	84,12

Sumber : LPPD Kota Langsa, 2015

2.3.1.4.4. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Di beberapa wilayah, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.

Tabel 2.22
Perkembangan Lingkungan Pemukiman Kumuh
Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)

Uraian	2012	2013	2014
Lingkungan Pemukiman Kumuh	15	10,19	0,35

Sumber : LPPD Kota Langsa, 2015

Perkembangan luas lingkungan pemukiman kumuh tahun 2012-2014 di Kota Langsa menunjukkan tren yang positif, dimana pada tahun 2012 persentase lingkungan pemukiman kumuh sebesar 15%, angka ini turun pada tahun 2013 menjadi 10,19% dan hingga tahun 2014 lingkungan kumuh di Kota Langsa hanya tersisa sebesar 0,35%.

2.3.1.4.5. Rumah Layak Huni

Secara umum rumah layak huni adalah rumah yang memiliki kecukupan minimal unsur ruang dan luas ruang serta kualitas bangunannya yang memenuhi standar teknis. Terkait dengan kebutuhan rumah layak huni, pemerintah Kota Langsa juga berusaha untuk terus menambah jumlah rumah dengan cara membangun dan melakukan rehab bagi para penduduk yang dikategorikan tidak mampu. Upaya ini sedikit banyaknya telah membuahkan hasil yang ditandai dengan meningkatnya persentase rumah layak huni pada tahun 2014 yaitu sebanyak 87,45 persen dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 85,22 persen.

Tabel 2.23
Perkembangan Rumah Layak Huni
Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen)

Uraian	2012	2013	2014
Rumah Layak Huni	85,22	87,09	87,45

Sumber : LPPD Kota Langsa, 2015

2.3.1.5. Penataan Ruang

Penataan ruang di Kota Langsa sepenuhnya mengacu pada RTRW Kota Langsa yang tercantum dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032. Tujuan penataan ruang di wilayah Kota Langsa berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Langsa;
2. Memberikan arahan bagi indikasi program utama dalam RTRW Kota Langsa;
3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Langsa.

Selanjutnya mengenai penetapan kawasan strategis Kota Langsa yang diatur dalam RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032 dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yaitu:

a) Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
   1. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi yaitu kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa atau *Central Bisnis Distric* (CBD) seluas 253,91 Ha;

2. Kawasan industri Alue Raya di Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur seluas 600,83 Ha;
3. Kawasan industri Buket Rata di Gampong Buket Rata Kecamatan Langsa Timur seluas 300 Ha;
4. Kawasan industri Timbang Langsa di Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro seluas 50 Ha;
5. Kawasan industri eks Kopalmas di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 115,52 Ha;
6. Kawasan industri sedang Alue Dua di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro seluas 56,92 Ha;
7. Kawasan industri penyangga di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat seluas 56,92 Ha;
8. Pelabuhan Kuala Langsa di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 13,00 Ha.

b) Kawasan strategis ditinjau dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, meliputi:
1. Kawasan pendidikan di Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama seluas 223,41 Ha; dan
2. Kawasan kesehatan di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro seluas 15,32 Ha.

2.3.1.5.1. Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota Langsa dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat yang ditanami tumbuhan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang luas minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus ada pada kawasan permukiman adalah sebesar 30%. Dari luas tersebut 20% diantaranya adalah RTH Publik dan sebesar 10% adalah untuk RTH privat. Pada tahun 2014, persentase ruang terbuka hijau per

satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kota Langsa adalah sebesar 74,41 persen.

2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

Salah satu keberhasilan urusan perencanaan pembangunan dapat ditinjau dari ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Langsa dapat berjalan sesuai seperti yang direncanakan. Dokumen perencanaan daerah yang ada di Kota Langsa antara lain sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana tertuang dalam Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dituangkan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2013-2032;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017;
4. Rencana Strategis SKPD yang tertuang di dalam Keputusan Walikota Langsa Nomor 188/050.12/2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012-2017;
5. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2016.

2.3.1.7. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kota Langsa, masih terbatas pada layanan transportasi darat dan transportasi laut, dengan fokus layanan adalah transportasi jalan.

Tabel 2.24
Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Uraian	2012	2013	2014
Terminal Bis	1	1	1
Pelabuhan Laut	1	1	1

Sumber : Dishubkominfo Kota Langsa, 2015

Di bidang transportasi jalan, tingginya penggunaan kendaraan pribadi di jalan mengindikasikan bahwa penggunaan angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Moda transportasi sehari-hari yang digunakan oleh penduduk Kota Langsa dalam berbagai kepentingan masyarakat baik ekonomi dan sosial terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kendaraan jenis bus, mikro bus, *pick up*, *truck*, dan *delivery van*.

Tabel 2.25
Jumlah Kendaraan Bermotor Angkutan Menurut Jenis
Tahun 2012-2013 Kota Langsa

Jenis Kendaraan	Jumlah		
	2011	2012	2013
Angkutan Pedesaan	10	50	12
Angkutan Perkotaan	40	-	53
Bus, Mikro Bus dan Sejenisnya	226	235	225
Pick Up, Truck, Delivery Van, Double Cabin, Dump Truck, Truck Tungki dan Sejenisnya	158	875	890

Sumber : BPS Kota Langsa (Langsa Dalam Angka Tahun 2014)

Sebagai kota yang berada tepat di sebelah Selat Malaka, Kota Langsa juga memiliki Pelabuhan Kuala Langsa. Aktivitas Pelabuhan Kuala Langsa selama ini meliputi bongkar muat kapal dari berbagai jenis pelayaran baik antar samudera, nusantara dan pelayaran lokal. Dari ketiga jenis pelayaran tersebut, aktivitas bongkar muat kapal di Pelabuhan Kuala Langsa dari jenis pelayaran nusantara masih mendominasi dibandingkan dengan pelayaran samudera dan lokal.

Tabel 2.26
Lalu Lintas Barang Dirinci Menurut Jenis Pelayaran
di Pelabuhan Kuala Langsa Tahun 2011-2013

Tahun	Jenis Pelayaran					
	Samudera		Nusantara		Lokal	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
2011	1.837	-	-	-	2.440	555
2012	2.102	29	1.750	990	-	341
2013	5.730	-	4.550	-	-	129

Sumber : BPS Kota Langsa (Langsa Dalam Angka Tahun 2014)

Meskipun Kota Langsa telah memiliki Pelabuhan Kuala Langsa, namun aktivitas kepelabuhanan belum seperti yang diharapkan. Situasi ini tidak terlepas dari permasalahan keterbatasan izin serta masalah kesiapan infrastruktur lainnya seperti sedimentasi alur pelayaran dan perpanjangan dermaga. Kedepan, seluruh aktivitas kepelabuhanan di Kota Langsa diharapkan agar mendapat dukungan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun propinsi baik dari segi infrastruktur maupun regulasi tentang kewenangan Pelabuhan Kuala Langsa.

2.3.1.8. Lingkungan Hidup

2.3.1.8.1. Penanganan Sampah

Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah melalui pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah membutuhkan perhatian khusus, hal ini dikarenakan kegagalan dalam pengelolaan sampah berimbas pada menurunnya kualitas kesehatan warga masyarakat, merusak estetika kota, dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi arus investor ke daerah. Tercatat selama periode 2012 - 2014, persentase penanganan sampah di Kota Langsa mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 persentase penanganan sampah sebesar 14%, tahun 2013 meningkat menjadi 15% dan hingga tahun 2014 persentase penanganan sampah di kota kembali meningkat secara signifikan mencapai 28%.

Tabel 2.27
Penanganan Sampah Tahun 2012-2014 Kota Langsa

No.	URAIAN	2012	2013	2014
1	Volume Sampah yang Tertangani (m3)	27	29	56
2	Volume Produksi Sampah (m3)	196	196	197
3	Penanganan Sampah (%)	14	15	28

Sumber : BLHKP Kota Langsa, Tahun 2015

Pembuangan sampah yang selama ini banyak dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menumpuk di tempat penampungan sementara dan selanjutnya tim kebersihan Kota Langsa akan mengambil secara rutin berdasarkan waktu waktu yang telah ditentukan. Bagi sebagian masyarakat yang berada jauh dari tempat pembuangan sementara, penanganan sampah biasanya dilakukan dengan cara membakar.

2.3.1.8.2. Penegakan Hukum Lingkungan

Kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat muncul setiap saat. Hal ini sebagai dampak dari aktitivitas manusia termasuk di dalamnya kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata serta kegiatan lainnya merupakan sumber pencemaran yang perlu dikendalikan sejak awal, karena tanpa ada langkah-langkah pencegahan akan menimbulkan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Penegakan kasus lingkungan yang diselesaikan oleh Pemerintah Kota Langsa dalam periode 2012-2014 sangat bervariasi, tercatat hanya pada tahun 2013 saja, Pemerintah Kota Langsa mampu menyelesaikan 100% kasus lingkungan dari tiga kasus yang ada.

Tabel 2.28
Perkembangan Penegakan Hukum Lingkungan
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Uraian	2012	2013	2014
Penegakan Hukum Lingkungan (%)	0	100	0

Sumber : LPPD Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.9. Pertanahan

Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Pemerintah Kota Langsa mempunyai sejumlah kewenangan dalam penyelenggaraan bidang pertanahan, hal ini sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan. Dalam pasal 2 ayat (2) kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pertanahan adalah 1) pemberian ijin lokasi, 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, 3) penyelesaian sengketa tanah garapan, 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat, 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, 8) pemberian ijin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Khusus tanah negara, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Langsa telah berhasil menyelesaikan kasus negara sebesar 100%. Angka ini meningkat secara signifikan dari tahun 2013 yang hanya sebesar

44,44%. Perkembangan luas lahan bersertifikat di Kota Langsa tahun 2013 dan 2014 cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012. Tahun 2012, luas lahan bersertifikat sebesar 90,08% turun menjadi 43,38% pada tahun 2013 namun kembali naik menjadi 67,36% pada tahun 2014. Terkait dengan perkembangan urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Perkembangan Urusan Pertanahan Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Uraian	2012	2013	2014
Luas Lahan Bersertifikat	90,08	43,38	67,36
Penyelesaian Kasus Tanah Negara	0	44,44	100
Penyelesaian Izin Lokasi	0	100	0

Sumber : LPPD Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Salah satu tujuan utama dari administrasi kependudukan adalah tersedianya dokumen kependudukan, yaitu sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Permasalahan utama urusan kependudukan dan catatan sipil adalah masalah administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pada tahun 2012, persentase kepemilikan KTP di Kota Langsa mencapai 74,4%. Angka ini turun menjadi 87,73% pada tahun 2013 dan hingga 2014 kembali turun menjadi 67,7%. Untuk lebih jelasnya, perkembangan pelayanan administrasi kependudukan periode 2012-2014 Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Perkembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Indikator	2012	2013	2014
Kepemilikan KTP (%)	74,4	87,73	67,7
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk (%)	24,63	2,35	49.51
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	sudah	sudah	sudah

Sumber : LPPD Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya pencapaian sasaran peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, dan peran perempuan dalam proses pembangunan. Kesetaraan gender, selain berdampak pada perempuan, secara tidak langsung juga berdampak pada anak. Adapun untuk mengetahui keberhasilan capaian indikator pemberdayaan perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun partisipasi angkatan kerja perempuan. Jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami stagnasi dari tahun 2012-2014, yaitu sebesar 67,51%.

Tabel 2.31
Perkembangan Partisipasi Perempuan
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

No.	Indikator	2012	2013	2014
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	67,51	67,51	67,51

Sumber : LPPD Kota Langsa, Tahun 2015

Jumlah kejadian KDRT di Kota Langsa pada tahun 2012 sebanyak 53 kasus. Kemudian pada tahun 2013 turun drastis menjadi 21 kasus dan hingga tahun 2014 kembali turun menjadi 14 kasus. Diharapkan di masa yang akan datang, selain adanya campur tangan Pemerintah Kota Langsa, diperlukan juga peran aktif masyarakat dalam upaya menekan seminimal mungkin jumlah kasus kekerasan dalan rumah tangga (KDRT), mengingat dampak dari KDRT akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga. Perkembangan terkait kondisi perlindungan perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Kondisi Perlindungan Perempuan dan Anak
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

No.	URAIAN	2012	2013	2014
1	Jumlah Kasus Kekerasan di Dalam RT	53	21	14
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	15	12	9
3	Jumlah Anak	46.530	46.753	47.120

Sumber : BKKB & PP Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Salah satu cara menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui pelaksanaan program KB. Tujuan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah untuk meningkatkan Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB Kota Langsa pada 2014 tercatat sebanyak 19.125 peserta meningkat dari tahun 2012 yang sebesar 18.915 peserta dengan rasio terhadap jumlah pasangan usia subur di tahun 2014 sebesar 79.

Tabel 2.33
Kondisi Perkembangan Rasio Akseptor KB
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

NO	URAIAN	2012	2013	2014
1	Jumlah Pengguna Akseptor KB	18.915	19.033	19.125
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	24.006	24.115	24.261
3	Rasio Akseptor KB	79	79	79

Sumber : BKKB & PP Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.13. Sosial

Pembangunan bidang sosial pada hakikatnya adalah pembangunan manusia yang sasarannya untuk menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis. Dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, pada pelaksanaannya senantiasa dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan yang semakin luas dan kompleks. Sangat disadari sejalan dengan berkembangnya kondisi sosial masyarakat Kota Langsa, maka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Langsa turut ikut berkembang pula.

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kota Langsa. Hingga saat ini di Kota Langsa terdapat empat panti asuhan. Terkait dengan PMKS, pada tahun 2014 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sebanyak 61,27%, sedangkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2014 adalah sebesar 37,20%, angka ini turun dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 40,89%.

Tabel 2.34
Jumlah Panti Asuhan dan PMKS yang Tertangani
Tahun 2013-2014 Kota Langsa

No.	Uraian	2013	2014
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	4	4
2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	8,67	61,27
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	40,89	37,20

Sumber : LPPD Kota Langsa, Tahun 2015

Beberapa penyebab maraknya jumlah PMKS di Kota Langsa antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi, juga faktor mobilitas penduduk/PMKS yang berasal dari luar daerah yang ingin mencari peruntungan di Kota Langsa. Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat diharapkan akan membuahkan hasil yang maksimal.

2.3.1.14. Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Menurut ILO *(International Labour Organization)*, penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu : (1) tenaga kerja dan (2) bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Tren perkembangan persentase jumlah pencari kerja di Kota Langsa periode 2012-2014 mengalami peningkatan meskipun di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 10,45%, namun hingga akhir tahun 2014 meningkat menjadi 43,41%. Terkait dengan kepesertaan jaminan sosial bagi buruh/pekerja,

tercatat pada tahun 2014 sebanyak 95,59 buruh/pekerja di Kota Langsa telah terlayani dalam jaminan sosial.

Tabel 2.35
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

No.	Indikator	2012	2013	2014
1	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	40,43	10,45	43,41
2	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh (%)	53,81	42,91	95,59

Sumber : LPPD Kota Langsa, 2015

2.3.1.15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Mempertahankan eksistensi Koperasi dan UKM merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi dan UKM yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Kontribusinya bagi perekonomian di tingkat daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Berikut disajikan perkembangan lembaga usaha kecil menengah dan koperasi yang berada diwilayah Kota Langsa tahun 2012-2014.

Tabel 2.36
Perkembangan Indikator Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

No.	Indikator	2012	2013	2014
1	Persentase Koperasi Aktif	55,42	34,37	9,88
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	87,1	100	99,4

Sumber : Diskoperindagkop Kota Langsa, Tahun 2015

Perkembangan jumlah koperasi aktif di Kota Langsa cenderung mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, dimana hingga akhir tahun 2014 jumlah koperasi yang aktif di Kota Langsa sebesar 9,88% atau sekitar 34 koperasi aktif dari 344 jumlah koperasi. Sedangkan persentase jumlah usaha mikro dan kecil selama periode 2012-2014 secara keseluruhan berada di atas 80%.

2.3.1.16. Kebudayaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah sarana prasarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Pelestarian budaya di Kota Langsa selama ini dilakukan dengan mengadakan berbagai penyelenggaraan festival seni dan budaya, meskipun intensitasnya tidak begitu tinggi namun kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Langsa.

Tabel 2.37
Perkembangan Aktivitas Seni Budaya
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

No.	Indikator	2012	2013	2014
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	0	6	6
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	3	3	3
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100		100

Sumber : Disporabudpar dan LPPD Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.17. Kepemudaan dan Olahraga

Kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda, menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda. Perkembangan terkait dengan bidang kepemudaan hingga saat ini terdapat 62 organisasi kepemudaan.

Untuk tetap menjaga prestasi dibidang kepemudaan dan olah raga, Pemerintah Kota Langsa melalui SKPK terkait berupaya tetap melakukan program peningkatan peran serta kepemudaan melalui kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan di wilayah Kota Langsa. Kegiatan ini tentu saja bertujuan untuk menjadikan pemuda-pemuda yang ada di Kota Langsa menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri.

Di bidang olah raga, Pemerintah Kota Langsa melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olah raga. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : 1) pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat; 2) pembinaan cabang olah raga prestasi; dan 3) penyelenggaraan kompetisi olah raga. Selain ketiga kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olah raga

tersebut, Pemerintah Kota Langsa juga mengadakan kegiatan peningkatan kesegaran jasmani bagi masyarakat. Beberapa kegiatan tersebut dilakukan dengan harapan akan meningkatnya prestasi olah raga bagi para atlit-atlit di berbagai cabang olah raga di Kota langsa.

Tabel 2.38
Perkembangan Sarana Prasarana Olah Raga
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

No.	Indikator	2012	2013	2014
1	Jumlah Klub Olah Raga	32	32	32
2	Jumlah Gedung Olah Raga	1	1	1

Sumber : Disporabudpar dan LPPD Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kota Langsa yang termasuk dalam daerah konflik di masa lalu tetap berupaya memberikan perhatian khusus terhadap urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri agar suasana damai seperti saat sekarang ini tetap dapat dipertahankan. Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kota Langsa diarahkan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta pencegahan tindak kriminal, meningkatkan wawasan kebangsaan dan persatuan kesatuan bangsa, meningkatkan upaya pemberantasan penyalahgunaan penyakit masyarakat (pekat), serta meningkatkan pendidikan politik dan demokrasi masyarakat. Kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

No.	Indikator	2012	2013	2014
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	1	1
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	2	1	1

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Langsa, Tahun 2015

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta pembinaan politik di Kota Langsa tetap dilaksanakan pada setiap tahunnya meskipun frekwensinya menurun jika dibandingkan dari tahun 2012.

2.3.1.19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.3.1.19.1. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ialah melalui penegakan peraturan daerah atau qanun yang telah disusun. Tujuan dari penegakan peraturan daerah atau qanun di Kota Langsa untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Tabel 2.40
Jumlah Polisi Pamong Praja, Personil Wilayatul Hisbah, Berbagai Pelanggaran dan Penyelesaian Ketertiban
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

No.	Indikator	2012	2013	2014
1	Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja	344	340	343
2	Jumlah Personil Wilayatul Hisbah	53	87	86
3	Jumlah Pos Kamling	66	66	66
4	Jumlah Desa	66	66	66
5	Jumlah Penduduk	154.722	157.011	162.814
6	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	22	22	21
7	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	1	1	1
8	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	101	95	105
9	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	112	100	162
10	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota (%)	90,18	95	64,81

Sumber : Kantor Satpol PP & WH Kota Langsa, Tahun 2015

Kapasitas Pemerintah Kota Langsa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat diperlihatkan dengan jumlah polisi Pamong Praja dan personil Wilayatul Hisbah, serta jumlah Poskamling dalam memberdayakan masyarakat disetiap gampong untuk ikut berperan aktif

dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Perkembangan rasio jumlah Polisi Pamong Praja terhadap 10.000 penduduk cenderung tidak berubah selama periode 2012-2014, meskipun pada tahun 2014 sedikit menurun menjadi 21 personil Polisi Pamong Praja terhadap 10.000 penduduk Kota Langsa. Sedangkan rasio jumlah Poskamling untuk setiap gampong adalah tetap tidak berubah, yakni setiap gampong di Kota Langsa telah memiliki 1 Poskamling.

Terkait dengan pelanggaran K3 selama tiga tahun terakhir, perkembangannya sangat berfluktuatif, dimana pada tahun 2012 yaitu sebanyak 112 tingkat pelanggaran dengan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sebesar 90,18%. Angka ini naik pada tahun 2013 menjadi 95% dan kemudian turun pada tahun 2014 menjadi 64,81%.

2.3.1.19.2. Pelaksanaan Syariat Islam

Upaya-upaya serius Pemerintah Kota Langsa dalam pelaksanaan syariat Islam tetap dilaksanakan, diantaranya diadakan serangkaian kegiatan baik yang bersifat reprentif maupun preventif seperti razia terhadap warga yang memakai pakaian di luar syariat Islam serta pembatasan hiburan musik organ tunggal "*keyboard*" pada waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, Pemerintah Kota Langsa khususnya bagi aparatur pemerintahan berdasarkan waktu-waktu tertentu melaksanakan kegiatan "safari shubuh dan maghrib" ke gampong-gampong dalam wilayah Kota Langsa. Khusus untuk "safari shubuh dan maghrib", kegiatan ini ditujukan selain untuk mendapatkan siraman rohani agama Islam juga sebagai ajang bagi Pemerintah Kota Langsa beserta jajarannya untuk menyerap aspirasi masyarakat baik yang berkaitan dengan permasalahan infrastruktur daerah maupun permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya.

Dalam hal pelanggaran syariat Islam, penegakan qanun yang dilakukan selama ini telah memberikan hasil yang positif dan nyata. Hal ini ditandai dengan menurunnya kasus pelanggaran dari 624 kasus di tahun 2012 turun menjadi 596 kasus pada tahun 2014. Hasil yang baik ini merupakan upaya keras Dinas Syariat Islam dan hasil razia

gabungan secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam, Kantor Satpol PP & WH serta dibantu oleh aparat keamanan yang berwenang.

Tabel 2.41
Jumlah Pelanggaran dan Penyelesaian Qanun Syariat Islam
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

No.	Indikator	2012	2013	2014
1	Jumlah Pelanggaran Qanun (Syariat Islam)	624	617	596
2	Jumlah Penyelesaian Penegak Qanun (Syariat Islam)	624	617	596

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Tahun 2015

Informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam di Kota Langsa adalah jumlah jama'ah haji yang berangkat ke tanah suci Makkah. Meskipun animo masyarakat Kota Langsa yang ingin berangkat ke tanah suci Makkah sangat tinggi namun jumlah jama'ah haji Kota Langsa periode tahun 2010-2014 cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 201 orang jama'ah pada tahun 2010 turun menjadi 158 orang jama'ah pada tahun 2014. Penurunan ini disebabkan penurunan jumlah kuota jama'ah haji untuk Kota Langsa dari pemerintah pusat.

Tabel 2.42
Jumlah Jama'ah Haji Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2010-2014 Kota Langsa

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2010	77	124	201
2011	70	98	168
2012	61	97	158
2013	64	92	156
2014	67	91	158

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.19.3. Aparatur Pemerintahan

Salah satu faktor penentu kinerja aparatur adalah tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur tersebut. Selain itu, tingkat pendidikan aparatur PNS juga merupakan faktor penunjang keberhasilan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kondisi saat ini, jumlah PNS di Kota Langsa pada tahun 2014 berjumlah 4.473 orang. Secara umum, tingkat pendidikan PNS di Kota Langsa sudah dapat dikatakan baik, hal ini tercermin dari jumlah PNS yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 2.393 orang atau sekitar 53,5 persen dari total PNS yang ada. Selain itu, dilihat dari komposisi gender, jumlah PNS perempuan di Kota Langsa lebih banyak

dari laki-laki yaitu sebanyak 1.602 orang atau sekitar 35,8 persen dari total PNS. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Langsa merupakan kota yang sangat responsif terhadap gender dimana kehadiran PNS perempuan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Langsa terutama dalam hal peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan.

Tabel 2.43
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
Tahun 2014 Kota Langsa

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	49	19	68
2	SLTP	34	18	52
3	SLTA	457	386	843
4	Diploma I	13	59	72
5	Diploma II	25	195	220
6	Diploma III	137	494	631
7	Diploma IV	21	12	33
8	S1	791	1.602	2.393
9	S2	111	50	161
10	S3	-	-	
Jumlah PNS		**1.638**	**2.835**	**4.473**

Sumber : BKPP Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.20. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Penyediaan pangan di Kota Langsa hingga saat ini masih terkendala oleh keterbatasan lahan, hal ini perlu dipahami pula bahwa Kota Langsa selama ini selalu mengandalkan sektor perdagangan dan jasa sebagai motor penggerak utama pembangunan di Kota Langsa.

Meskipun luas lahan arcal persawahan telah beralih fungsi, namun hingga saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 1.887 ha lahan persawahan yang tersebar di empat kecamatan di Kota Langsa. Hanya satu kecamatan di Kota Langsa yang tidak memiliki areal persawahan, yaitu Kecamatan Langsa Baro. Dari ke empat kecamatan tersebut, luas areal persawahan yang paling besar terdapat di Kecamatan Langsa Timur yaitu mencapai 78 persen dari seluruh total

areal persawahan, dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Langsa Kota yakni hanya tersisa sekitar tiga persen lagi dari total areal sawah keseluruhan di Kota Langsa.

Grafik 2.19
Persentase Distribusi Luas Areal Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kota Langsa (persen)

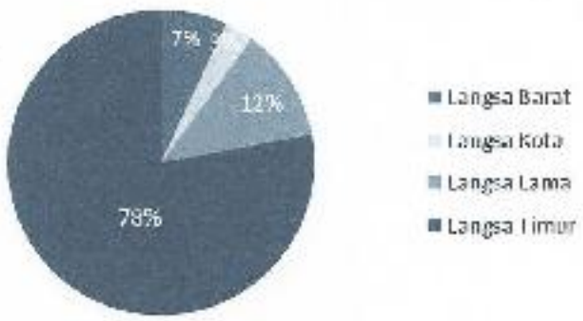

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2014

Pemerintah Kota Langsa melalui instansi terkait telah juga ikut berupaya menjaga ketahanan pangan melalui melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif, intensifikasi lahan, serta menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Tabel 2.44
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Tanaman Padi dan Palawija Tahun 2013 Kota Langsa

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi	3.199	3.317	13.579
2	Jagung	3	2	7
3	Ubi Kayu	7	7	140

Sumber : BPS Kota Langsa (Langsa Dalam Angka Tahun 2014)

Di wilayah bagian timur Kota Langsa, merupakan daerah pertanian dan memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Pada tahun 2013 beberapa komoditi yang ditanam oleh masyarakat adalah tanaman padi yang ditanam pada luas lahan 3.199 hektar dengan jumlah produksi mencapai 13.579 ton, kemudian jagung ditanam pada luas lahan 3 hektar dengan jumlah produksi mencapai 7 ton, serta ubi kayu ditanam pada luas lahan 7 hektar dan jumlah produksi mencapai 140 ton.

Selain tanaman padi dan palawija, masyarakat Kota Langsa juga ikut membudidayakan tanaman sayur-sayuran dengan tujuan ekonomi maupun untuk konsumsi sendiri. Tanaman sayur-sayuran yang banyak

ditanam oleh masyarakat adalah cabe, kacang panjang, mentimun, terung, tomat dan kangkung. Tanaman buah-buahan juga banyak dikembangkan di Kota Langsa, antara lain rambutan, pisang, nenas, pepaya, mangga, jeruk, manggis, sawo, duku/langsat, durian, jambu, dan nangka/cempedak.

Di sektor peternakan khususnya ternak besar, populasi ternak sapi di Kota Langsa lebih banyak dibandingkan dengan ternak kerbau yaitu sebanyak 5.487 ekor. Kecamatan yang paling banyak mengembangkan ternak sapi adalah Kecamatan Langsa Lama yaitu mencapai 1.687 ekor. Untuk ternak kecil, antara lain kambing memiliki populasi terbanyak dibanding domba yang mencapai 5.044 ekor dan paling banyak dipelihara oleh masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Langsa Barat yaitu mencapai 1.647 ekor. Selain itu, ternak unggas juga ikut dipelihara oleh penduduk Kota Langsa dengan alasan ekonomi serta untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Tercatat hingga tahun 2013, populasi ayam buras masih sangat mendominasi dibandingkan dengan ayam ras dan itik yakni mencapai 552.277 ekor dengan Langsa Baro sebagai wilayah yang paling banyak memelihara unggas tersebut yaitu mencapai 191.255 ekor.

Tabel 2.45
Jumlah Populasi Ternak Besar, Ternak kecil dan Unggas
Tahun 2013 Kota Langsa

Kecamatan	Ternak Besar		Ternak Kecil		Unggas		
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik
Langsa Timur	1.448	90	821	194	119.522	78.000	6.820
Langsa Lama	1.687	48	766	330	117.000	195.000	13.650
Langsa Barat	438	-	1.647	153	94.500	19.000	3.120
Langsa Baro	1.706	6	1.520	137	191.255	75.000	3.290
Langsa Kota	208	11	290	15	30.500	5.000	1.500
Jumlah	**5.487**	**155**	**5.044**	**829**	**552.277**	**372.000**	**28.380**

Sumber : BPS Kota Langsa (Langsa Dalam Angka Tahun 2014)

2.3.1.21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana masyarakat berinisiatif memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dengan asusmsi bahwa pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi dalam proses tersebut. Usaha tersebut hanya akan berhasil apabila kelompok

komunitas atau masyarakat menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah masyarakat tersebut.

Tabel 2.46
Perkembangan Jumlah Lembaga & Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012- 2014 Kota Langsa

Indikator	2012	2013	2014
Jumlah PKK Aktif	77	66	72
Jumlah PKK	77	66	72
PKK aktif (%)	100	100	100
Jumlah Posyandu Aktif	112	118	117
Jumlah Posyandu	112	118	117
Posyandu Aktif (%)	100	100	100
Jumlah Kelompok Binaan LPM	-	2	-
Jumlah LPM	3	1	-

Sumber : BPM dan LPPD Kota Langsa, Tahun 2015

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, sedangkan kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah gampong atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Di Kota Langsa, hingga tahun 2013 hanya terdapat satu organisasi LPM dengan dua kelompok binaannya.

Terkait dengan PKK, jumlah PKK yang ada di Kota Langsa hingga tahun 2014 berjumlah 72 PKK dengan status seluruhnya adalah aktif atau dengan kata lain 100% PKK di Kota Langsa berstatus aktif. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Indikator lainnya yang perlu diperhatikan adalah keberadaan Posyandu yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini, hal ini dikarenakan didalam Posyandu diberikan

layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak sejak usia dini. Meskipun jumlah Posyandu di Kota Langsa dalam periode 2012-2013 jumlahnya naik turun, namun keseluruhan Posyandu atau 100% Posyandu di Kota Langsa selalu aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya ibu dan anak.

Dalam rangka menjaga agar pemberdayaan masyarakat di Kota Langsa tetap berjalan dengan baik, Pemerintah Kota Langsa tetap berupaya terus melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat seperti : (1) program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; (2) program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; dan (3) program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

2.3.1.22. Statistik

Salah satu urusan wajib yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah urusan statistik. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang dimaksud dengan statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan statistik. Statistik penting artinya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan. Hal tersebut mendasari perlu diselenggarakan kegiatan statistik daerah yang bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Data statistik yang selama ini tersedia di Kota Langsa adalah (1) Kota Langsa Dalam Angka dengan jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan; (2) PDRB Kota Langsa yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Langsa; dan (3) IPM Kota Langsa yang memberikan informasi dengan derajat pendapatan per kapita masyarakat, usia harapan hidup penduduk, serta angka melek huruf masyarakat Kota Langsa.

2.3.1.23. Kearsipan

Fungsi kearsipan adalah menyimpan, memelihara, menyelamatkan, dan mengaktualisasikan kembali arsip kepada publik/masyarakat. Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan secara baku. Mengelola arsip diperlukan teknik/cara mengelola arsip yang baik, benar dan terpadu. Hal ini bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan arsip. Sebagai tindak lanjut dari pentingnya pengelolaan arsip, Pemerintah Kota Langsa selama ini selalu melaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan kegiatan antara lain mengadakan sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta. Dengan kegiatan ini diharapkan agar pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Langsa agar dapat lebih baik lagi sehingga seluruh dokumen arsip akan menjadi informasi penting bagi generasi masa yang akan datang.

Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Kearsipan
Tahun 2012- 2014 Kota Langsa

Indikator	2012	2013	2014
Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	21,21	20,59	17,5
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	-	5	1

Sumber : LPPD Kota Langsa, Tahun 2015

Berdasarkan data yang ada, perkembangan indikator kearsipan yakni persentase pengelolaan arsip secara baku selama periode 2012-2014 mengalami penurunan dari 21,21% menjadi 17,5%. Selanjutnya, jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2014 sebanyak 1 kegiatan, lebih rendah dari tahun 2013 yang mencapai 5 kegiatan.

2.3.1.24. Komunikasi dan Informatika

Telekomunikasi sangat bermanfaat untuk mempersingkat jarak dan waktu antar wilayah sehingga informasi dapat disampaikan secara cepat. Manfaat penerapan teknologi informasi antara lain dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk

menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan dapat dijadikan sebagai informasi yang strategis pengambilan keputusan.

Salah satu media penerapan teknologi informasi adalah *website*. Selama ini *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Saat ini, Pemerintah Kota Langsa telah menyediakan *website* resmi, yang dapat diakses oleh masyarakat luas melalui http://www.langsakota.go.id, ragam informasi terkait Kota Langsa dapat secara mudah diakses oleh siapapun juga. Selain media informasi, jumlah pameran/expo yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Langsa dalam 3 tahun mengalami penurunan dari 3 kali pada tahun 2012 menjadi 1 kali pada tahun 2014.

Tabel 2.48
Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika
Tahun 2012- 2014 Kota Langsa

Indikator	2012	2013	2014
Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada
Pameran/expo	3	2	1

Sumber : LPPD Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.1.25. Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, sebagai penunjang kelangsungan pendidikan, serta sebagai sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Semakin banyaknya jumlah sarana dan prasarana kepustakaan maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Di Kota Langsa hingga saat ini terdapat satu unit perpustakaan daerah dengan jumlah koleksi buku mencapai 8.096 judul buku pada tahun 2014, dengan jumlah pengunjung mencapai 13.721 orang. Selain itu juga terdapat tiga unit mobil perpustakaan keliling yang siap melayani masyarakat hingga ke pelosok-pelosok kota.

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Kepustakaan Tahun 2012- 2014 Kota Langsa

Uraian	2012	2013	2014
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 Tahun	7.728	7.728	13.721
Jumlah Orang Dalam Populasi yang Harus Dilayani	109.056	109.056	143.928
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	7,09	7,09	9,4
Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	4.836	15.000	8.096
Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	21.344	21.344	24.641
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	22.66	70,7	32,86

Sumber : LPPD Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian

Meskipun sektor pertanian bukan merupakan sektor yang strategis bagi Kota Langsa, namun sektor pertanian memegang peranan penting yaitu sebagai sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja pada wilayah perdesaan, dan juga pemberi input bagi sektor industri.

Tabel 2.50
Perkembangan Produktivitas Padi Tahun 2013-2014 Kota Langsa

Indikator	2013	2014
Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lainnya (ton)	691	11.319
Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	1.925	1.923
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	0,35896	5,88611

Sumber : LPPD Kota Langsa, Tahun 2015

Sebagai akibat kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, telah terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, sehingga kontribusi sektor pertanian Kota Langsa cenderung mengalami penurunan. Alih fungsi lahan tersebut lebih banyak terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi. Berdasarkan PDRB ADHB, kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian menurun dari 5,67 persen tahun 2010 menjadi 5,18 persen pada tahun 2014.

Grafik 2.20
Konstribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 Kota Langsa (persen)



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.2.2. Kehutanan

Secara umum kegiatan urusan kehutanan di Kota Langsa ditujukan untuk melestarikan kawasan hutan mangrove dan hutan lindung darat serta melakukan penghijauan lingkungan agar masyarakat dapat mengambil manfaat dari kegiatan tersebut. Perkembangan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kota Langsa mengalami penurunan pada kurun waktu tahun 2010-2014, dimana kontribusi sektor kehutanan dan penebangan kayu mengalami penurunan dari 0,28 persen menjadi 0,24 persen terhadap PDRB ADHB.

Grafik 2.21
Kontribusi Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 Kota Langsa (persen)



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB ADHB periode 2010-2014 cenderung mengalami penurunan dari 0,61 persen menjadi 0,54 persen. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ketersediaan lahan penambangan khususnya galian di Kota Langsa sangat terbatas.

Grafik 2.22
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 Kota Langsa (persen)



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.2.4. Pariwisata

Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam rangka usaha memperbesar pendapatan asli daerah, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah perlu digalakkan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Perkembangan pariwisata di Kota Langsa dapat ditinjau dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor ini terus mengalami peningkatan selama periode 2010-2014, dimana kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB ADHB pada tahun 2010 adalah sebesar 1,93 persen dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2,05 persen.

Grafik 2.23
Kontribusi Sektor Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 Kota Langsa (persen)



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

Letak geografis Kota Langsa yang berada tepat bersebelahan dengan Selat Malaka, telah menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor utama penggerak ekonomi masyarakat. Meskipun sebagai salah satu sektor unggulan, namun kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya produktivitas lahan tambak dimana sebagian besar lahan pertambakan beralih fungsi menjadi lahan pemukiman penduduk. Penurunan produktivitas sektor perikanan dapat ditinjau dari penurunan sektor perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Langsa tahun 2010-2014, dimana dari 3,9 persen pada tahun 2010 turun menjadi 3,42 persen di tahun 2014.

Grafik 2.24
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 Kota Langsa (persen)



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.2.6. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Langsa dan terus menunjukkan tren perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Langsa, dimana pada tahun 2010 kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil, dan sepeda motor terhadap PDRB ADHB adalah sebesar 28,34 persen, naik menjadi 29,62 persen pada tahun 2014.

Grafik 2.25
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 Kota Langsa (persen)

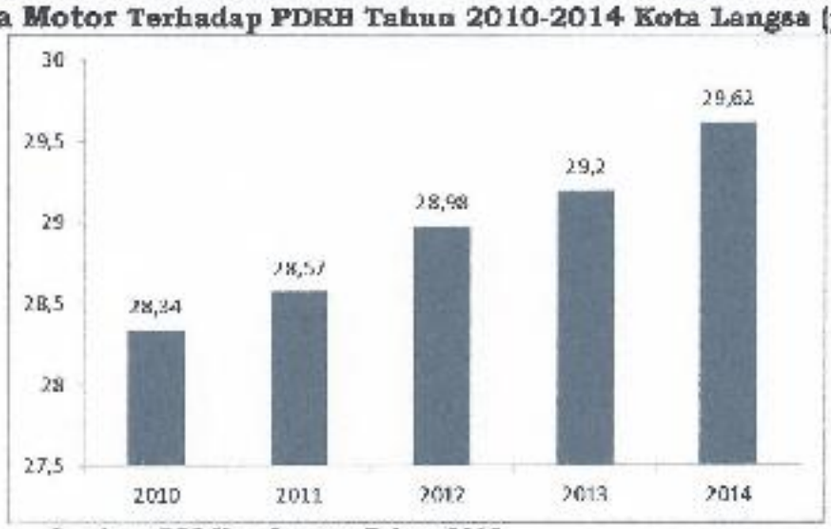

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.3.2.7. Perindustrian

Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kota Langsa. Meskipun memberikan kontribusi yang besar, namun perkembangan kontribusi sektor perindustrian khususnya industri pengolahan terhadap PDRB ADHB selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan naik turun. Pada tahun 2010 kontribusi sektor industri sebesar 9,81 persen dan sempat mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan tahun 2012, kemudian terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 menjadi 9,75 persen. Dengan dukungan sumber daya manusia dan keberagaman budaya lokal, ke depan industri pengolahan ini diprediksi akan kembali berkembang mengingat posisi strategis Kota Langsa di jalur utama sumatera dan pintu gerbang provinsi Aceh dinilai memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kota kreatif.

Grafik 2.26
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Tahun 2010-2014 Kota Langsa



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.4.1.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi semua pengeluaran barang dan jasa (baik barang tahan lama maupun barang tidak tahan lama) dikurangi hasil penjualan netto (penjualan dikurangi pembelian) barang-barang bekas dan barang-barang tak terpakai yang diakui oleh suatu rumah tangga selama satu tahun. Selain pengeluaran untuk barang tahan lama dan barang tak tahan lama, termasuk juga barang yang tidak diproduksi kembali seperti karya seni, barang antik dan lain-lain. Pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening listrik, air, telepon dan lain-lain, juga merupakan konsumsi rumah tangga.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Grafik 2.27
Nilai Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Langsa ADHB
Tahun 2010-2014 Kota Langsa (juta rupiah)



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015 (diolah)

Selama periode 2010-2014, nilai konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita Kota Langsa cenderung mengalami kenaikan. Nilai konsumsi RT per kapita Kota Langsa tahun 2010 sebesar 12,6 juta rupiah meningkat menjadi 15,5 juta rupiah tahun 2014.

2.4.1.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2.51
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)
Tahun 2012-2014 Provinsi Aceh

No.	Uraian	2012	2013	2014
1	Indeks Yang Diterima Petani (LT)	137,16	141,46	110,81
2	Indeks Yang Dibayar Petani (LB)	131,71	137,13	115,87
3	NTP	101,14	103,16	95,64

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

Nilai tukar petani di Provinsi Aceh sempat mengalami kenaikan pada tahun 2013 yang mencapai 103,16 persen dari tahun 101,14 persen pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 NTP di Provinsi Aceh kembali turun pada angka 95,64 persen.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

2.4.2.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan selama periode 2011-2013 mengalami peningkatan dari 0,0092 pada tahun 2011 menjadi 0,0095 pada akhir tahun 2013.

Tabel 2.52
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2011-2013 Kota Langsa

No.	Uraian	2011	2012	2013
1.	Panjang Jalan (km)	279,84	293,17	313,37
2.	Jumlah Kendaraan (unit)	30.270	30.970	32.896
3.	Rasio	0,0092	0,0094	0,0095

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015 (diolah)

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan perkembangan penduduk maka semakin banyak diperlukan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik untuk melancarkan arus lalu lintas dengan aman, nyaman dan efisien baik dari segi waktu maupun biaya.

Sampai dengan saat ini, Kota Langsa telah memiliki satu terminal bis angkutan umum, dua gudang penyimpanan barang, dan satu pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Kuala Langsa. Keberadaan sarana prasarana transportasi di Kota Langsa tersebut diharapkan mampu menggerakkan dinamika pembangunan terutama di bidang ekonomi sehingga tercapai tingkat perekonomian daerah yang tinggi yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

2.4.3. Penataan Ruang

Dalam periode jangka panjang, Kota Langsa dipastikan akan menghadapi persoalan terbatasnya sumber daya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan perkotaan (*urban*). Kecenderungan aktivitas ekonomi yang terus berkembang dan meningkat setiap tahunnya membutuhkan sumber daya lahan yang diperuntukkan dalam mendukung pengembangan infrastruktur Kota Langsa, kawasan permukiman perkotaan, maupun berbagai fasilitas sosial-ekonomi lainnya yang dibutuhkan warga kota.

Tabel 2.53
Pola Ruang Eksisting Kota Langsa

No.	Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan	5.346,80	22,34
2	Industri	57,27	0,24
3	Pelabuhan	30,26	0,13
4	Pemukiman	2.546,83	10,64
5	Perkebunan	9.017,64	37,67
6	Pusat Perdagangan	215,58	0,90
7	Rumah Sakit	4,97	0,02
8	Sawah	1.243,08	5,19
9	Sungai	2.162,24	9,03
10	Tambak	3.278,72	13,70
11	TPA	16,18	0,07
12	Pemakaman	15,90	0,07
13	Waduk	2,70	0,01
14	Pertahanan dan Keamanan	3,87	0,02
15	Fasilitas Olah Raga	40,92	0,17
	Grand Total	**23.962,94**	**100**

Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Berdasarkan data kondisi terakhir, diketahui bahwa pola ruang di Kota Langsa paling dominan peruntukkannya adalah untuk kawasan perkebunan (37,67 persen), disusul kemudian untuk kawasan hutan (22,34 persen), tambak (13,70 persen), dan pemukiman (10,64 persen).

2.4.4. Lembaga Keuangan

Keberadaan lembaga keuangan bank dan non bank sangat penting dalam rangka penunjang aspek daya saing daerah. Kehadiran lembaga keuangan tersebut, diharapkan agar segala urusan yang berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank dan non bank salah

satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabang-cabangnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada tahun 2013, jumlah bank umum di Kota Langsa 11 unit, terdiri dari 7 unit bank umum konvensional dengan 19 kantor bank dan 4 unit bank umum syariah dengan 7 unit kantor bank.

Tabel 2.54
Jumlah Bank dan Kantor Tahun 2013 Bank Kota Langsa

Jenis Bank	Banyaknya	
	Bank	Kantor Bank
Bank Umum	**11**	**26**
- Bank Umum-Konvensional	**7**	**19**
Bank Pemerintah	3	13
Bank Swasta Nasional	1	5
Bank Pemerintah Daerah	1	1
- Bank Umum-Syariah	**4**	**7**
Kantor Cabang	2	5
Kantor Cabang Pembantu	2	2
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	**2**	**2**
Kantor Pusat	2	2
Jumlah 2013	**13**	**28**

Sumber : BPS Kota Langsa (Langsa Dalam Angka Tahun 2014)

Selain bank umum, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Jumlah BPR di Kota Langsa pada tahun 2013 adalah sebanyak 2 bank dan 2 kantor bank, kesemuanya merupakan BPR Syariah. BPR memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin

banyak jumlah BPR, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil di Kota Langsa dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomiannya.

2.4.5. Ketersediaan Penginapan/Hotel

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah, maka akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah maka perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Hingga tahun 2013 di Kota Langsa terdapat 17 hotel/penginapan, jumlah ini meningkat satu unit dibandingkan tahun 2012.

Tabel 2.55
Jumlah Kamar dan Tempat Tidur pada Akomodasi
Tahun 2013 Kota Langsa

No.	Nama Akomodasi	Jumlah Kamar	Tempat Tidur
1	Hotel Harmoni	90	144
2	Hotel Kartika	62	118
3	Losmen Pase	20	40
4	Perla Inn	32	60
5	Losmen Diah	18	35
6	Losmen Haiva	11	22
7	Losmen Rizana	9	19
8	Hotel Rahmat Thalita	14	26
9	Hotel Training Kartini	12	27
10	Losmen Anggrek	16	20
11	Losmen Pillar	22	48
12	Losmen Ramille	16	32
13	Hotel Firdaus	20	24
14	Losmen Ridho	14	26
15	Losmen Nabila	10	12
16	Wisma Mutiara	18	23
17	Grace Hotel	12	23

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

Tingkat hunian kamar di hotel berbintang lebih tinggi dari jenis akomodasi lainnya yaitu sebesar 46,58% dengan tingkat pemakaian tempat tidur sebesar 36,47%. Jumlah tamu asing yang menginap di

hotel/akomodasi lainnya adalah sebanyak 24 orang sedangkan tamu dalam negeri sebanyak 39.685 orang.

Tabel 2.56
Indikator Hotel dan Akomodasi Penginapan
Tahun 2013 Kota Langsa

Uraian	Hotel Bintang	Akomodasi Lainnya
Tingkat Hunian Kamar (%)	46,58	41,51
Tingkat Pemakaian Tempat Tidur (%)	36,47	47,75
Rata-rata Lama Menginap Tamu (hari)	1,98	1,86
Jumlah Tamu Asing (orang)	6	18
Jumlah Tamu Dalam Negeri (orang)	11.690	27.995

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015

2.4.6. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Dalam rangka mempermudah investasi, Pemerintah Kota Langsa terus berupaya untuk mempercepat proses perizinan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata lama proses perizinan di Kota Langsa selama periode 2012-2014 adalah selama 7 hari.

Tabel 2.57
Perkembangan Indikator Pelayanan Perizinan
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Indikator	2012	2013	2014
Rata-rata Lama Proses Perizinan	7	7	7
Ketersediaan SOP Pelayanan	ada	ada	ada

Sumber : KPPT Kota Langsa, Tahun 2015

2.4.7. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Sumberdaya manusia yang tangguh dan unggul akan menjadi modal bagi suatu

wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik pula kualitas SDM di wilayah tersebut. Kualitas SDM pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk di Kota Langsa periode 2013-2014 mengalami penurunan dari 673 lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk menjadi 667 lulusan di tahun 2014.

Tabel 2.58
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Tahun 2012-2014 Kota Langsa

Indikator	2012	2013	2014
Lulusan S1/S2/S3	10.172	10.563	10.868
Penduduk	154.722	157.011	162.814
Rasio Lulusan S1/S2/S3	**667**	**673**	**667**

Sumber : BPS & Disdukcapil, Tahun 2015 (diolah)

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Disadari bahwa kebutuhan pembangunan semakin meningkat, mendesak, tidak terbatas serta semakin komplek. Di sisi lain, kemampuan pemerintah relatif sangat terbatas, terutama keterbatasan di bidang keuangan. Sedangkan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, membutuhkan anggaran biaya yang semakin besar pula. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dengan dana yang terbatas, diperlukan perencanaan dan kebijakan yang tepat, termasuk kebijakan anggaran yang tepat dan terarah. Untuk itu, diperlukan alokasi anggaran dengan prinsip ekonomis yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahunnya. Besar kecilnya anggaran yang dialokasikan sangat tergantung pada besaran manfaat yang diharapkan, selain ditentukan oleh kemampuan kota itu sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ayat (1), Pasal 17 menyebutkan bahwa APBD (APBK) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dengan demikian, dalam penyusunannya, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan arahan undang-undang tersebut, dapat dipahami bahwa diperlukan suatu kebijakan yang tepat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBK, sehingga alokasi anggaran untuk setiap kegiatan lebih terarah, efektif dan efisien. Adapun kebijakan yang dimaksudkan adalah sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip tertentu untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang harus dibuat, disusun dan dilaksanakan secara benar dan konsisten dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Langsa, mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa.

Kemudian Pemerintah Kota Langsa bersama DPRK Langsa melaksanakan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing SKPK disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (kinerja) yang dicapai. Sebagaimana diketahui, bahwa sejak tahun 2001, pemerintah telah menetapkan kebijakan anggaran dengan menganut sistim anggaran berbasis kinerja *(performance budget)* yang memuat prinsip anggaran surplus/defisit. Sistim anggaran ini menggunakan model vertikal dengan struktur yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

Kebijakan pendapatan daerah sejak lima tahun yang lalu, mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan pasal dan ayat tersebut di atas, Pemerintah Kota Langsa memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah;
2) Dana Perimbangan;
3) Dana Otonomi Khusus; dan
4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasal 180 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, menjelaskan bahwa sumber PAD terdiri atas : 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Milik dan Hasil Penyertaan Modal; 4) Zakat; dan 5) Lain-lain PAD yang Sah. Selain itu, dana perimbangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 181, bersumber dari : 1) Dana Bagi Hasil Pajak; 2) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Hidrokarbon dan Sumberdaya Alam Lain; 3) Dana Alokasi Umum (DAU); dan 4) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Di sisi lain, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas : 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 3) Pajak Penghasilan (PPh). Hasil yang bersumber dari sumberdaya alam berasal dari : 1) Kehutanan; 2)

Pertambangan; 3) Perikanan; 4) Pertambangan Minyak Bumi; 5) Pertambangan Gas Bumi; dan 6) Pertambangan Panas Bumi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara rinci tentang kinerja pendapatan daerah Kota Langsa tahun 2012-2015 adalah seperti digambarkan dalam tabel 3-1. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan daerah terus meningkat setiap tahunnya, kendatipun ada beberapa jenis sumber pendapatan yang tumbuh meningkat, menurun dan ada yang meningkat tajam.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015 (Rupiah)

NO	URAIAN			2012*	2013*	2014*	2015
1.	**PENDAPATAN DAERAH**			**470.985.346.660,08**	**568.604.409.638,87**	**751.849.914.120,00**	**818.157.958.122,00**
	1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**		**35.464.721.911,08**	**64.236.271.011,87**	**105.021.202.287,00**	**114.529.994.341,00**
		1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.222.137.932,00	5.729.914.000,00	7.494.319.000,00	9.550.000.000,00
		1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	29.119.647.916,00	8.600.083.229,00	13.718.522.158,00	5.405.424.740,00
		1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	300.000.000,00	413.617.460,00	391.835.870,00	518.845.242,00
		1.1.4.	Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	-	-	1.400.000.000,00	2.191.549.393,00
		1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	822.936.063,08	49.492.656.322,87	82.016.525.259,00	96.864.174.966,00
	1.2.	**DANA PERIMBANGAN**		**394.244.876.058,00**	**448.922.034.879,00**	**477.056.552.547,00**	**515.118.393.509,00**
		1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.302.917.058,00	32.760.222.879,00	24.934.217.547,00	25.295.675.509,00
		1.2.2.	Dana Alokasi Umum	337.337.339.000,00	381.240.982.000,00	419.767.005.000,00	425.446.753.000,00
		1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	23.604.620.000,00	29.920.830.000,00	32.355.330.000,00	64.375.965.000,00
	1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**		**41.275.748.691,00**	**60.446.103.748,00**	**169.772.159.286,00**	**188.509.570.272,00**
		1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
		1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.603.058.459,00	12.885.625.748,00	17.135.561.925,00	17.135.561.925,00
		1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.738.477.000,00	47.560.478.000,00	70.820.311.000,00	89.447.393.000,00
		1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	934.213.232,00	-	81.816.286.361,00	81.926.615.347,00

Sumber : APBK Langsa (diolah)

**) setelah perubahan*

Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah selama empat tahun yang lalu, rata-rata masih didominasi oleh dana perimbangan, teristimewa dari jenis Dana Alokasi Umum (DAU). Ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah masih sangat tergantung pada peranan pusat melalui dana perimbangan.

Tabel 3.2
Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah
Tahun 2012-2015 (Persen)

NO	URAIAN			2012*	2013*	2014*	2015
1.	**PENDAPATAN DAERAH**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**		**7,53**	**11,30**	**13,97**	**14,00**
		1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1,11	1,01	1,00	1,17
		1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	6,18	1,51	1,82	0,66
		1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	0,06	0,07	0,05	0,06
		1.1.4.	Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	-	-	0,19	0,27
		1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,17	8,70	10,91	11,84
	1.2.	**DANA PERIMBANGAN**		**83,71**	**78,07**	**63,45**	**62,96**
		1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	7,07	5,76	3,32	3,09
		1.2.2.	Dana Alokasi Umum	71,62	67,05	55,83	52,00
		1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	5,01	5,26	4,30	7,87
	1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**		**8,76**	**10,63**	**22,58**	**23,04**
		1.3.1.	Pendapatan Hibah				
		1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1,40	2,27	2,28	2,09
		1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,16	8,36	9,42	10,93
		1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,20	-	10,88	10,01

Sumber : Tabel 3-1 (diolah)

**) setelah perubahan*

Besarnya ketergantungan ini, salah satunya dikarenakan oleh belum maksimalnya perolehan PAD selama ini. Ini terlihat dari PAD selama tahun 2012 hingga tahun 2015, tidak sampai dari 15 persen setiap tahunnya. Sementara dana perimbangan berperan di atas 60 hingga 80 persen lebih setiap tahun anggaran, dengan jumlah terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Tercatat bahwa PAD berkontribusi meningkat sejak tahun 2012 hingga 2015. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah relatif

memperlihatkan tren positif dari 8,76 persen ditahun 2012 menjadi 23,04 persen tahun 2015. Lebih rinci perlu dipahami bahwa meningkatnya lain-lain pendapatan daerah yang sah ternyata lebih banyak disumbang dari dana penyesuaian dan otonomi khusus, dari 7,16 persen tahun 2012 menjadi 10,93 persen di tahun 2015. Sebagaimana ditunjukkan oleh grafik 3.1 pertumbuhan dana perimbangan sejak tahun 2012 hingga 2015 cenderung menurun walaupun masih relatif tinggi.

Grafik 3.1
Perkembangan Sumber Pendapatan Daerah
Tahun 2012-2015 (Persen)



Sumber : *APBK Lunyan (diolah).*

3.1.2 Derajat Kemandirian Daerah

Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana sejumlah dana yang tersedia dapat dibagi di berbagai tingkat pemerintahan, dan bagaimana mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk mendukung kegiatan-kegiatan di sektor publik. Pada dasarnya, realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai oleh dominannya peranan bantuan dan sumbangan. Kondisi ini muncul karena terbatasnya kemampuan daerah dalam menggali sumber PAD. Hal ini mempunyai implikasi langsung terhadap kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang bermaksud untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam hal keuangan daerah terjadi pergeseran, bahwa

penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Derajat desentralisasi sebagaimana hasil penemuan Munir, dkk dari Tim Fisipol pada UGM (2004) : derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah (TPD), menggunakan skala interval sebagai berikut :

Tabel 3.3
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00.00 – 10.00	Sangat Kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Cukup
30.01 – 40.00	Sedang
40.01 – 50.00	Baik
> 50.00	Sangat Baik

Sumber : Munir, Tim Peneliti UGM

Berikut ini dapat dilihat berdasarkan tabel di atas tentang derajat desentralisasi pendapatan asli daerah terhadap dana perimbangan.

Tabel 3.4
Derajat Desentralisasi Kota Langsa Tahun 2012 – 2015

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Derajat Desentralisasi (%)	Keterangan
2012	35.464.721.911	394.244.876.058	9,00	Sangat Kurang
2013	64.236.271.012	443.922.034.879	14,47	Kurang
2014	105.021.202.287	477.056.552.547	22,01	Cukup
2015	114.529.991.341	515.118.393.509	22,23	Cukup

Sumber : APBK Langsa

Berdasarkan tabel di atas, derajat desentralisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 terjadi kenaikan. Dimulai pada tahun 2012 dan 2013 derajat desentralisasi yang terjadi sebesar 9,00 persendan 14,47 persen. Selanjutnya pada tahun 2014 terjadi peningkatan terhadap derajat desentralisasi menjadi sebesar 22,01 persen. Selanjutnya pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 22,23 persen.

Sesuai dengan kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat derajat desentralisasi fiskal kota masih di kategorikan dalam skala cukup. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah dengan cara memperbesar penerimaannya dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan menyebabkan skala derajat desentralisasinya akan berubah menjadi baik atau minimal pada tingkat sedang.

3.1.3 Tingkat Kemandirian Kota

Untuk melihat tingkat kemandirian kota dari tahun 2012 sampai dengan 2015 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. Tingkat kemandirian ini dapat dilihat berdasarkan selisih antara total penerimaan umum daerah tahun 2012 sampai dengan 2015. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Sementara itu, belanja pegawai negeri sipil daerah terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Pengelompokkan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 seperti terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Pengelompokan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 Untuk Kabupaten dan Kota

No	Besarnya Kemampuan Daerah (Rp)	Pengelompokan
1.	> 400.000.000.000,00	Tinggi
2.	200.000.000.000 s.d 400.000.000.000,00	Sedang
3.	< 200.000.000.000,00	Rendah

Sumber : Permendagri No. 21 Tahun 2007

Secara umum tingkat kemandirian kota memperlihatkan kecenderungan membaik. Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 untuk Kota Langsa selama kurun waktu empat tahun terakhir, terlihat bahwa kemampuan keuangan kota mengalami peningkatan yang sangat baik. Peningkatan ini telah meningkatkan level tingkat kemandirian kota dari sedang meningkat pada level tinggi.

Tercatat bahwa pada tahun 2012, tingkat kemandirian daerah dari Rp.206,5 miliar menjadi Rp.267,5 miliar lebih di tahun 2013. Pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing menjadi Rp.402,4 miliar dan Rp.442,4 miliar. Ke depan diharapkan agar Pemerintah Kota untuk dapat mempertahankan kondisi ini dengan cara meningkatkan potensi dan menggali pajak sekaligus retribusi yang baru. Sementara pengeluaran

untuk belanja pegawai perlu dilakukan efisiensi dan pengkajian menyeluruh menyangkut penerimaan pegawai baru di lingkungan Pemerintahan Kota. Disamping perlunya optimalisasi penerimaan kota secara seimbang dengan tidak memberatkan pelaku usaha dan masyarakat untuk tujuan peningkatan pendapatan kota.

Tabel 3.6
Perkembangan Tingkat Kemandirian Kota
Tahun 2012 – 2015

Tahun	Pendapatan Umum Daerah (Rp)	Belanja PNS Daerah (Rp)	Tingkat Kemandirian (Rp)	Keterangan
2012	470.985.346.660	264.431.736.769	206.553.609.891	Sedang
2013	568.604.409.639	301.045.712.131	267.558.697.508	Sedang
2014	751.849.914.120	349.445.512.825	402.404.401.295	Tinggi
2015	818.157.958.122	375.701.745.555	442.456.212.568	Tinggi

Sumber : APBK Langsa

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan belanja daerah masa lalu mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (51) menjelaskan bahwa, "Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih". Mengingat sifatnya yang demikian, maka penyusunan pengalokasian belanja semestinya dilakukan dengan cermat, efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan. Sejalan dengan itu, alokasi belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel dan tetap diupayakan agar tidak terjadinya penyimpangan yang merugikan pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya, belanja daerah sebagai salah satu komponen dalam struktur APBD (APBK), diarahkan dalam Permendagari Nomor 13 Tahun 2006 (Pasal 31) untuk dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan. Dalam hal ini, termasuk urusan-urusan yang penanganannya dalam bidang atau bagian tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dengan pemerintah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Menyangkut dengan penyusunan anggaran atau belanja penyelenggaraan urusan wajib, Pemerintah Kota tetap mempedomani

ketentuan yang diatur dalam Permendagri tersebut. Belanja yang dialokasikan, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diutamakan pada peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, di samping mengembangkan jaminan sosial kemasyarakatan lainnya.

Pasal 36 ayat (1) Permendagri yang sama menetapkan kelompok belanja yang terdiri atas: a) Belanja Tidak Langsung; dan b) Belanja Langsung. Seterusnya, ayat (2) menyatakan bahwa kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan, sama sekali tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut ayat (3) menerangkan bahwa belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota di masa lalu, baik berkenaan dengan belanja tidak langsung maupun belanja langsung, mengacu pada Pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa kelompok belanja tidak langsung meliputi: a) Belanja Pegawai; b) Pembayaran Bunga; c) Subsidi; d) Hibah; e) Bantuan Sosial; f) Belanja Bagi Hasil; g) Bantuan Keuangan; dan h) Belanja Tidak Terduga. Sedangkan belanja langsung, terdiri dari: a) Belanja Pegawai, b) Belanja Barang dan Jasa; dan c) Belanja Modal. Upaya Pemerintah Kota dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka besaran alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung senantiasa diusahakan dan diarahkan untuk tidak melebihi alokasi belanja langsung.

Berdasarkan pada upaya dan arahan tersebut, maka untuk mencapai kinerja penyusunan anggaran yang baik, Pemerintah Kota masa lalu telah menempuh hal-hal sebagai berikut:

1) Memprioritaskan alokasi belanja kota pada program dan kegiatan pembangunan yang dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat banyak.
2) Mengacu pada prinsip dasar anggaran yaitu *value for money* (setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki nilai yang berarti), efektif dan efisien sesuai dengan program/kegiatan yang telah diprioritaskan.
3) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPK dalam setiap implementasi program/kegiatan pembangunan sehingga

tercapainya manfaat yang optimal serta terhindarnya tumpang-tindih program/kegiatan.

4) Meningkatkan pengawasan, di samping melakukan evaluasi berkala terhadap capaian hasil/manfaat dari setiap alokasi belanja kota yang telah digunakan untuk masing-masing program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan.

Pemerintah Kota Langsa tetap berupaya mengelola anggaran secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun, pada tahun 2012-2013 kebutuhan aparatur semakin meningkat, namun belanja tidak langsung tetap saja relatif lebih tinggi dibanding dengan belanja langsung. Pada tahun 2014-2015, Pemerintah Kota berhasil meningkatkan efisiensi anggaran, hal ini terlihat pada porsi belanja langsung yang lebih besar dari belanja tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, perkembangan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2015 (Rupiah)

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**280.199.702.897,00**	**323.183.543.131,00**	**374.065.485.824,54**	**413.969.587.554,36**
1.1	Belanja Pegawai	264.431.736.769,00	301.045.712.131,00	349.445.512.824,54	375.701.745.554,36
1.2	Belanja Bunga	379.000.000,00	1.051.767.000,00	-	-
1.3	Belanja Hibah	10.523.635.128,00	8.710.464.000,00	4.010.000.000,00	1.825.000.000,00
1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.353.331.000,00	-	7.519.773.000,00	2.913.557.000,00
1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.262.000.000,00	11.636.600.000,00	11.627.600.000,00	33.127.645.000,00
1.6	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	739.000.000,00	1.462.600.000,00	401.640.000,00
2	**BELANJA LANGSUNG**	**173.185.967.180,00**	**253.357.613.866,00**	**403.730.256.246,00**	**455.371.905.654,33**
2.1	Belanja Pegawai	77.685.094.840,00	82.191.049.158,00	106.044.975.518,00	69.885.650.189,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.907.127.057,00	104.719.959.891,00	141.897.604.147,00	188.236.674.347,33
2.3	Belanja Modal	48.593.745.283,00	66.446.604.817,00	155.787.676.581,00	198.249.581.118,00
	BELANJA	**453.385.670.077,00**	**576.541.156.997,00**	**777.795.742.070,54**	**870.341.493.208,69**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**17.599.676.583,08**	**-7.936.747.358,13**	**-25.945.827.950,54**	**-52.183.535.086,69**

Sumber : APBK Langsa 2008-2011 (diolah)

Struktur belanja dalam APBK mengalami perubahan dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja Modal.

Tabel 3.8
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2015 (Persen)

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**61,80**	**56,06**	**48,09**	**47,56**
1.1	Belanja Pegawai	58,32	52,22	44,93	43,17
1.2	Belanja Bunga	0,08	0,18	-	-
1.3	Belanja Hibah	2,32	1,51	0,52	0,21
1.4	Belanja Bantuan Sosial	0,74	-	0,97	0,33
1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	0,28	2,02	1,49	3,81
1.6	Belanja Tidak Terduga	0,06	0,13	0,19	0,05
2	**BELANJA LANGSUNG**	**38,20**	**43,94**	**51,91**	**52,44**
2.1	Belanja Pegawai	17,13	14,26	13,63	8,03
2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,35	18,16	18,24	21,63
2.3	Belanja Modal	10,72	11,53	20,03	22,78
	BELANJA	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: APBK Langsa (diolah)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kinerja aparatur, Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan kemampuan anggaran belanja yang tersedia setiap tahun, telah mengalokasikan belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang berkenaan dengan meningkatnya kebutuhan aparatur. Pengalokasian tersebut, disamping diupayakan untuk tidak melebihi

belanja pelayanan publik (belanja langsung) diupayakan pula penghematan pada pos-pos pengeluaran yang dianggap layak/pantas untuk efisiensinya belanja aparatur.

Grafik 3.2
Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2012-2015 (Persen)

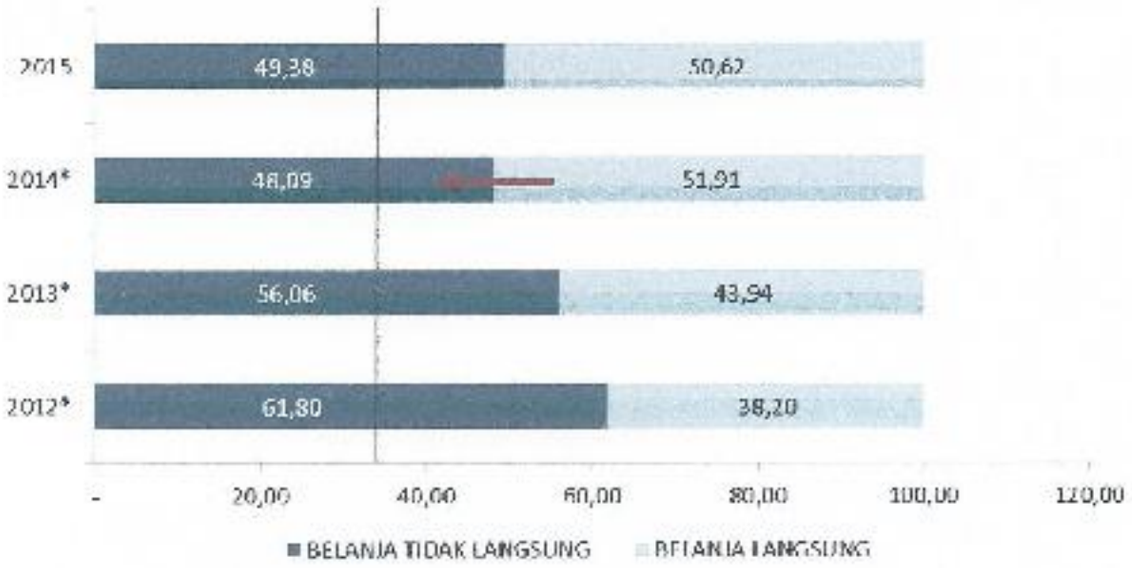

Sumber: APBK Lampau (diolah)
**) setelah perubahan*

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 disebutkan bahwa alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

Selain itu, penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus pengganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai seluruh transaksi-transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam anggaran pemerintah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dapat bersumber dari : a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Lalu; b) Penerimaan Pinjaman Daerah; c) Dana Cadangan Daerah; dan d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Sehubungan dengan pembiayaan daerah ini, Pemerintah Kota selama lima tahun yang lalu, telah menempuh kebijakan-kebijakan dalam rangka:

1) Menjaga agar tidak terjadi defisit anggaran daerah pada setiap tahun anggaran, melalui upaya peningkatan pendapatan daerah;
2) Menjaga agar pendapatan daerah dapat lebih besar dari belanja daerah;
3) Mengingatkan agar setiap SKPK tetap komit dalam pemanfaatan plafon anggaran yang tersedia tetap sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati dan selalu menekankan pada efisiensi anggaran; dan
4) Program dan kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMK dan tetap menjaga keadilan dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Meskipun demikian, dalam proses pelaksanaan pembangunan kota, dijumpai kendala-kendala seperti kenaikan harga, dan faktor lainnya yang tidak terduga sehingga rencana anggaran yang ditetapkan dapat saja

berubah, walau tanpa mengurangi maksud dan tujuan program. Kendala dan faktor-faktor yang tidak terduga lainnya, maka defisit anggaran belanja kota dimasa lalu tidak dapat dihindari. Berdasarkan uraian di atas, dapat disajikan analisis pembiayaan daerah berkenaan dengan menutup defisit riil anggaran Kota Langsa untuk tahun 2012 dan 2015 disajikan di tabel berikut.

Tabel 3.9
Kondisi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2015 (Rupiah)

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**21.282.073.832,92**	**9.359.948.923,13**	**27.187.767.950,54**	**52.683.535.086,69**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.619.315.818,92	8.937.343.477,13	26.766.105.950,51	52.683.535.086,69
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	13.662.758.064,00	982.605.445,00	421.662.000,00	-
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**38.881.750.466,00**	**1.423.201.564,00**	**1.241.940.000,00**	**500.000.000,00**
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	80.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00
2.2	Pembayaran Pokok Utang	38.801.750.466,00	923.201.564,00	341.940.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**-17.599.676.583,08**	**7.936.747.358,13**	**25.945.827.950,54**	**52.183.535.086,69**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		-	-	-

Sumber: APBK Langsa (diolah)

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Selanjutnya mengikuti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Langsa Tahun 2012-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah
Tahun 2012-2015 (Rupiah)

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**				
1.1	Belanja Pegawai	264.431.736.769,00	301.045.712.131,00	349.445.512.824,54	375.701.745.554,36
2	**BELANJA LANGSUNG**				
2.1	Belanja Pegawai	77.685.094.840,00	82.191.049.158,00	106.044.975.518,00	69.885.650.189,00
2.2	Belanja Modal	48.593.745.283,00	66.446.604.817,00	155.787.676.581,00	198.349.581.118,00

Sumber : APBK Langsa (diolah).

3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada bagian ini akan dimuat suatu analisis pendapatan dan belanja daerah untuk lima tahun ke depan, yaitu tahun 2012-2017. Analisis tersebut dilakukan melalui suatu proyeksi terhadap pendapatan daerah,

belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang akan dikelola Pemerintah Kota di masa yang akan datang. Proyeksi tersebut dilakukan berdasarkan data keuangan masa lalu (lima tahun sebelumnya), dengan menggunakan asumsi-asumsi serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mungkin atau terpaksa ditempuh. Kebijaksanaan tersebut mengingat perkembangan data keuangan kota masa lalu relatif fluktuatif, baik menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah yang berakibat kepada relatif kurang rasionalnya tingkat pertumbuhan yang terjadi di ketiga unsur keuangan tersebut. Untuk menghindari besarnya bias dalam perkembangan keuangan daerah masa depan, maka ditempuh kebijaksanaan untuk menetapkan angka pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang dianggap layak dan wajar tanpa mengurangi tujuan dan sasaran anggaran itu sendiri.

Kemampuan keuangan Pemerintah Kota yang diperkirakan meningkat setiap tahun merupakan modal yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai program-program pembangunan yang direncanakan selama lima tahun ke depan, yaitu:

1. Rencana pembiayaan untuk program-program yang menjadi prioritas utama seperti program-program unggulan dari walikota dan wakil walikota, serta kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh kota. Kebijakan tersebut, meliputi biaya pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar 10 persen. Berikutnya program prioritas utama merupakan program yang langsung terkait dengan kebutuhan masyarakat, dengan memiliki dampak positif dan manfaat yang besar bagi masyarakat.
2. Pembiayaan program pembangunan prioritas kedua adalah berkaitan dengan tupoksi SKPK berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPK
3. Pembiayaan program-program pada prioritas ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan biaya-biaya tidak langsung, misalnya tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, bantuan-bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan sebagainya.

Prioritas-prioritas pembiayaan tersebut di atas, sesuai dengan arahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa alokasi pembiayaan harus mengutamakan urusan prioritas terhadap program-program pembangunan yang direncanakan.

Grafik 3.3
Realisasi, Proyeksi dan Komposisi Keuangan Daerah
Tahun 2012-2017 Kota Langsa (miliyar rupiah)





Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2017 (Rupiah)

NO	URAIAN		2012*	2013*	2014*	2015	2016	2017
1.	**PENDAPATAN DAERAH**		**470.985.346.660,08**	**568.604.409.638,87**	**751.849.914.120,00**	**818.167.958.132,00**	**846.976.334.142,00**	**885.101.437.043,00**
	1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**35.464.721.911,08**	**64.336.271.011,87**	**105.021.202.287,00**	114.529.994.341,00	120.337.663.917,00	**122.744.621.195,00**
		1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	5.222.137.932,00	5.739.914.000,00	7.494.319.000,00	9.550.000.000,00	9.615.000.000,00	9.807.300.000,00
		1.1.2. Hasil Retribusi Daerah	20.119.647.916,00	8.600.083.229,00	13.718.522.158,00	5.405.424.740,00	5.624.026.709,00	5.736.507.243,00
		1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	300.000.000,00	413.617.460,00	391.835.870,00	518.845.242,00	518.845.242,00	539.222.147,00
		1.1.4. Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedaqah			1.400.000.000,00	2.191.549.393,00	2.100.000.000,00	2.142.000.000,00
		1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	822.936.063,08	49.492.656.322,87	82.016.525.259,00	96.864.174.966,00	102.479.991.966,00	104.539.591.805,00
	1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**394.244.876.068,00**	**443.922.034.879,00**	**477.066.652.547,00**	**515.118.393.509,00**	**518.694.190.000,00**	**552.333.092.820,00**
		1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.302.917.068,00	32.760.222.879,00	24.934.217.547,00	25.295.675.509,00	22.488.672.000,00	23.163.332.160,00
		1.2.2 Dana Alokasi Umum	337.337.339.000,00	381.240.983.000,00	419.767.005.000,00	425.446.753.000,00	451.931.928.000,00	483.583.562.960,00
		1.2.3. Dana Alokasi Khusus	23.604.620.000,00	29.920.830.000,00	32.365.330.000,00	64.375.965.000,00	44.253.590.000,00	45.581.197.700,00
	1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**41.275.748.691,00**	**60.446.103.748,00**	**169.772.159.286,00**	**188.509.570.272,00**	**207.944.280.225,00**	**210.023.723.028,00**
		1.3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
		1.3.2. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.603.038.459,00	12.885.625.748,00	17.135.561.925,00	17.135.561.925,00	14.308.829.166,00	14.451.917.458,00
		1.3.3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.738.477.000,00	47.560.478.000,00	70.820.311.000,00	89.417.393.000,00	112.955.110.000,00	114.084.661.100,00
		1.3.4. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	934.213.232,00	-	81.816.286.361,00	81.956.615.347,00	80.680.341.059,00	81.487.144.470,00

Sumber: APBK Langsa (diolah).
**) setelah perubahan*

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012-2017 (Rupiah)

NO	URAIAN			2012*	2013*	2014*	2015	2016	2017
2.	BELANJA DAERAH			453.385.670.077,00	575.541.155.997,00	777.795.742..070,54	870.341.493.208,69	863.376.334.142,00	903.101.437.043,00
	2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		280.199.703.697,00	328.183.648.131,00	374.065.485.824,54	413.969.587.554,36	462.439.740.465,00	467.064.137.870,00
		2.1.1.	Belanja Pegawai	264.031.736.760,00	301.045.712.131,00	349.445.512.824,54	375.701.745.554,36	382.70[illegible].324.657,00	386.331.367.004,00
		2.1.2.	Belanja Bunga	379.000.000,00	1.051.767.000,00		-	-	-
		2.1.3.	Belanja Hibah	6.523.635.128,00	8.710.464.000,00	4.010.000.000,00	1.825.000.000,00	10.655.275.000,00	10.761.827.730,00
		2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	3.353.331.000,00		7.519.773.000,00	2.913.337.000,00	2.500.000.000,00	2.525.000.000,00
		2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.262.000.000,00	11.636.000.000,00	11.627.600.000,00	33.127.645.000,00	66.080.140.808,00	66.740.942.216,00
		2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	739.000.000,00	1.462.600.000,00	401.640.000,00	500.000.000,00	505.000.000,00
	2.2.	BELANJA LANGSUNG		173.185.967.180,00	253.357.513.866,00	403.730.256.246,00	456.371.905.654,33	400.936.593.677,00	436.037.299.173,00
		2.2.1.	Belanja Pegawai	77.685.091.840,00	82.191.049.135,00	106.044.973.618,00	69.885.650.189,00	67.703.541.657,00	73.630.768.341,00
		2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.907.127.037,00	104.719.959.891,00	141.897.604.147,00	188.236.674.347,33	189.074.031.119,00	205.626.852.657,00
		2.2.3.	Belanja Modal	48.593.745.283,00	66.446.604.817,00	155.787.676.581,00	198.249.581.118,00	144.158.020.901,00	156.779.678.175,00
			SURPLUS / (DEFISIT)	17.599.676.583,08	(7.936.747.358,13)	(25.945.827.950,54)	(52.183.535.086,69)	(16.400.000.000,00)	(18.000.000.000,00)

Sumber: APBK Langsa (diolah).

**) setelah perubahan*

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2017 (Rupiah)

NO		URAIAN	2012*	2013*	2014*	2015	2016	2017
3.1.		**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**21.282.073.882,92**	**9.359.948.922,13**	**27.187.767.950,54**	**52.683.535.086,69**	**18.400.000.000,00**	**20.000.000.000,00**
	3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.619.315.818,92	8.397.343.477,13	26.766.165.950,54	52.683.535.086,69	18.400.000.000,00	20.000.000.000,00
	3.1.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	13.662.758.064,00	962.605.445,00	421.662.000,00	-	-	-
3.2.		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**38.881.750.466,00**	**1.423.301.864,00**	**1.341.940.000,00**	**500.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
	3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	80.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	3.2.2.	Pembayaran Pokok Utang	38.801.750.466,00	923.301.864,00	341.940.000,00	-	-	-
		PEMBIAYAAN NETTO	**(17.599.676.583,08)**	**7.936.747.358,13**	**25.845.827.950,54**	**52.183.535.086,69**	**16.400.000.000,00**	**18.000.000.000,00**
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-	-

Sumber: APBK Langsa (diolah)

**) setelah perubahan*

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan dan Tantangan Pembangunan

Sejak terbentuk secara definitif pada tahun 2001, Pemerintah Kota Langsa terus berupaya melaksanakan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping hasil pembangunan yang telah dicapai, baik yang terkait dengan urusan wajib maupun pilihan yang diemban Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan, dijumpai pula beberapa permasalahan pembangunan yang harus diatasi dan dituntaskan dalam jangka menengah ke depan (periode 2012-2017). Permasalahan tersebut akan diatasi secara terpadu, komprehensif, dan tepat, mengingat dampaknya berpotensi besar menghambat kemajuan pembangunan kota. Umumnya, inti permasalahan tersebut terjadi akibat terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Adapun permasalahan pembangunan kota yang harus diatasi dalam jangka menengah ke depan dirangkum sebagai berikut.

4.1.1 Implementasi Syariat Islam Belum Maksimal

Provinsi Aceh diberi kewenangan khusus oleh Pemerintah Pusat melalui penyelenggaraan keistimewaan Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam. Lebih lanjut, lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh semakin memperkuat legitimasi dan menjadi momentum bagi Pemerintah Kota untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai Islami yang selama ini kurang maksimal diamalkan masyarakat, harus dibangkitkan kembali dan diaktualisasikan secara terus menerus dalam setiap kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Implementasi Syariat Islam secara kaffah harus ditingkatkan di seluruh aspek kehidupan, baik perorangan, keluarga, di kalangan pemerintahan, maupun di lingkungan sosial kemasyarakatan.

Belum sempurnanya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Islami di kalangan masyarakat kota merupakan permasalahan

serius yang menyebabkan Syariat Islam belum terlaksana secara kaffah. Kehidupan modernisasi yang didorong perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) turut pula menggeser nilai-nilai syariat Islam. Kondisi tersebut telah mewabah pada generasi muda dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, masih lemahnya pengawasan dari instansi terkait juga menyebabkan masih terjadinya pelanggaran syariat Islam di kota ini. Jumlah pelanggaran berikut penyelesaian penegakan qanun syari'at Islam di Kota Langsa relatif masih tinggi meskipun tren perkembangannya mengalami penurunan, dimana pada tahun 2012 sebanyak 624 pelanggaran dan pada tahun 2014 menjadi 596 pelanggaran.

Untuk mewujudkan masyarakat kota yang Islami, pemantapan akidah dan pemahaman ajaran Islam mutlak diproritaskan. Selain itu, program-program dan kegiatan-kegiatan yang memilikberatkan unsur keagamaan juga harus ditingkatkan, termasuk mengoptimalkan peran ulama dalam mendorong pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di kota untuk lima tahun mendatang.

4.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Maksimal

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa *(good governance)* merupakan amanah yang harus diwujudkan dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Dalam kaitan itu, birokrasi dan struktur organisasi pemerintah yang dibentuk harus efektif dan efisien serta mampu meningkatkan pelayanan publik berkualitas yang dibutuhkan masyarakat. Jika ini dapat direalisasikan, maka tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dalam jangka waktu menengah (periode 2012-2017). Karena itu, upaya strategis yang harus dilakukan Pemerintah Kota dalam jangka menengah ke depan, mulai dari penataan birokrasi, memodernisasi birokrasi, penataan kembali struktur organisasi, perbaikan sistem kerja, pembuatan indikator kinerja organisasi dan kinerja pegawai, pembuatan prosedur operasi standar (SOP), dan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM).

Tata kelola pemerintahan yang baik tercermin pula dari pengelolaan keuangan daerah yang menganut prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesional. Meskipun Kota Langsa dalam beberapa tahun terakhir telah menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun untuk penilaian akuntabilitas kinerja dalam hal ini Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kota Langsa, angka penilaiannya masih rendah dengan kategori penilaian C.

4.1.3 Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi kota hingga akhir tahun 2011 masih cenderung melambat dari pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun terus bergerak naik dalam dua tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi kota juga menunjukkan fluktuasi. Kondisi tersebut mengindikasikan pondasi ekonomi Kota Langsa masih rawan dari berbagai gejolak dan goncangan ekonomi, baik dipicu secara internal maupun eksternal. Akhir tahun 2014, tercatat pertumbuhan ekonomi kota sebesar 4,43 persen, jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen namun lebih tinggi dari provinsi Aceh yang sebesar 4,13 persen.

Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi kota berkait erat dari berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Seperti, masih terbatasnya investasi swasta, minimnya anggaran yang diimplementasikan untuk sektor-sektor produktif, belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya ekonomi lokal, dan belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan Kuala Langsa. Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tepat dan terarah guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berkualitas dalam jangka menengah ke depan. Kebijakan yang dapat mendorong minat para calon investor untuk menanamkan modalnya adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk dilaksanakan, disamping pula upaya keras mendorong meningkatkan kapasitas UMKM dan optimalisasi pendayagunaan pelabuhan Kuala Langsa dalam mendukung aktivitas perdagangan dan perluasan penyerapan tenaga kerja.

4.1.4 Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Kurun waktu 2012-2013, tingkat kemiskinan kota cenderung lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional, meskipun terlihat lebih rendah dari provinsi. Tahun 2013, angka persentase kemiskinan di kota mencapai 12,62 persen, sementara kemiskinan nasional sebesar 11,47 persen dan provinsi sebesar 17,60 persen. Masih rendahnya capaian

pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir ikut menyebabkan terhambatnya pengurangan angka kemiskinan.

Dalam jangka menengah ke depan, kebijakan dan implementasi pembangunan yang *pro growth, pro job* dan *pro-poor* akan sangat bermanfaat dan memberikan efek pengganda bagi kesinambungan pendapatan masyarakat. Pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan komprehensif yang melibatkan antarSKPK. Dukungan anggaran dan implementasi program pembangunan *pro growth, pro job* dan *pro-poor* dari pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dinilai pula sangat strategis serta diharapkan intensitasnya terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Antara lain, mencakup penguatan program PNPM mandiri perdesaan dan perkotaan, peningkatan alokasi dana gampong, bantuan kredit usaha kerja bagi pelaku UMKM, bantuan raskin, dan pemberdayaan sosial-ekonomi lainnya yang diharapkan dapat mengurangi penduduk miskin secara bertahap dan berkelanjutan.

4.1.5 Rendahnya Produktivitas Koperasi dan UMKM

Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan basis ekonomi kerakyatan dan menempati posisi strategis dalam upaya mendorong perekonomian kota, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan warga kota. Berbagai program pembangunan yang digulirkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir diakui bahwa berdampak positif dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM. Di sisi lain, koperasi dan UMKM masih pula dihadapkan berbagai permasalahan klasik yang belum teratasi secara tuntas sehingga memerlukan penanganan cepat dan berkelanjutan. Berbagai masalah tersebut telah menyebabkan rendahnya produktivitas koperasi dan UMKM di kota.

Permasalahan spesifik yang dihadapi koperasi dan UMKM mencakup terbatasnya akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, kurang kondusifnya iklim usaha, masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, dan terbatasnya jangkauan pemasaran produk UMKM. Terbatasnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi, dan pasar. Kurang kondusifnya iklim usaha diantaranya terkait dengan lemahnya koordinasi lintas SKPK dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, persaingan usaha yang tidak sehat, dan pungutan sebagai

sumber PAD yang memberatkan UMKM. Kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang lemah akibat manajemen pengelolaan koperasi kurang profesional, koperasi terbentuk tanpa didasari kepentingan ekonomi bersama, dan masih adanya pertentangan kepentingan dalam koperasi. Dampak dari beberapa hal tersebut, jumlah koperasi aktif di Kota Langsa pada tahun 2014 masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 9,88 persen.

Pemberdayaan koperasi dan UMKM harus menjadi perhatian sungguh-sungguh mengingat kota termasuk pusat perdagangan barang dan jasa di wilayah timur provinsi. Bahkan, dalam jangka menengah ke depan kota harus menjadi sentral perdagangan barang dan jasa terbesar di wilayah utara-timur Aceh yang didukung dengan optimalisasi pemanfaatan pelabuhan Kuala Langsa. Karena itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam periode 2012-2017 diharapkan memberikan kontribusi positif dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang berkualitas, dan memeratakan peningkatan pendapatan.

4.1.6 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam pembangunan kota. Manusia sebagai *human capital* pembangunan tidak akan berfungsi optimal bila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Kota telah mengalami kemajuan penting dalam peningkatan kualitas SDM yang diukur dari *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data BPS menunjukkan IPM kota sebesar 72,75 pada tahun 2012 (perhitungan metode baru). Angka IPM tersebut meningkat signifikan hingga mencapai 73,90 pada tahun 2014 dan termasuk dalam kategori menengah atas. Namun demikian, peningkatan IPM tersebut belum sepenuhnya berimplikasi signifikan dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Angka persentase kemiskinan kota mencapai 12,62 persen dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 11,74 persen (kondisi tahun 2013).

Dalam pengukuran IPM, pendidikan dan kesehatan merupakan komponen utama, selain pendapatan. Membaiknya kinerja pendidikan dan kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas SDM yang

tercermin dari IPM. Meskipun angka IPM kota terus meningkat, namun variabel pembentuk IPM belum mencapai angka maksimum. Tingkat taraf pendidikan penduduk masih rendah. Data BPS mengungkapkan angka rata-rata lama sekolah kota baru tercapai 10,47 tahun (kondisi tahun 2013), sementara angka maksimum 15 tahun (standar UNDP). Hal tersebut bermakna bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Langsa telah menamatkan pendidikan setingkat SMP dan belum menamatkan pendidikan SMA. Kondisi tersebut belum memadai dalam mengantisipasi persaingan global.

Demikian pula dengan angka harapan hidup yang sebesar 68,79 tahun, sedangkan angka maksimum adalah 85 tahun (standar UNDP). Sejalan dengan perkembangan IPTEK, peningkatan kualitas SDM merupakan prioritas yang harus dilaksanakan kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM, beberapa masalah di bidang pendidikan dan kesehatan yang harus diatasi dalam lima tahun ke depan, mencakup : a) masih ditemui anak didik yang tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah dalam mengecap pendidikan; b) masih kurangnya tenaga pendidik (guru) pada mata pelajaran tertentu; c) distribusi tenaga pendidik yang berkualitas yang belum merata; d) belum meratanya distribusi sumberdaya kesehatan yang berkualitas; e) pelayanan kesehatan yang belum optimal; f) masih ditemuinya angka kematian bayi dan angka kematian ibu hamil; dan g) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

4.1.7 Belum Optimalnya Pemanfaatan Pelabuhan Kuala Langsa

Kedudukan kota yang berada di wilayah pesisir timur provinsi dan dikelilingi Selat Malaka di bagian utara, memiliki peluang yang sangat besar untuk mendorong percepatan aktivitas perdagangan ekspor-impor dengan manca negara. Lebih lanjut, terbukanya peluang untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik antarwilayah pantai timur maupun dengan Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut sangat memungkinkan diwujudkan mengingat Kota Langsa memiliki pelabuhan Kuala Langsa. Selat Malaka yang mengelilingi kota di bagian utara merupakan peluang untuk pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan kekayaan laut. Potensi perikanan darat dan laut akan didayagunakan dan dikelola secara berkelanjutan *(sustainable*

development) sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir dan mendorong kemajuan wilayah pesisir dalam jangka menengah ke depan.

Pelabuhan Kuala Langsa termasuk pelabuhan regional yang dipersiapkan menjadi salah satu pintu masuk untuk pantai wilayah timur Aceh. Keberadaan pelabuhan tersebut diharapkan berfungsi sebagai *feeder* (pengumpan) bagi pelabuhan besar lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian provinsi pada umumnya dan mendorong percepatan pembangunan kota pada khususnya dengan memanfaatkan semua potensi SDM dan Sumber Daya Alam (SDA) di seluruh kawasan dan daerah *hinterland*.

Untuk mendukung Pelabuhan Kuala Langsa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi *(engine growth)* kota dibutuhkan sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai. Masih banyak fasilitas penunjang yang perlu dibenahi dan siapkan seperti pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tangki timbun CPO. Selain itu, tumpang tindihnya kebijakan pengelolaan pelabuhan yang belum sesuai amanat UUPA, turut pula menghambat lalulintas perdagangan ekspor-impor. Regulasi dan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan Kuala Langsa merupakan syarat utama. Adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diharapkan dapat berimplikasi signifikan dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di pelabuhan Kuala Langsa yang sekaligus berdampak positif terhadap percepatan pembangunan kota.

4.1.8 Terbatasnya Investasi dan Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Untuk mendorong percepatan pembangunan sekaligus mencapai visi jangka menengah kota dibutuhkan penanaman modal (investasi) yang cukup. Investasi tersebut diperlukan untuk membangun infrastruktur dan pengembangan kawasan perkotaan. Kebijakan pembiayaan pembangunan infrastruktur perlu diprioritaskan, baik bersumber dari dana masyarakat dan dunia usaha, maupun investor asing dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana secara proporsional. Hal tersebut merupakan tantangan yang memerlukan berbagai penyempurnaan kebijakan investasi di kota dan pengaturan pajak.

Kondisi keuangan daerah masih didominasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan non pajak) dalam mendorong kinerja pembangunan kota. Implikasinya, tingkat ketergantungan Pemerintah Kota terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan cukup besar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan berperan penting dalam pendanaan pembangunan masih belum optimal. Salah satunya, adalah belum lengkapnya data tentang objek pajak dan retribusi daerah yang akurat. Data potensi PAD sangat berperan penting dalam penentuan target setiap tahun. Data potensi PAD juga sangat diperlukan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan peningkatan PAD serta pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel. Selama ini, dampak dari masih rendahnya PAD terhadap belanja adalah rendahnya tingkat kemandirian daerah.

Selain itu, belum memadainya sarana pendukung bagi instansi pengelola PAD dan terbatasnya aparatur yang turut mengelola pajak daerah dan retribusi daerah menyebabkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak optimal. Dengan demikian, hasil penerimaan yang dicapai pun masih relatif rendah atau tidak mencapai target yang telah direncanakan.

Lemahnya penegakan hukum atau sanksi bagi wajib pajak juga mempengaruhi kecilnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Meskipun Pemerintah Kota telah menetapkan qanun-qanun yang mengatur PAD termasuk sanksinya, namun akibat lemahnya penegakan hukum atau pelaksanaan sanksi tersebut berdampak terhadap wajib pajak semakin leluasa untuk tidak membayar pajak.

Perkembangan aktivitas ekonomi di sisi lain, masih sangat bergantung dari pengeluaran (belanja) Pemerintah Kota. Sementara peran dunia usaha/swasta masih relatif kecil dalam mendorong percepatan ekonomi.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah bersumber dari PAD merupakan keharusan dan dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan berbagai sumber PAD dapat dilakukan pada tingkatan kebijakan dan administrasi. Upaya peningkatan PAD dengan kebijakan dilakukan melalui strategi ekstensifikasi jenis pungutan retribusi daerah serta memperbaiki administrasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur koleksi melalui perbaikan basis

data, penghitungan potensi penerimaan, mekanisme penagihan, dan lain sebagainya yang ditujukan untuk intensifikasi pungutan pajak dan retribusi.

Selanjutnya, strategi intensifikasi diarahkan untuk mengoptimalkan tingkat pemungutan penerimaan potensi objek-objek PAD yang sudah berjalan *(on-going)* yang didukung dengan penyempurnaan atau qanun-qanun yang telah ada, pemantapan sumberdaya pemungut, dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan strategi ekstensifikasi diarahkan untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui perluasan objek-objek PAD yang sesuai dengan aturan/perundang-undangan yang berlaku disertai dengan qanun, dan optimalisasi potensi-potensi sumberdaya ekonomi berbasis sektor unggulan. Penyempurnaan administrasi perpajakan perlu dilakukan melalui e-pajak daerah.

4.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan kota. Berdasarkan permasalahan pembangunan serta mempertimbangkan isu-isu dan dinamika secara nasional dan regional, dengan menggunakan analisis SWOT maka dirangkum isu-isu strategis selama periode 2012-2017.

4.2.1 Analisis SWOT

A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

I. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan

1. Penduduk mayoritas beragama Islam;
2. Keinginan reformasi birokrasi pemerintahan tergolong tinggi;

3. Letak strategis kota;
4. Adanya pelabuhan Kuala Langsa untuk jalur penyebarangan dan perdagangan;
5. Kemudahan akses media komunikasi dan informasi;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tergolong tinggi;
7. Banyaknya lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial;
8. Adanya jaringan kerjasama antar daerah, LSM, dan perguruan tinggi;
9. Tingginya potensi perikanan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata;
10. Daya beli masyarakat terus meningkat;
11. Tingginya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan;
12. Memiliki Keanekaragaman sosial dan budaya;
13. Aparatur gampong berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong dan tugas sosial kemasyarakatan;
14. Tingginya keinginan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban serta keberlanjutan perdamaian.

b. Kelemahan

1. Penegakan dan implementasi Syariat Islam belum optimal;
2. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum maksimal;
3. Tata ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan belum tertata dengan baik;
4. Sarana dan prasarana pelabuhan masih belum memadai;
5. Ketersediaan dan validitas data indikator pembangunan masih rendah;
7. Pelayanan pendidikan berkualitas belum merata;
8. Pelayanan dasar publik belum optimal;
9. Kemampuan sumber pendanaan/finansial Pemerintah Kota masih sangat terbatas;
10. Penataan permukiman masyarakat dan lingkungan hidup yang serasi dan lestari belum tertata dengan baik;
11. Kualitas sumber daya manusia masih rendah;
12. Tingkat pengangguran masih tinggi;
13. Pemasaran produk lokal masih lemah;

14. Tingkat kemiskinan masih tinggi;
15. Kapasitas Pemerintah Gampong masih rendah;
16. Kerentanan keberlanjutan perdamaian.

II. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang

1. Terdapat qanun tentang pelaksanaan Syariat Islam;
2. Reformasi di bidang politik dan birokrasi pemerintah;
3. Adanya sumber dana pembangunan yang bersumber dari TDBH Migas dan Otsus;
4. Perdagangan dan investasi dengan pihak dalam dan luar negeri;
5. Pengembangan dan pemanfaatan Iptek;
6. Kemudahan akses pasar internasional;
7. Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan dasar publik;
8. Adanya kerjasama antar daerah;
9. Pengembangan ekonomi kecil dan menengah berbasis syariah;
10. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap stabilitas keamanan.

b. Ancaman

1. Maraknya penyakit masyarakat;
2. Migrasi penduduk sulit dikendalikan;
3. Inkonsistensi kebijakan pembangunan;
4. Globalisasi ekonomi dan informasi;
5. Dampak globalisasi terhadap sosial dan budaya;
6. Persaingan pelayanan masyarakat antar daerah;
7. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan aparat hukum/birokrasi masih rendah;
8. Wilayah rawan bencana;
9. Instabilitas keamanan

4.2.2. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Langsa Tahun 2012-2017

Berdasarkan analisis SWOT di atas maka yang menjadi isu strategis pembangunan kota selama lima tahun ke depan (2012-2017) adalah sebagai berikut:

1. Penegakan dan implementasi Syariat Islam belum optimal;
2. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum maksimal;

3. Belum tertatanya ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib, beraih, indah, menarik, dan nyaman;
4. Pelayanan pendidikan berkualitas belum merata;
5. Belum optimalnya pelayanan publik;
6. Rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur kota dan wilayah;
7. Rendahnya produktivitas UKM dan belum berkembangnya sentra-sentra ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan, serta masih tingginya tingkat kemiskinan;
8. Belum optimalnya penataan permukiman masyarakat dan lingkungan hidup yang serasi dan lestari;
9. Masih rendahnya kapasitas Pemerintah Gampong dan pembinaan masyarakat; dan
10. Kerentanan keberlanjutan perdamaian.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan cita-cita atau kondisi ideal yang diinginkan di masa depan dengan memperhatikan kondisi kekinian, potensi sumber daya lokal (SDA, SDM, dan kemampuan keuangan), serta dinamika dan isu-isu strategis yang berkembang. Visi diartikan pula sebagai suatu kondisi idaman masa depan yang hendak dicapai. Idaman tersebut adalah suatu kondisi daerah yang lebih baik dari sebelumnya serta taraf hidup sosial-ekonomi masyarakatnya yang lebih baik pula.

Sesuai amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa visi dan misi dari Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah terpilih, dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Langsa terpilih melalui Pemilukada kota tahun 2012, ditetapkan menjadi dasar visi dan misi pembangunan kota periode 2012-2017. Atas dasar tersebut, dengan mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, Pemerintah Kota menetapkan visi pembangunan kota tahun 2012-2017 sebagai berikut :

" Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami"

Kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat visi di atas memiliki kandungan arti atau makna sebagai berikut :

Kota Berperadaban bermakna sebagai sebuah kota yang memiliki jati diri, harga diri, berbudaya, dan mandiri dalam upaya mencapai kemakmuran masyarakat. Kota Langsa, berlandaskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ekonomi lokal yang tangguh, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Sementara itu, ***Kota yang Islami*** memiliki arti sebuah kota yang dihuni masyarakatnya yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai Syariat Islam serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis antarummat beragama.

Beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi agar visi yang ditetapkan dapat diwujudkan antaranya adalah :

1) Terciptanya keberlanjutan perdamaian di Aceh secara keseluruhan termasuk di Kota Langsa, selama terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
2) Kestabilan makro ekonomi serta kondusifnya kondisi sosial dan politik secara nasional;
3) Tersedianya anggaran pembangunan daerah yang memadai setiap tahun serta difokuskan pada program pembangunan prioritas; dan
4) Dukungan dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat Kota Langsa, termasuk jajaran eksekutif dan legislatif, maupun kalangan dunia usaha (swasta).

5.2 Misi

Misi adalah kondisi ideal yang harus diciptakan agar visi yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terealisir menjadi kenyataan dalam lima tahun ke depan. Misi juga berupa panggilan tugas sesuai fungsi masing-masing untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi sampai waktu yang telah disepakati bersama.

Sejalan dengan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilukada kota tahun 2012, ditetapkan beberapa misi pembangunan dalam jangka menengah ke depan sebagai berikut :

1. Menegakkan dan menjalankan Syariat Islam secara kaffah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, amanah, demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel;
3. Mewujudkan penataan ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib dan BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman);
4. Mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta ketahanan budaya daerah;
5. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas guna mendorong percepatan pengembangan kota dan wilayah;
7. Mendorong peningkatan UMKM dan membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan;

8. Mewujudkan permukiman masyarakat yang layak huni dan menata lingkungan hidup yang serasi dan lestari;
9. Menguatkan kapasitas pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
10. Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan perdamaian sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Kota Langsa selama 2012-2017 ditetapkan berdasarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya, sasaran pembangunan Kota Langsa ditetapkan sesuai dengan masing-masing tujuan pembangunan. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 :		
Menegakkan dan menjalankan Syariat Islam secara kaffah	Melaksanakan Syariat Islam secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat	Berkurangnya kegiatan-kegiatan asusila dan amoral lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam
		Meningkatnya peran dan fungsi ulama dalam pemberdayaan ummat dan pengayom dalam kehidupan keagamaan
Misi 2 :		
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, amanah, demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, bersih dan berwibawa (good governance)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (LKIP Pemerintah Kota Langsa dari C menjadi B, serta indeks kepuasan masyarakat)
		Meningkatnya aparatur yang beretos kerja tinggi, profesional, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah;
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan sistem pelaporan keuangan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional (perolehan WTP)

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
		Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD);
		Meningkatnya kemandirian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah (kemampuan keuangan daerah dari rendah menjadi tinggi)
Misi 3 :		
Mewujudkan penataan ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib dan BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman);	Menciptakan tata ruang kota serta pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman);	Meningkatnya pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan dan berwawasan miligasi bencana
		Meningkatnya pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman)
Misi 4 :		
Mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta ketahanan budaya daerah;	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Kota Langsa yang berkualitas dan berdaya saing serta menguatkan ketahanan budaya daerah guna mendorong percepatan pembangunan;	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan (rata-rata lama sekolah dari 10,43 tahun menjadi 11,07 tahun)
		Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas (persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV dari 71,16 % menjadi 90,79%)
		Berkembangnya budaya daerah dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan daerah
Misi 5 :		
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Kota Langsa yang berperadaban;	Meningkatnya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau (angka harapan hidup 68,75 tahun menjadi 68,88 tahun)
		Meningkatnya pelayanan administrasi publik yang baik dan cepat (pengurusan izin 7 hari)
Misi 6 :		
Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas guna mendorong percepatan pengembangan kota dan wilayah;	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur guna mendorong percepatan pengembangan Kota dan wilayah;	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan publik perkotaan dan wilayah yang berkualitas;
		Meningkatnya sarana dan prasarana pelabuhan Kuala Langsa yang memadai dalam mendukung aktivitas perdagangan ekspor dan impor;

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berbudaya dan Islami		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
		Meningkatnya distribusi air bersih yang memadai dalam upaya pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat
		Meningkatnya pelayanan jasa transportasi yang efisien, ekonomis, dan aman.
Misi 7 :		
Mendorong peningkatan UMKM dan membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan;	Menguatkan kapasitas UMKM dan membangun ekonomi kerakyatan berlandaskan potensi sumber daya ekonomi lokal;	Meningkatnya kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi kota;
		Meningkatnya kapasitas produksi perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan;
		Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan perkebunan berbasis sumberdaya lokal dan mendukung pengembangan perdagangan ekspor;
		Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan yang ramah lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan
		Meningkatnya kapasitas produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka mendukung kebutuhan pangan
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (4,75 persen menjadi 4,87 persen)
		Menurunnya tingkat kemiskinan (13,93 persen menjadi 10,62 persen)
Misi 8 :		
Mewujudkan permukiman masyarakat yang layak huni dan menata lingkungan hidup yang serasi dan lestari;	Menciptakan permukiman masyarakat layak huni dan penataan lingkungan yang serasi dan harmonis	Meningkatnya lingkungan permukiman yang berkualitas dalam upaya menciptakan kota tanpa permukiman kumuh
		Meningkatnya kualitas kinerja cakupan pelayanan limbah, dan persampahan (penanganan sampah 14 persen menjadi 75 persen)

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 9 :		
Menguatkan kapasitas pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat	Mewujudkan kapasitas lembaga pemerintah gampong yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat	Menguatnya kapasitas dan tata kelola kepemerintahan gampong yang baik dalam pelaksanaan pembangunan
		Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 63,38 persen)
Misi 10 :		
Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan perdamaian sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)	Menciptakan keamanan dan ketertiban serta keterlibatan masyarakat dalam rangka keberlanjutan perdamaian sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)	Meningkatnya kondisi daerah yang aman dan kondusif serta keberlanjutan perdamaian
		Meningkatnya kualitas demokrasi dan politik menuju masyarakat yang berkeadilan, tertib, aman dan bermartabat

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi Pembangunan

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness, W) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S) dengan ancaman (threath, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi pemerintah kota.

6.1.1 Kekuatan – Peluang (S-O)

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam setiap kehidupan bermasyarakat;
2. Peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem kerja instansi dan aparat pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (*good governance*);
3. Peningkatan kualitas infrastruktur, meliputi jalan, jembatan, drainase, tanggul, listrik, transportasi, ICT, internet dalam mendukung percepatan pengembangan kota dan wilayah;
4. Penataan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, efektif, integratif, produktif, dan berkelanjutan sesuai RTRW Kota Langsa;

5. Peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan Kuala Langsa dalam rangka mendorong aktivitas perdagangan ekspor impor;
6. Penyediaan pusat data dan informasi secara terpadu, integratif, dan berbasis e-planning (e-klik);
7. Pemerataan layanan kesehatan berkualitas sesuai dengan SPM Kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
8. Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah sesuai dengan standar nasional, melalui pemerataan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan;
9. Peningkatanperan aktif kelompok masyarakat/dunia usaha (swasta) untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan;
10. Penguatan kerjasama dan kemitraan strategis antara BUMN, pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah dalam mendorong pengembangan koperasi UMKM, serta percepatan perdagangan ekspor-impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa;
11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha yang profesional dan berdaya saing;
12. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan aman;
13. Peningkatan iklim usaha yang kondusif, pemberian kemudahan prosedur investasi dan perizinan bagi investor lokal, luar daerah dan luar negeri guna mendorong peningkatan investasi dan aktivitas bisnis;
10. Pelestarian budaya daerah dan kearifan lokal.

6.1.2 Kekuatan – Ancaman (S-T)

1. Peningkatan sosialisasi dan penguatan pelaksanaan qanun-qanun Syariat Islam;
2. Penguatan kapasitas wilayatul hisbah dan lembaga sosial keagamaan dalam mengawasi dan menyahuti dinamika dalam kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami;
3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana, peningkatan kualitas data, dan penerapan teknologi komunikasi dan guna menghasilkan perencanaan pembangunan berkualitas;

4. Peningkatan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan dengan memperhatikan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi;
5. Perluasan layanan pendidikan non-formal yang bermutu dan berkualitas;
6. Peningkatan sosialisasi dan peran aktif kelompok masyarakat/dunia usaha (swasta) untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan;
7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan (RSU, Puskesmas, dan jaringannya);
8. Pemberantasan praktik KKN dan penyalahgunaan wewenang sesuai ketentuan dan perundangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mendorong penumbuhan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah;
9. Peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap sumber daya produktif guna mendorong peningkatan penyediaan lapangan kerja dan berdampak positif terhadap perekonomian daerah;
10. Pembangunan kawasan perkotaan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana;
11. Penguatan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan melalui kerjasama yang intensif aparat penegak hukum dengan seluruh komponen masyarakat guna menangkal setiap ancaman keamanan dan ketertiban.

6.1.3 Kelemahan – Peluang (W-O)

1. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan Kuala Langsa;
2. Pemanfaatan teknologi informasi guna menjaga validitas data indikator pembangunan;
3. Pemerataan pendidikan melalui perluasan akses pendidikan bagi masyarakat;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis/sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan;
5. Peningkatan kerjasama pembangunan dengan berbagai elemen masyarakat;
6. Pembangunan permukiman masyarakat berdasarkan rencana tata ruang wilayah;

7. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
8. Penguatan peran Mukim dan aparatur Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan tugas-tugas sosial kemasyarakatan.

6.2 Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Langsa

Rumusan strategi pembangunan Kota Langsa diperoleh dari analisa SWOT dan diselaraskan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Langsa 2012-2017 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami				
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Misi 1 :				
Menegakkan dan menjalankan Syariat Islam secara kaffah	Melaksanakan Syariat Islam secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat	Berkurangnya kegiatan-kegiatan asusila dan amoral lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam	Peningkatan syiar Islam dan kegiatan keagamaan dalam upaya penguatan akidah dan pemberantasan pelanggaran Syariat Islam	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam setiap kehidupan, baik di rumah tangga, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan pemerintahan
		Meningkatnya peran dan fungsi ulama dalam pemberdayaan ummat dan pengayom dalam kehidupan keagamaan	Penguatan fungsi dan peran ulama dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan yang berkenaan dengan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Melibatkan ulama dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan yang berkenaan dengan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
Misi 2 :				
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, amanah, demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, bersih dan berwibawa (good governance)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (LKIP Pemerintah Kota Langsa dari C menjadi B, serta indeks kepuasan masyarakat)	Peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem kerja instansi dan aparat pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (*good governance*)	Mengoptimalkan profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem kerja instansi dan aparatur pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami				
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Meningkatnya aparatur yang beretos kerja tinggi, profesional, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah;	Pembenahan struktur organisasi Pemerintah Kota Langsa yang efektif dan efisien dalam kerangka tugas dan fungsi yang harmonis sesuai aturan dan perundangan	
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan sistem pelaporan keuangan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional (perolehan WTP)	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas sumber daya aparatur guna memacu peningkatan kinerja dan pelayanan yang prima bagi kepentingan masyarakat	
		Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD);		
		Meningkatnya kemandirian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah (kemampuan keuangan daerah dari rendah menjadi tinggi)	Peningkatan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan dengan memperhatikan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi	Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk melakukan intensifikasi PAD sesuai qanun dan perundangan

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami				
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Misi 3 :				
Mewujudkan penataan ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib dan BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman);	Menciptakan tata ruang kota serta pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman);	Meningkatnya pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana	Penataan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, efektif, integratif, produktif, dan berkelanjutan	Mengembangkan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, efektif, integratif, produktif, dan berkelanjutan sesuai RTRW Kota Langsa
		Meningkatnya pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman)	Penataan pusat pasar dan perdagangan di Kota Langsa yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman)	Mengembangkan pusat pasar dan perdagangan di Kota Langsa yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman) guna mendorong aktivitas perdagangan dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Misi 4 :				
Mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta ketahanan budaya daerah;	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Kota Langsa yang berkualitas dan berdaya saing serta menguatkan ketahanan budaya daerah guna mendorong percepatan pembangunan;	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan (rata-rata lama sekolah dari 10,43 tahun menjadi 11,51 tahun)	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai SPM pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional, melalui pemerataan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan

Visi : **Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami**				
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Meningkatnya kualifikasi dan kompotensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas (persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV dari 71,16 % menjadi 90,79%)		
		Berkembangnya budaya daerah dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan daerah	Pelestarian budaya daerah dan kearifan lokal dalam mendorong penguatan ketahanan budaya daerah dan mendukung pencapaian Kota Langsa berperadaban	Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya daerah termasuk pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan pola perilaku yang tidak sesuai dengan norma, adat-istiadat, dan budaya leluhur daerah guna menuju kemajuan, kemandirian dan ketahanan budaya daerah yang mendukung pembangunan daerah dan Syariat Islam

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami				
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Misi 5 :				
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Kota Langsa yang berperadaban;	Meningkatnya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau (angka harapan hidup 68,75 tahun menjadi 68,88 tahun)	Pemerataan layanan kesehatan berkualitas sesuai dengan SPM Kesehatan dalam upaya peningkaran derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan cakupan layanan kesehatan berkualitas yang merata sesuai SPM Kesehatan
		Meningkatnya pelayanan administrasi publik yang baik dan cepat (pengurusan izin 7 hari)	Peningkatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan secara cepat dan berkualitas	Mempercepat proses pelayanan adminiatrasi perizinan dan non perizinan secara cepat dan berkualitas
Misi 6 :				
Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas guna mendorong percepatan pengembangan kota dan wilayah;	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur guna mendorong percepatan pengembangan Kota dan wilayah;	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan publik perkotaan dan wilayah yang berkualitas;	Percepatan revitalisasi dan relokasi BLUD RSUD Langsa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas	Melakukan percepatan revitalisasi dan relokasi BLUD RSUD Langsa achagai salah saru rumah sakit regional wilayah timur Aceh
		Meningkatnya sarana dan prasarana pelabuhan Kuala Langsa yang menadsi dalam mendukung aktivitas perdagangan ekspor dan impor;	Pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa	Meningkatkan kualitas infrastruktur Pelabuhan Kuala Langsa dalam rangka mendorong aktivitas perdagangan ekspor impor

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami				
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Meningkatnya distribusi air bersih yang memadai dalam upaya pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat	Pembangunan jaringan air bersih dalam upaya meningkatkan pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat	Membangun jaringan air bersih yang integral dan terpadu dalam upaya meningkatkan pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat dan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goal/MDGs)
		Meningkatnya pelayanan jasa transportasi yang efisien, ekonomis, dan aman.	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan transportasi kota	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang efektif dan efisien yang menghubungkan antargampong dan antarwilayah
Misi 7 :				
Mendorong peningkatan UMKM dan membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan;	Menguatkan kapasitas UMKM dan membangun ekonomi kerakyatan berlandaskan potensi sumber daya ekonomi lokal;	Meningkatnya kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi kota;	Peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap sumber daya produktif (permodalan, sarana produksi, teknologi, informasi, dan pemasaran) guna mendorong peningkatan penyediaan lapangan kerja dan berdampak positif terhadap perekonomian daerah	Mendorong dan membangun kemitraan strategis antara BUMN, pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah dalam rangka pengembangan koperasi UMKM

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami				
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Meningkatnya kapasitas produksi perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan;	Pembinaan dan pendampingan nelayan guna meningkatkan kesinambungan pendapatan	Memberdayakan, membina, dan melakukan pendampingan nelayan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesinambungan pendapatan (income generating) masyarakat nelayan
		Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan perkebunan berbasis sumberdaya lokal dan mendukung pengembangan perdagangan ekspor;	Pengembangan sentra-sentra industri potensial sesuai potensi sumberdaya ekonomi lokal (pertanian, perikanan dan perkebunan)	Mempercepat pembangunan sentra-sentra industri potensial sesuai potensi sumberdaya ekonomi lokal (pertanian, perikanan dan perkebunan) termasuk Pembangunan Pabrik Minyak Goreng
		Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan yang ramah lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan		
		Meningkatnya kapasitas produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka mendukung kebutuhan pangan		

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami				
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (4,75 persen menjadi 4,87 persen)	Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Langsa dan pendapatan perkapita masyarakat	Mendorong berkembangnya investasi swasta serta menyelesaikan infrastruktur pendukung ekonomi sesuai dengan potensi sumber daya ekonomi lokal
		Menurunnya tingkat kemiskinan (13,93 persen menjadi 10,62 persen)		
Misi 8 :				
Mewujudkan permukiman masyarakat yang layak huni dan menata lingkungan hidup yang asrasi dan lestari;	Menciptakan permukiman masyarakat layak huni dan penataan lingkungan yang asrasi dan harmonis	Meningkatnya lingkungan permukiman yang berkualitas dalam upaya menciptakan kota tanpa permukiman kumuh	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman masyarakat yang berkualitas
		Meningkatnya kualitas kinerja cakupan pelayanan limbah, dan persampahan (penanganan sampah 14 persen menjadi 75 persen)	Peningkatan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman	Melaksanakan gerakan hidup bersih dan sehat dengan melibatkan masyarakat secara aktif
Misi 9 :				
Menguatkan kapasitas pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat	Mewujudkan kapasitas lembaga pemerintah gampong yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.	Menguatnya kapasitas dan tata kelola kepemerintahan gampong yang baik dalam pelaksanaan pembangunan	Penguatan peran pemerintahan gampong, pemuda dan perempuan dalam tugas-tugas sosial kemasyarakatan	Mengoptimalkan peran Mukim dan aparat Gampong (termasuk tuha peuet, tuha lapan), pemuda dan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami				
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
				dan tugas-tugas sosial kemasyarakatan
		Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 63,38 persen)		
Misi 10 :				
Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan perdamaian sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)	Menciptakan keamanan dan ketertiban serta keterlibatan masyarakat dalam rangka keberlanjutan perdamaian sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)	Meningkatnya kondisi daerah yang aman dan kondusif serta keberlanjutan perdamaian	Penguatan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan serta keberlanjutan perdamaian melalui kerjasama yang intensif aparat penegak hukum dengan seluruh komponen masyarakat guna menangkal setiap ancaman keamanan dan ketertiban di daerah	Membangun kepercayaan (*trust building*) seluruh komponen masyarakat dan stakeholders guna mendorong keberlanjutan perdamaian dan percepatan pembangunan daerah

Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami				
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Meningkatnya kualitas demokrasi dan politik menuju masyarakat yang berkeadilan, tertib, aman dan bermartabat	Peningkatan peran aktif politik masyarakat melalui partai lokal/orsospol/LSM secara demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta bermanfaat dalam menunjang pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan mendorong tumbuhnya demokrasi serta menghargai hak asasi manusia (HAM)

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum pada dasarnya merupakan wujud ataupun bentuk dari kebijakan Pemerintah Kota yang bersifat umum. Keberadaan bentuk kebijakan umum itu sendiri diperlukan untuk menyelaraskan antara konsep rencana pembangunan dengan potensi sumber daya yang dimiliki kota, yang diharapkan mampu mewujudkan pelaksanaan pembangunan kota yang efisien dan efektif, serta dapat berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat kota.

Kebijakan juga merupakan bentuk pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan pembangunan kota dalam jangka menengah ke depan tentunya tidak terlepas dari penilaian keterkaitan antara visi dan misi pembangunan kota dengan isu-isu strategis yang telah ditentukan. Selain itu, kebijakan yang disusun juga menjadi bagian dari strategi pencapaian tujuan dan sasaran maupun visi dan misi pembangunan kota, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing kota melalui pemerintahan yang bersih dan berwibawa, guna **Mewujudkan Langsa Menjadi Kota yang Berperadaban dan Islami.**

Kebijakan umum Pemerintah Kota dalam pembangunan jangka menengah ini hendaknya dapat menjadi acuan bagi segenap SKPK dalam merumuskan program sektoral maupun program lintas sektoral, sehingga dapat dicapai kinerja yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi keberadaannya. Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan kota serta mencermati gambaran umum potensi kota, maka Pemerintah Kota memandang perlu untuk menetapkan arah kebijakan umum dan program pembangunan.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Langsa tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Langsa

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
PENEGAKAN SYARIAT ISLAM					
Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam setiap kehidupan, baik di rumah tangga, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Meningkatnya Syiar Islam	50%	85%	Dinas Syariat Islam
Melibatkan ulama dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan yang berkenaan dengan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Penegakan Qanun Syariat Islam; Meningkatnya Dakwah dan Syiar Islam	50%; 50%	85%; 85%	Dinas Syariat Islam; Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
TATA KELOLA PEMERINTAHAN					
Mengoptimalkan profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem kerja instansi dan aparatur pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan dan Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah	100%	100%	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Representatif	100%	100%	Seluruh Satuan Kerja Perangka Daerah

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Stimulan Bagi Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	100%	Seluruh Satuan Kerja Perangka Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100%	100%	Seluruh Satuan Kerja Perangka Daerah
	Program Pengembangan Data/Informasi	Pemenuhan Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	7 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Kerjasama Pembangunan	Verifikasi Realisasi Fisik, Keuangan terhadap Program dan Kegiatan	1 Dokumen	2 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Penyelesaian Masalah Perbatasan Daerah	3 Desa/Gampong	16 Desa/Gampong	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun/Perwel	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Sekretariat Daerah

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; Dukungan Operasional Pelaksanaan PNPM/P2KP	1 Dokumen; 12 Bulan	6 Dokumen; 48 Bulan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Pekerjaan Umum
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial dan budaya	1 Dokumen	5 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KTP	74,40%	95,23%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengelolaan Arsip Secara Baku	-	17,90%	Sekretariat Dewan
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Pengelolaan Arsip Secara Baku	20,59%	17,90%	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Informasi Berita, Iklan dan Parlementaria	12 Bulan; 12 Bulan; -; -	48 Bulan; 60 Bulan; 12 Bulan; 36 Bulan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Penilaian LKIP Pemerintah Kota Langsa	C	B	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Ran-Qanun yang dibahas	12 Ran-Qanun	55 Ran-Qanun	Sekretariat Dewan
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	452 Kali	1.356 Kali	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Penilaian Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	Dinas Pengelola Keuangan dan Asset; Sekretariat Daerah

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Evaluasi Permasalahan Pembangunan dan Penggunaan dana Tanggap Darurat; Aksi Pengawasan Penyaluran dan Monitroing Kebijakan Subsidi Pemerintah; Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan; Meningkatnya Penilaian Keuangan Daerah	2 Dokumen; 12 Bulan; 0; WTP	8 Dokumen; 60 Bulan; 12 Bulan; WTP	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRK; Inspektorat
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Pengawasan	8 Kali	40 Kali	Inspektorat
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	XVI Triwulan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; Evaluasi Proposal Usulan Masyarakat	12 Bulan; 100 Proposal	48 Bulan; 300 Proposal	Inspektorat; Sekretariat Daerah

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Updating DJK dan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	12 Bulan	60 Bulan	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kerjasama Daerah Dalam Pelayanan Publik; Pelaksanaan MUSDA MPU	133 Orang; 0 Orang	683 Orang; 100 Orang	Sekretariat Daerah; Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Penyusunan produk hukum daerah; Jumlah Pengesahan Judul Ran-Qanun	536 Produk Hukum; 10 Judul	4.278 Produk Hukum; 65 Judul	Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan
	Program Pendidikan Kedinasan	Dukungan Tugas Belajar; Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	35 Orang; 65 Orang	185 Orang; 65 Orang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Sekretariat Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Karir Aparatur; Evaluasi Jabatan dan Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1.000 Orang; 2 Dokumen	1.100 Orang; 24 Dokumen	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Sekretariat Daerah
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG KOTA					

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
Mengembangkan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, efektif, integratif, produktif, dan berkelanjutan sesuai RTRW Kota Langsa	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	80%	89%	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang Seluruh Drainase Primer	55%	75%	Dinas Pekerjaan Umum; Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pelaksanaan Pembangunan Talud/Turap/Bronjong	7 Unit	7 Unit	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	80%	89%	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Informasi Data Base Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	13 Unit	15 Unit	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Banjir	Meningkatnya Kualitas DAS	3 Kegiatan	6 Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Pembangunan Infrastrukcur Perdesaan	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Perdesaan	750 meter	4.115 meter	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan RDTRK, RTRK dan RTBL	1 Dokumen	7 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Ruang	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW; Laporan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	5 Kecamatan; 1 Dokumen	5 Kecamatan; 2 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Sertifikasi Tanah Kepemilikan Pemerintah Daerah	8 Sertifikat	41 Sertifikat	Sekretariat Daerah; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan; Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; Badan Pemberdayaan Masyarakat; Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
Membangun jaringan air bersih yang integral dan terpadu dalam upaya meningkatkan pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat dan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goal/MDGs)	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Banyaknya Pelanggan Air Bersih	10.506 Pelanggan	12.796 Pelanggan	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Air Bagi Petani	2 Unit	2 Unit	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum	31,16%	33,90%	Dinas Pekerjaan Umum; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang efektif dan efisien yang menghubungkan antargampong dan antarwilayah	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	77 LAKA	48 LAKA	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Kenderaan yang Telah Diuji	890 Unit	1.080 Unit	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	77 LAKA	48 LAKA	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan kualitas infrastruktur Pelabuhan Kuala Langsa dalam rangka mendorong aktivitas perdagangan ekspor-impor	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	1 Pelabuhan Laut, 1 Terminal Bis	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
PENDIDIKAN					
Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional, melalui pemerataan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Cakupan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini	41,41%	57,95%	Dinas Pendidikan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,09%	100%	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	86,17%	100%	Dinas Pendidikan
	Program Pendidikan Menengah	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK	98,40%	99,75%	Dinas Pendidikan

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	99,31%	99,56%	Dinas Pendidikan; Dinas Syariat Islam; Sekretariat Majelis Permuayawaratan Ulama
	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	85%	86%	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	71,16%	90,79	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	7.728 Kunjungan	68.612 Kunjungan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Kerjasama Kelembagaan Bidang Pendidikan	75%; -; 75%	95%; 95%; 80%	Dinas Pendidikan; Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah; Sekretariat Daerah
PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS					
Meningkatkan cakupan layanan kesehatan berkualitas yang merata sesuai SPM Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan Buffer Stock Obat; Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	20%; 30%	30%; 30%	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Perbaikan Gizi BALITA dan BUMIL KEK	477 Orang	1.761 Orang	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Jajanan Sekolah	26 Sekolah	26 Sekolah	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pola Hidup Sehat	40 Penayangan	40 Penayangan	Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Gizi Buruk	1 Balita	1 Balita	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pelaksanaan Uji Lab Limbah Cair dan Emisi Pada Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5 Puskesmas	5 Puskesmas	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	5 Puskesmas; -	5 Puskesmas; Terakreditasi	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	5 Puskesmas	5 Puskesmas	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	5 Puskesmas; 8 Pustu; 52 Polindes	5 Puskesmas; 8 Pustu; 52 Polindes	Dinas Kesehatan
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1 RSUD	1 RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Jaminan Kesehatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Menurunnya Angka Kematian Bayi	4 Bayi	5 Bayi	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	68,75 Tahun	68,88 Tahun	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan PertolonganPersalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	89,34%	97,68%	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 RSUD	1 RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Ibu dan Balita	Menurunnya Angka Kematian Ibu	2 Orang	1 Orang	Dinas Kesehatan
Melakukan percepatan revitalisasi dan relokasi BLUD RSUD Langsa sebagai salah satu rumah sakit regional wilayah timur Aceh	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1 RSUD	1 RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
Mempercepat proses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan secara cepat dan berkualitas	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Perizinan	Lamanya Proses Perizinan	7 hari	7 hari	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN					
Mendorong dan membangun kemitraan strategis antara BUMN, pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah dalam rangka pengembangan koperasi UMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif	Dukungan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	25 Kelompok	55 Kelompok	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rekomendasi Dukungan Usaha/Industri Kecil Menengah	4.000 Rekomendasi	8.000 Rekomendasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dukungan Industri Kecil Menengah	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Dinas Perinduatrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	9,88%	65,54%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Mendorong berkembangnya investasi swasta serta menyelesaikan infrastruktur pendukung ekonomi sesuai dengan potensi sumber daya ekonomi lokal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Penerbitan SIUP dan TDUP	490 Izin	710 Izin	Sekretariat Daerah; Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Sistem Informasi Investasi Daerah	-	1 Aplikasi	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Mempercepat pembangunan sentra-sentra industri potensial sesuai potensi sumberdaya ekonomi lokal (pertanian, perikanan dan perkebunan) termasuk Pembangunan Pabrik Minyak Goreng	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	101,14 poin	104 poin	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Produktifitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	0,36%	0,36%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Promosi Hasil Pengolahan Pertanian dan Perkebunan	1 Kali	5 Kali	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	8 Unit	30 Unit	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,50%	5,21%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Temu Tekhnis Tenaga Penyuluh	24 Kali	120 Kali	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Penyediaan Sarana Medis Kesehatan Ternak	-	24 Bulan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,50%	5,21%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,50%	5,21%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	5,50%	5,21%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan	12 Bulan	60 Bulan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Pengawasan Hutan dan Lahan	12 Bulan	48 Bulan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (ADHB)	0,26%	0,21%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
Memberdayakan, membina, dan melakukan pendampingan nelayan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesinambungan pendapatan (income generating) masyarakat nelayan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (ADHB)	3,62%	4,02%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (ADHB)	3,62%	4,02%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (ADHB)	3,62%	4,02%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk melakukan intensifikasi PAD sesuai qanun dan perundangan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB)	2%	6,76%	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB)	2%	6,76%	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
Mengembangkan pusat pasar dan perdagangan di Kota Langsa yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman) guna mendorong aktivitas perdagangan dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	12 Bulan	60 Bulan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan Pameran Hasil UKM dan IKM	2 Kali	10 Kali	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal	590 Pedagang	680 Pedagang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	301 IKM	445 IKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Pertumbuhan Industri	23,47%	50,96%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya Angka Kemiskinan	13,93%	10,62%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk; Sekretariat Daerah; Sekretariat Baitul Mal
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	40 Orang	90 Orang	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Pengangguran	6.720 Orang	5.135 Orang	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
PENATAAN PERMUKIMAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP					
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman masyarakat yang berkualitas	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu	5	466	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran; Monitoring Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	0,0038%; 12 Kali	0,0037%; 12 Kali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (ADHB)	0,55%	0,52%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Kontribusi Sektor Listrik dan Gas Terhadap PDRB	0,16%	0,16%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pengembangan Wilayah Trasmigrasi	Mobilisasi Penduduk Lokal	-	150 KK	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
	Program Transmigrasi Lokal	Pemberdayaan Transmigran Lokal	-	100 Orang	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
Melaksanakan gerakan hidup bersih dan sehat dengan melibatkan masyarakat secara aktif	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Penanganan Persampahan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB)	2,00%	6,76%	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Pengendalian Pengawasan RTH	12 Bulan	60 Bulan	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
SOSIAL KEMASYARAKATAN					
Mengoptimalkan peran Mukim dan aparat Gampong (termasuk tuha peuet, tuha lapan), pemuda dan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan tugas-tugas sosial kemasyarakatan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Sosialisasi dan Pelatihan Terhadap Anak Putus Sekolah	66 Desa/Gampong	66 Desa/Gampong	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelaksanaan Forum Anak	23 Orang	197 Orang	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Kasus KDRT	21 KDRT	58 KDRT	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Didalam Lembaga Pemerintahan	64,11%	63,38%	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
	Progrum Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	79%	83%	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Cakupan Peserta KB Aktif	79%	83%	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Bagi Keluarga Kurang Mampu	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	8,67%	41,83%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Penyediaan Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	4 Unit	4 Unit	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah Penyandang Cacat	221 Orang	442 Orang	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Panti Asuhan	12 Bulan	60 Bulan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Meningkatnya Kualitas Hidup Eks Penyandang Penyakit Sosial	13 Bulan	48 Bulan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12 Bulan	60 Bulan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Pelatihan Pemuda Gampong	-	66 Orang	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Diklat dan Pemberdayaan Pemuda	42 Orang	542 Orang	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Pelaksanaan Pembinaan Cabang Olah Raga	31 Cabang Olah Raga	32 Cabang Olah Raga	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	-	13 Cabang Olah Raga	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna; Meningkatnya Pelaksanaan Syariat Islam	3 Even; 5 Kecamatan	3 Even; 5 Kecamatan	Badan Pemberdayaan Masyarakat; Dinas Syariat Islam; Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pembinaan Lembaga Masyarakat Pedesaan	66 Desa/Gampong	66 Desa/Gampong	Badan Pemberdayaan Masyarakat
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Kali	5 Kali	Badan Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa	66 Desa/Gampong	66 Desa/Gampong	Badan Pemberdayaan Masyarakat; Sekretariat Daerah
Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya daerah termasuk pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan pola perilaku yang tidak sesuai dengan norma, adat-istiadat, dan budaya leluhur daerah guna menuju kemajuan, kemandirian dan ketahanan budaya daerah yang mendukung pembangunan daerah dan Syariat Islam	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya; Pengembangan Seni dan Budaya dalam Bidang Pendidikan; Pengkaderan Ulama	14 Kali	89 Kali	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; Sekretariat Majelis Adat Aceh; Sekretariat Daerah; Dinas Pendidikan; Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	6 Kali	6 Kali	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
KEAMANAN DAN PERDAMAIAN					

Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	SKPD Penanggung Jawab
Membangun kepercayaan (trust building) seluruh komponen masyarakat dan stakeholders guna mendorong keberlanjutan perdamaian dan percepatan pembangunan daerah	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan); Jumlah Pelanggaran Qanun (Syariat Islam); Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100 Pelanggaran; 617 Pelanggaran	195 Pelanggaran; 500 Pelanggaran	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas; Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; Sekretariat Dewan
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Pengamanan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Qanun	-	36 Kali	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Forum Kerukunan Umat Beragama; Peringatan Hari Besar Islam; Sosialisasi Toleransi Dalam Kehidupan Beragama	1 Tahun; 12 Kali; 60 Orang	5 Tahun; 111 Kali; 120 Orang	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas; Sekretariat Daerah; Dinas Syariat Islam
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP	1 Tahun	1 Tahun	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
Meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan mendorong tumbuhnya demokrasi serta menghargai hak azasi manusia (HAM)	Sosialisasi, Penyuluhan dan Verifikasi Pemilu Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum; Seleksi Anggota KIP dan Panwas PEMILU	-\ -	12 Bulan; 25 Orang	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas; Sekretariat Dewan

7.2 Midterm Review Pelaksanaan RPJM 2012-2017

Program yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2012-2014 yang telah ditetapkan melalui Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 merupakan acuan yang harus dipedomani oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kota (SKPK). Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah yang sangat dinamis, perlunya dilakukan review dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Menyelaraskan target-target tahunan indikator kinerja daerah dengan perkembangan hasil pembangunan;
2. Menyesuaikan prediksi keuangan daerah dengan asumsi-asumsi keuangan terkini;
3. Memperjelas definisi setiap pernyataan tujuan, strategi, kebijakan dan indikator kinerja daerah;
4. Mencantumkan prakiraan kebutuhan pendanaan sampai dengan tahun 2017 per tahun per program sesuai dengan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMK Tahun 2012-2017;
5. Menyesuaikan nomenklatur organisasi perangkat daerah dengan kondisi terkini; dan
6. Penyesuaian program RPJM Daerah akibat ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJM 2007-2012 perlu untuk direview.

Hasil review RPJM 2012-2017 diharapkan tidak hanya dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pemerintah Kota Langsa, tetapi juga menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan lanjutan pada tahun 2016-2017. Review RPJM dilaksanakan dengan mengikuti beberapa kriteria yang digambarkan pada gambar 7.1, dimana program dan kegiatan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kuadran yakni kuadran I, II, III dan IV dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kuadran I berisi program/kegiatan prioritas yang ada dalam RPJMK Langsa Tahun 2012-2017, namun tidak dilaksanakan dalam APBK;

2. Kuadran II adalah program/kegiatan prioritas yang ada dalam RPJMK Langsa Tahun 2012-2017 dan sudah tuntas dilaksanakan pada periode tahun 2013-2015;
3. Kuadran III berisi program/kegiatan yang terdapat dalam RPJMK Langsa Tahun 2012-2017, tetapi pelaksanaannya belum tuntas dilaksanakan;
4. Sedangkan Kuadran IV berisi program/kegiatan yang tidak ada dalam RPJMK Langsa Tahun 2012-2017, tetapi dilaksanakan pada tahun 2013 - 2015 dan masih perlu dituntaskan pada tahun 2016-2017.

Gambar 7.1
Skema Kuadran dan Kriteria Review Program RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017

KWADRAN I (10,45%) Program yang ada dalam RPJMK namun tidak dilaksanakan dalam APBK	KWADRAN II (0%) Program yang ada dalam RPJMK dan sudah tuntas dilaksanakan periode 2013-2015
KWADRAN IV (5,65%) Program yang tidak ada dalam RPJMK tetapi dilaksanakan dan masih perlu dituntaskan	KWADRAN III (83,90%) Program yang ada dalam RPJMK dan belum tuntas dilaksanakan

7.3 Review dan Penyesuaian RPJM Kota Langsa 2012-2017

Review RPJMK Tahun 2012-2017 dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian target, penghapusan program yang tidak prioritas lagi untuk dilaksanakan, dan penambahan program prioritas baru yang sebelumnya telah dilaksanakan pada periode 2012-2015 tetapi belum ada pada RPJMK Langsa Tahun 2012 2017.

Hasil review dan penyesuaian RPJMK Langsa Tahun 2012-2017 berdasarkan Prioritas Pembangunan menunjukkan bahwa pada awalnya total program yang telah ditetapkan sebanyak 334 program, maka setelah direvisi total program tersebut berubah menjadi 314 program. Perubahan jumlah program ini diperoleh dengan asumsi program yang terdapat pada kwadran I tidak dilaksanakan meskipun tercatat pada tabel 8.1.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1 Indikasi Program Prioritas

Sesuai dengan kaidah perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, program prioritas harus dipisahkan antara aspek strategis dan operasional ke dalam dua hal, yaitu pertama, program prioritas untuk perencanaan strategis dan kedua, program prioritas untuk perencanaan operasional.

Adapun program prioritas yang ditujukan atau dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pada dasarnya adalah perencanaan operasional, suatu urusan pemerintahan daerah dinilai strategis, sangat tergantung pada tujuan dan sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya. Urusan tersebut dapat saja menjadi strategis dalam satu tahun pelaksanaan, yang selanjutnya menjadi operasional pada tahun atau pada periode-periode berikutnya.

Seiring dengan itu, suatu urusan pemerintahan atau program-program/kegiatan dalam urusan itu dinilai strategis, maka perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan, intensitasnya menjadi lebih tinggi, dibanding dengan yang bersifat operasional. Ini dimaksudkan karena program/kegiatannya memiliki dampak luas terhadap manfaat bagi masyarakat di samping memiliki pengaruh positif bagi penyelesaian permasalahan lain yang timbul bila program/kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Program-program prioritas, baik program strategis maupun program-program operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPK berkenaan. Akan tetapi, bagi suatu program yang termasuk dalam kategori strategik menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPK dengan Kepala Daerah, terutama pada level penetapan kebijakan.

Sementara, pada penyelenggaraan aspek strategis, program-program prioritas bagi pelaksanaan urusan pemerintahan, dilaksanakan agar setiap urusan yang tergolong dalam urusan wajib dapat dilaksanakan setiap tahun, tanpa dipengaruhi oleh visi-misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan tersebut

yang secara tidak langsung mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, bukan berarti bahwa urusan lain diabaikan dan dikesampingkan. Semuanya harus bermuara kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Semua ketentuan-ketentuan ini pada prinsipnya telah dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Kota, meski tidak tertuang jelas dalam dokumen perencanaan-perencanaan sebelumnya.

Identifikasi program-program prioritas, baik menyangkut urusan wajib maupun pilihan yang akan diimplementasikan SKPK berpedoman pada program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih, disamping juga memperhatikan hasil identifikasi permasalahan pembangunan, serta berbagai isu strategis yang mengemuka pada saat ini.

Program pembangunan kota periode 2012-2017 diarahkan untuk melaksanakan program-program yang termasuk ke dalam prioritas pembangunan. Program prioritas pembangunan adalah program pembangunan yang harus segera diselesaikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Program prioritas pembangunan didasarkan karena (1) adanya keterbatasan dana yang tersedia; (2) adanya sarana dan prasarana yang telah ada yang masih dimanfaatkan; (3) adanya permasalahan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan; serta (4) adanya komponen kawasan yang mempunyai *multiplier effect* yang besar untuk merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya jaringan jalan.

8.2 Pendanaan

Pagu indikatif program adalah jumlah dana yang mampu dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk mendanai program prioritas tahunan, yang perhitungannya didasarkan pada satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempermudah perhitungan pengalokasian pagu pendanaan secara indikatif, terlebih dahulu disusun pagu indikatif, baik untuk urusan wajib dan urusan pilihan.

Dengan memperhatikan visi dan misi kota periode 2012-2017, maka program beserta pendanaannya berdasarkan prioritas pembangunan kota dapat dilihat pada tabel 8.1 :

TABEL 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA LANGSA

KODE	INDIKASI USULAN PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013		2014		2015		2016		2017				
				TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 5+7+9+11+13	16 = 6+8+10+12+14	17
01	LAYANAN WAJIB				202.408.900.000		279.114.900.000		600.250.400.000		230.030.725.000		420.744.040.000		1.932.348.965.000	
01 01	BIDANG PENDIDIKAN				20.900.000.000		27.987.000.000		100.250.000.000		30.840.000.000		93.000.000.000		382.978.000.000	
01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Dan Optimalisasi Unit Kerja Sekretariat Terlayani	100,00 %	100,00 %	3.240.000.000	100,00 %	3.240.000.000	100,00 %	3.240.000.000	100,00 %	3.240.000.000	100,00 %	3.240.000.000	100,00 %	16.200.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur						100,00 %	200.000.000	100,00 %	200.000.000	100,00 %	200.000.000	100,00 %	800.000.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksana Disiplin Pegawai Sesuai Aturan	100,00 %	100,00 %	1.000.000.000									100,00 %	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Pegawai	100,00 %					100,00 %	90.000.000	100,00 %	120.000.000	100,00 %	90.000.000	100,00 %	400.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 05	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksana Pemeliharaan rutin/berkala sarana aparatur	45,00 %	45,00 %	200.000.000	50,00 %	1.000.000.000	55,00 %	1.200.000.000	60,00 %	700.000.000	65,00 %	1.200.000.000	65,00 %	4.300.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 06	Program Kerjasama Pendidikan Dalam Negeri dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama (A1)	90,00 %	100,00 %	1.000.000.000	100,00 %	3.000.000.000	100,00 %	3.000.000.000	100,00 %	3.000.000.000	100,00 %	4.000.000.000	100,00 %	14.000.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Kerjasama (A2)	90,00 %	90,00 %	2.000.000.000	95,00 %	12.000.000.000	100,00 %	12.000.000.000	100,00 %	12.000.000.000	95,00 %	12.000.000.000	95,00 %	50.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 07	Program Pendidikan Menengah	Angka Melanjut (A3)	90,00 %	95,00 %	3.000.000.000	95,00 %	12.000.000.000	95,00 %	12.000.000.000	95,00 %	12.000.000.000	95,00 %	12.000.000.000	95,00 %	48.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 08	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melanjut (A4)	90,00 %	90,00 %	2.000.000.000	90,00 %	8.000.000.000	90,00 %	8.000.000.000	90,00 %	8.000.000.000	90,00 %	8.000.000.000	90,00 %	32.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 09	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	85,00 %			90,00 %	1.000.000.000	95,00 %	1.000.000.000			95,00 %	1.000.000.000	95,00 %	3.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 10	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				85,00 %	2.000.000.000			95,00 %	2.000.000.000	95,00 %	2.000.000.000	95,00 %	6.000.000.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01 01 11	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	85,00 %							85,00 %	2.000.000.000	85,00 %	2.000.000.000	85,00 %	4.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik (A5)	97,00 %			98,00 %	900.000.000	97,00 %	100.000.000	98,00 %	120.000.000	99,00 %	100.000.000	99,00 %	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 13	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal	Jumlah PAUD (A6)	3.750 Orang/tahun	3.750 Orang/tahun	200.000.000	12.750 Orang/tahun	200.000.000	13.000 Orang/tahun	200.000.000	13.250 Orang/tahun	200.000.000	13.500 Orang/tahun	200.000.000	13.500 Orang/tahun	800.000.000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Budaya
01 01 14	Program Pendidikan Kesetaraan	Meningkatnya Kesetaraan Pendidikan	98,00 %	98,00 %	100.000.000	98,00 %	500.000.000	98,00 %	500.000.000	98,00 %	500.000.000	98,00 %	500.000.000	98,00 %	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini														Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01 01 16	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini										45,00 %	2.000.000.000	45,00 %	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 17	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Pendidikan Non Formal	85,00 %			90,00 %	1.000.000.000	95,00 %	1.000.000.000	95,00 %	1.000.000.000	95,00 %	1.000.000.000	95,00 %	4.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Pendidikan Non Formal				85,00 %	2.000.000.000			95,00 %	2.000.000.000	95,00 %	2.000.000.000	95,00 %	6.000.000.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01 01 19	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	85,00 %							85,00 %	2.000.000.000	85,00 %	2.000.000.000	85,00 %	4.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik (A5)	97,00 %			98,00 %	900.000.000	97,00 %	100.000.000	98,00 %	120.000.000	99,00 %	100.000.000	99,00 %	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 21	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal	Jumlah PAUD (A6)	3.750 Orang/tahun	3.750 Orang/tahun	200.000.000	12.750 Orang/tahun	200.000.000	13.000 Orang/tahun	200.000.000	13.250 Orang/tahun	200.000.000	13.500 Orang/tahun	200.000.000	13.500 Orang/tahun	800.000.000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Budaya
01 01 22	Program Pendidikan Kesetaraan	Meningkatnya Kesetaraan Pendidikan	98,00 %	98,00 %	100.000.000	98,00 %	500.000.000	98,00 %	500.000.000	98,00 %	500.000.000	98,00 %	500.000.000	98,00 %	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 23	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini														Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01 01 24	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Pendidikan Non Formal	85,00 %			90,00 %	1.000.000.000	95,00 %	1.000.000.000	95,00 %	1.000.000.000	95,00 %	1.000.000.000	95,00 %	4.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 01 25	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Pendidikan Non Formal				85,00 %	2.000.000.000			95,00 %	2.000.000.000	95,00 %	2.000.000.000	95,00 %	6.000.000.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01 01 26	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	85,00 %							85,00 %	2.000.000.000	85,00 %	2.000.000.000	85,00 %	4.000.000.000	Dinas Pendidikan
01 02	BIDANG KESEHATAN				23.200.000.000		30.360.000.000		130.300.000.000		150.300.000.000		330.000.000.000		664.000.000.000	
01 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Dan Optimalisasi Unit Kerja Sekretariat Terlayani	100,00 %	100,00 %	2.900.000.000	100,00 %	3.000.000.000	100,00 %	3.000.000.000	100,00 %	3.000.000.000	100,00 %	3.000.000.000	100,00 %	15.000.000.000	Dinas Kesehatan

KODE	SCRAPO UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020				
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 6+7+9+11+13	16 = 6+8+10+12+14	17
01 02 01	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Perempuan Aktif yang Berperan Dalam	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000	110,00 %	1.100.000.000	120,00 %	1.200.000.000	130,00 %	1.300.000.000	140,00 %	1.400.000.000	140,00 %	6.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan
01 02 02	Program Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Dan Pelanggaran Yang Diselesaikan	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000	110,00 %	1.100.000.000	120,00 %	1.200.000.000	130,00 %	1.300.000.000	140,00 %	1.400.000.000	140,00 %	6.000.000.000	Dinas Pemberdayaan
01 02 03	Program Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan	Persentase Kasus Dan Pelanggaran Yang Diselesaikan	100,00 %	100,00 %	1.000.000.000	100,00 %	1.100.000.000	120,00 %	1.200.000.000	130,00 %	1.300.000.000	140,00 %	1.400.000.000	140,00 %	6.000.000.000	Dinas Pemberdayaan
01 02 04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Ibu Pengelolaan Kasus Anak	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000	110,00 %	1.100.000.000	120,00 %	1.200.000.000	130,00 %	1.300.000.000	140,00 %	1.400.000.000	140,00 %	6.000.000.000	Dinas Pemberdayaan
01 02 05	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	Persentase Ibu Pengelolaan Kasus Anak	100,00 %	100,00 %	1.000.000.000	100,00 %	1.100.000.000	120,00 %	1.200.000.000	130,00 %	1.300.000.000	140,00 %	1.400.000.000	140,00 %	6.000.000.000	Dinas Pemberdayaan
01 02 06	Program Peningkatan Kapasitas Pranata Cinta Keluarga	Persentase Cinta Keluarga (CCK) Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 07	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %													Dinas Pemberdayaan
01 02 08	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 09	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 10	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 11	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 12	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 13	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 14	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 15	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 16	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 17	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 18	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 19	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 20	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 21	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 22	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 23	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 24	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 25	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 26	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 27	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 28	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 29	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan
01 02 30	Program Pembinaan Perkoperasian Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	54,00 %	110,00 %	1.000.000.000											Dinas Pemberdayaan

KODE	DINAS/ BADAN/ KANTOR/ RSUD/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		MAPO PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029				
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=5+7+9+11+13	16=6+8+10+12+14	17
01 02 03	Program Pembangunan Pelayanan Kesehatan Lainnya	Meningkatnya Angka Cakupan Pelayanan	98,75 %	98,75 %	40.000.000	-	-	-	-	-	-	100 %	40.000.000	100 %	80.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 22	Program Pembangunan Rumah Sakit dan Pelayanan Kesehatan	Cakupan	89,00 %	89,00 %	1.871.313.000	90,00 %	2.000.000.000			92,00 %	2.100.000.000			92,00 %	5.971.313.000	Dinas Kesehatan
01 02 23	Program Pembangunan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan	1,00 %	-	-	1,00 %	1.000.000.000	1,00 %	800.000.000	1,00 %	900.000.000	1,00 %	1.000.000.000	1,00 %	3.900.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Parepare
01 02 24	Program Pembangunan Kesehatan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Orang	-	-	1 Orang	975.000.000	-	-	-	-	1 Orang	975.000.000	1 Orang	975.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Parepare
01 02 25	Program Pembangunan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah Parepare
01 06	BIDANG PENDIDIKAN UMUM				37.651.149.440,00		31.837.972.000		48.511.000.000		50.311.000.000		43.000.000.000		231.300.121.440	
01 06 01	Program Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	100,00 %	100,00 %	1.000.000.00	100,00 %	1.000.000.000	100,00 %	1.000.000.000	100,00 %	1.000.000.000	100,00 %	1.000.000.000	100,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 02	Program Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	100,00 %	100,00 %	1.000.000.000	100,00 %	11.000.000.000	100,00 %	12.100.000.000	100,00 %	13.310.000.000	100,00 %	14.641.000.000	100,00 %	52.051.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 05	Program Peningkatan Kualitas Pendidik	Meningkatnya Kualitas Pendidik	100,00 %	100,00 %	41.651.149	-	-	-	-	-	-	100,00 %	42.000.000	100,00 %	83.651.149	Dinas Pelayanan Umum
01 06 15	Program Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	82,00 %	79,00 %	6.048.482.000	83,00 %	10.000.000.000	85,00 %	10.500.000.000	85,00 %	10.500.000.000	85,00 %	10.500.000.000	85,00 %	47.048.482.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 16	Program Penyelenggaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	82,00 %	83,00 %	4.608.482.000	83,00 %	11.000.000.000	85,00 %	9.500.000.000	85,00 %	9.500.000.000	85,00 %	9.500.000.000	85,00 %	44.108.482.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 17	Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00 %	1.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 18	Program Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	7 Unit	7 Unit	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 Unit	600.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 19	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00 %	1.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 20	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 21	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 22	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 23	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 24	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 25	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 26	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 27	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 28	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 29	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 30	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 31	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 32	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 33	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 34	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 35	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 36	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 37	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 38	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 39	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 40	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 41	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 42	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 43	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 44	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 45	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 46	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 47	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 48	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 49	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 50	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 51	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 52	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 53	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 54	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 55	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 56	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 57	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 58	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 59	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 60	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 61	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 62	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 63	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 64	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 65	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 66	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 67	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 68	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 69	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 70	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 71	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 72	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 73	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 74	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 75	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 76	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 77	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 78	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 79	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 80	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 81	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 82	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 83	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 84	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 85	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 86	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 87	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 88	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 89	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 90	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayanan Minimal	85,00 %	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	1.000.000.000	85,00 %	5.000.000.000	Dinas Pelayanan Umum
01 06 91	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlayaninya Anak Usia Dini Sesuai Standar Pelayan

KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT PENANGGUNG JAWAB
			2013*		2014*		2015*		2016		2017				
			TARGET	Rp.(	TARGET	Rp.(	TARGET	Rp.(	TARGET	Rp.(	TARGET	Rp.(	TARGET	Rp.(	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 4+6+8+10+12+14	16 = 5+7+9+11+13+15	17

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN (2019)	CAPAIAN KINERJA, PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2016*		2017*		2018*		2019		2020				
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 9+11+13	16 = 10+12+14	17

KODE	KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/KEWENANGAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET KINERJA PADA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		KODE PERANGKAT DAERAH
				2015		2016		2017		2018		2019				
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 5+7+9+11+13	16 = 6+8+10+12+14	17
01	00	00														
01	00	00														
01	00	00													

KODE	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DAN PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PADA AWAL RPJMD 2021	CAPAIAN SISTEMA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		KODE PERANGKAT DAERAH
				2021*		2022*		2023		2024		2025				
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 9+10+11+12+13	16 = 9+10+11+12+14	17
01	01 01	Program Administrasi Pengelolaan Kantor, Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah	Jumlah Aset Tetap Terpelihara dengan Baik	5 Dokumen	5 Dokumen	1,000,000,000	5 Dokumen	1,077,423,000	5 Dokumen	1,238,540,000	5 Dokumen	1,424,321,000	5 Dokumen	1,638,469,000	25 Dokumen	11,968,753,000	5.01.01.2.01.0001
01	01 02	Program Peningkatan Pengelolaan Kantor, Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah	Jumlah Aset Tetap Terpelihara dengan Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Dokumen	467,000,000	5 Dokumen	467,000,000	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
01	01 03	Program Penataan Pengelolaan, Pemeliharaan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	Jumlah Aset Tetap Terpelihara dengan Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
01	01 04	Program Pengelolaan Pengelolaan, Pemeliharaan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	Jumlah Aset Tetap Terpelihara dengan Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	467,000,000	1 Dokumen	467,000,000	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
01	02	KEGIATAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				1,478,731,250		1,550,000,000		800,000,000		787,500,000		1,000,000,000		5,000,000,000	
01	02 01	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan	100,00 %	100,00 %	1,478,731,250	100,00 %	1,550,000,000	100,00 %	800,000,000	100,00 %	787,500,000	100,00 %	1,000,000,000	100,00 %	5,000,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01	02 02	Program Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan Aparatur	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100,00 %	100,00 %	80,000,000	100,00 %	80,000,000	100,00 %	80,000,000	100,00 %	80,000,000	100,00 %	80,000,000	100,00 %	400,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01	02 03	Program Pembinaan Pencatatan Sipil Aparatur	Cakupan Pembinaan Pencatatan Sipil	100,00 %	100,00 %	20,000,000							100,00 %	20,000,000	100,00 %	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01	02 04	Program Pemanfaatan Administrasi Kependudukan	Cakupan Data SIAK	97,00 %	97,00 %	50,000,000	97,00 %	50,000,000	97,00 %	50,000,000	97,00 %	50,000,000	97,00 %	50,000,000	97,00 %	250,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01	03	KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3,000,000,000		3,110,581,000		3,041,000,000		3,000,000,000		1,000,000,000		10,041,000,000	
01	03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Data Gender dan Anak Tersedia	100,00 %	100,00 %	2,000,000,000	100,00 %	2,110,581,000	100,00 %	2,041,000,000	100,00 %	2,000,000,000	100,00 %	1,000,000,000	100,00 %	10,041,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01	03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	100,00 %	100,00 %	1,000,000,000	100,00 %	1,000,000,000	100,00 %	1,000,000,000	100,00 %	1,000,000,000	100,00 %	1,000,000,000	100,00 %	5,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01	03 03	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Lembaga Pengarusutamaan Gender dan Anak	100,00 %	100,00 %	100,000,000	100,00 %	100,000,000	100,00 %	100,000,000	100,00 %	100,000,000	100,00 %	100,000,000	100,00 %	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01	03 04	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100,00 %	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01	03 05	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Cakupan Peran Serta Masyarakat	100,00 %	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01	03 06	Program Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100,00 %	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01	03 07	Program Perlindungan Perempuan dari Kekerasan dan Perlindungan Anak	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	100,00 %	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	30,000,000	100,00 %	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMKAB/KOTA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIOD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2017*		2018*		2019*		2016		2017				
				TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=2017+2018+19	16=2016+2017+2019	17
1 1 14	Program Pembangunan Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan	85,14 %	86,55%	250.000.000	90,30 %	174.300.000	93,33 %	190.167.631	13,56 %	330.000.000	40,28 %	194.300.000	13,56 %	1.934.467.631	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01 12	**BIDANG KESEHATAN, KESEHATAN MASYARAKAT**				**970.850.000**		**988.598.000**		**2.313.000.000**		**1.125.000.000**		**1.970.110.000**		**8.308.708.000**	
01 13 15	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pasien RS Abdi	75,55 %	75,55 %	66.650.000	79,30 %	967.021.000	83,33 %	1.200.000.000	91,67 %	1.125.000.000	83,33%	1.416.110.000	100,00 %	5.464.671.000	Dinas Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
01 13 16	[illegible]	[illegible]	75,55 %	75,55 %	18.000.000	75,55%	22.598.000	87,77 %	25.000.000	61,00 %	25.000.000	93,33 %	50.000.000	100,00 %	140.000.000	Dinas Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
01 13	**BIDANG SOSIAL**				**3.010.000.000**		**7.661.000.000**		**9.200.000.000**		**7.500.000.000**		**8.000.000.000**		**35.310.000.000**	
01 24 31	Program Pengelolaan Kekayaan Perpustakaan	Cakupan Pelayanan Dan Operasional Unit Kerja Sesuai Standar Pelayanan Minimal	100,00 %	100,00 %	943.937.337	100,00 %	1.077.021.841	100,00 %	1.250.737.000	100,00 %	950.000.000	100,00 %	1.000.000.000	100,00 %	5.343.016.337	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
01 28 32	Program Pengelolaan Kearsipan Dan Dokumentasi Aparatur	Cakupan Pelayanan Dan Operasional Unit Kerja	100,00 %	100,00 %	245.665.000	100,00 %	285.000.000	100,00 %	300.000.000	100,00 %	300.000.000	100,00 %	350.000.000	100,00 %	1.280.665.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
01 30 33	Program Pemeliharaan Kesehatan Aparatur	Pelayanan Staf Pemerintahan dan Pembangunan	100,00 %	100,00 %	50.000.000	-	-	-	-	-	-	100,00 %	50.000.000	100,00 %	100.000.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
01 34 35	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Lokasi Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Rentan Sosial Ekonomi (PMKS) Lainnya	1 Program yang Telah Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
01 35 37	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Lokasi Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Rentan Sosial Ekonomi (PMKS) Lainnya	Terlaksananya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	0 Kelompok	0 Kelompok	150.000.000	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
01 18 19	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	[illegible]	0,00 %	0,00 %	[illegible]	60,00 %	[illegible]	50,00 %	[illegible]	40,00 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
01 17 17	Program Pemberdayaan Sosial Perkotaan	[illegible]	4 Unit	-	-	4 Unit	126.000.000					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
01 17 19	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Di Luar Panti	[illegible]	30 Orang	-	-	225 Orang	300.000.000	-	-	-	-	225 Orang	300.000.000	750 Orang	1.200.000.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
01 12 16	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Di Dalam Panti	[illegible]	12 Orang	12 Orang	1.200.000.000	12 Orang	1.500.000.000	12 Orang	1.800.000.000	12 Orang	1.800.000.000	12 Orang	1.800.000.000	60 Orang	9.000.000.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
01 15 17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (PKS) Dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lainnya	[illegible]	10 Orang	10 Orang	60.000.000	-	-	12 Orang	90.000.000	12 Orang	90.000.000	12 Orang	100.000.000	46 Orang	340.000.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
01 15 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	12,27 %	85.000.000	[illegible]	-	10,47 %	82.500.000	11,00 %	167.500.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
01 15 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	[illegible]	10,00 %	10,00 %	114.000.000	11,00 %	120.000.000	12,00 %	90.000.000	12,00 %	75.000.000	10,00 %	100.000.000	12,00 %	225.000.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
01 15 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	[illegible]				11,00 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
01 14	**BIDANG KEPEMUDAAN DAN**				**375.250.000**		**90.300.000**		**450.000.000**		**111.000.000**		**500.000.000**		**1.526.250.000**	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL PADA AWAL PERIODE RENSTRA	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029				
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 6+7+9+11+13	16 = 6+8+10+12+14	17
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible] Orang	[illegible]							[illegible] Orang	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible] Orang	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible] Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	**[illegible]**				**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Dokumen	[illegible] Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Dokumen	[illegible]	[illegible] Dokumen	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Dokumen	[illegible] Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Dokumen	[illegible]	[illegible] Dokumen	[illegible]	[illegible]
[illegible]	**[illegible]**				**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	**[illegible]**				**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	**[illegible]**				**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH/KEWENANGAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE		KEPALA PERANGKAT DAERAH
				2023		2024		2025		2026		2027				
				TARGET	[Rp.]	TARGET	[Rp.]	TARGET	[Rp.]	TARGET	[Rp.]	TARGET	[Rp.]	TARGET	[Rp.]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = [illegible]	16 = [illegible]	17
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		INFO KEWENANGAN LAINNYA
				2025		2026		2027		2028		2029				
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=(5+7+9+11+13)	16=(6+8+10+12+14)	17

KODE	SASARAN TERTUNG PERMUSTAKAAN DAN PROGRAM PENDUKUNG PERMUSTAKAAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN		KET
				2013*		2014*		2015*		2016		2017				
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 2017-2012	16 = 2017/2012	17

KODE	SASARAN RENSTRA, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMKAB/KOTA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TARGET KINERJA PADA AKHIR RENSTRA		INFO PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021				
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 9+11+13	16 = 10+12+14	17

KODE	DINAS/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		2027		
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = (11+13+14)	16 = (12+13+14)	17
01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Program Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	4 Bln	4 Bln	1.441.200.000	4 Bln	1.441.200.000	4 Bln	1.441.200.000	4 Bln	1.441.200.000	4 Bln	1.441.200.000	4 Bln	7.206.000.000	Sekretariat Daerah
01 01 02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksana Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000.000	12 Bulan	1.000.000.000	12 Bulan	1.000.000.000	12 Bulan	1.000.000.000	12 Bulan	1.000.000.000	60 Bulan	5.000.000.000	Sekretariat Daerah
01 01 03	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	9 Kali	9 Kali	4.856.500.000	9 Kali	5.000.000.000	9 Kali	5.000.000.000	9 Kali	5.000.000.000	9 Kali	5.000.000.000	45 Kali	25.856.500.000	Camat Pengelola Keuangan Lainnya
01 01 04	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksana Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	3 Unit	-	-	3 Unit	1.000.000.000	3 Unit	1.000.000.000	3 Unit	1.000.000.000	3 Unit	1.000.000.000	3 Unit	4.000.000.000	Sekretariat Daerah
		Camat Pengelola Keuangan Lainnya	10 Orang	10 Orang	2.000.000.000	10 Orang	1.000.000.000	10 Orang	1.000.000.000	10 Orang	1.000.000.000	10 Orang	1.000.000.000	50 Orang	6.000.000.000	Sekretariat Daerah
01 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	1.000.000.000	12 Bulan	1.000.000.000	Sekretariat Daerah
01 01 06	Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Pelayanan Kelurahan	Meningkatnya Pelayanan Kelurahan	9 Kel	9 Kel	1.000.000.000	9 Kel	1.000.000.000	9 Kel	1.000.000.000	9 Kel	1.000.000.000	9 Kel	1.000.000.000	9 Kel	5.000.000.000	Camat
01 01 07	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8 Kali	8 Kali	1.000.000.000	8 Kali	1.000.000.000	8 Kali	1.000.000.000	8 Kali	1.000.000.000	8 Kali	1.000.000.000	40 Kali	5.000.000.000	Camat
01 01 08	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Program Yang Telah Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
01 01 09	Program Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksana nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	-	27 Desa/Kel	87.000.000	27 Desa/Kel	90.000.000	27 Desa/Kel	90.000.000	27 Desa/Kel	90.000.000	27 Desa/Kel	357.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Desa
01 01 10	Program Pemetaan dan Penataan Batas Wilayah Desa	Terlaksana Penataan Batas Wilayah Desa	141 Persil	150 Persil	45.500.000	-	-	-	-	212 Persil	70.000.000	180 Persil	60.000.000	180 Persil	175.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan
01 01 11	Program Pemetaan dan Penataan Batas Wilayah Desa	Terlaksana Penataan Batas Wilayah Desa	12 Desa	-	-	12 Desa	12.000.000			12 Desa	12.000.000	7 Desa	105.000.000	30 Desa	105.000.000	Kecamatan
01 01 12	Program Pembinaan Pengelolaan Perbatasan Negara	Terlaksana Pembinaan Pengelolaan Perbatasan Negara	12 Desa	12 Desa	12.000.000	12 Desa	12.000.000	12 Desa	12.000.000	15 Desa	15.000.000	15 Desa	15.000.000	30 Desa	5.000.000.000	Sekretariat Daerah
01 01 13	Program Pembinaan Pengelolaan Perbatasan Negara	1 Program Yang Telah Dilaksanakan														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 01 14	Program Pengelolaan Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Daerah	120 Orang	120 Orang	180.771.875	140 Orang	400.000.000	130 Orang	25.000.000	130 Orang	400.000.000	150 Orang	500.000.000	650 Orang	1.425.771.875	Sekretariat Daerah
01 01 15	Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Daerah	Terlaksananya MOU/PKS/IKPD	-	-	-	100 Orang	25.000.000							100 Orang	25.000.000	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Lainnya
01 01 16	Program Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.000 Produk Hukum	2.000 Produk Hukum	500.000.000	1.000 Produk Hukum	1.000.000.000	850 Produk Hukum	250.000.000	400 Produk Hukum	500.000.000	650 Produk Hukum	900.000.000	4.000 Produk Hukum	3.000.000.000	Sekretariat Daerah
01 01 17	Program Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksana Pengelolaan Jaringan Komunikasi	10 Jaringan	10 Jaringan	25.000.000	10 Jaringan	30.000.000	10 Jaringan	100.000.000	10 Jaringan	40.000.000	10 Jaringan	150.000.000	10 Jaringan	345.000.000	Sekretariat Daerah
01 01 18	Program Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Program Yang Telah Dilaksanakan	-	-	-									-	-	Dinas Komunikasi
01 01 19	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan Umum	10 Orang	10 Orang	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Orang	11.000.000	Sekretariat Daerah
01 01 20	Program Pembinaan Perpustakaan	Terlaksana Pengelolaan Perpustakaan	20 Orang	20 Orang	207.200.000	20 Orang	600.000.000	20 Orang	700.000.000	20 Orang	2.000.000.000	20 Orang	500.000.000	100 Orang	4.000.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	STRATEGI ARAHAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020				
				TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 8+10+12+14	16 = 9+11+13+15	17
01 01 01	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Aparatur	Lulusan Diklat	100 Orang	100 Orang	2.412.345.000							200 Orang	1.000.000.000	200 Orang	1.000.000.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
01 20 20	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kualitas Pelayanan dan Organisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	3 Dok	3 Dok	300.000.000	1 Dok	700.000.000	1 Dok	500.000.000	0 Dok	0	0 Dok	50.000.000	34 Dok	2.000.000.000	Sekretariat Daerah
01 20 20	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Nilai Kinerja Unit Aparatur	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000.000.000	1.000 Orang	800.000.000	1.000 Orang	400.000.000	1.000 Orang	0	1.000 Orang	200.000.000	1.000 Orang	2.000.000.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
01 20 21	Pengembangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Daerah	Pengelolaan Pemanfaatan Barang Daerah				15 Dokumen	100.000.000					15 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	300.000.000	Badan Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendapatan Daerah
01 20 21	Pengembangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Daerah	Persentase Capaian SKPD yang Diaudit PBMD		15 Orang	300.000.000					5 Orang	100.000.000	15 Orang	400.000.000	25 Orang	800.000.000	Inspektorat Daerah
01 20 20	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Lulusan Diklat Aparatur				2 Paket	10.000.000							9 Paket	10.000.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
01 21	Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Upaya Sosial	30,00 %									30,00 %	300.000.000	90,00 %	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
01 23	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Kesejahteraan	Meningkatnya Upaya Sosial	50,00 %									50,00 %	200.000.000	50,00 %	200.000.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Kependudukan Transmigrasi
01 23	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Kesejahteraan	Meningkatnya Upaya Sosial										60,00 %	30.000.000	60,00 %	30.000.000	Kabupaten Sigi Dalam Angka
01 23	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Kesejahteraan	Meningkatnya Upaya Sosial										50,00 %	50.000.000	90,00 %	50.000.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Kependudukan Transmigrasi
01 23	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Kesejahteraan	Meningkatnya Upaya Sosial	20,00 %									20,00 %	150.000.000	65,00 %	150.000.000	Kabupaten Sigi Dalam Angka
01 23	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Kesejahteraan	Meningkatnya Upaya Sosial	30,00 %									30,00 %	150.000.000	85,00 %	150.000.000	Dinas Sosial Kabupaten Sigi
01 23 3	Program Pengelolaan Aset Daerah yang Dimanfaatkan	Pengelolaan Barang Milik Daerah														Badan Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendapatan Daerah
01 23 3	Program Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2	Pengelolaan Barang Milik Daerah														Badan Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendapatan Daerah
01 23 3	Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan	Pengelolaan Barang Milik Daerah														Badan Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendapatan Daerah
01 23 3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Kesejahteraan	Pengelolaan Barang Milik Daerah														Badan Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendapatan Daerah
01 23 3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Kesejahteraan	Pengelolaan Barang Milik Daerah														Badan Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendapatan Daerah
01 02	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**				0.000.000.000		0.000.000.000		0.000.000.000		0.000.000.000		0.000.000.000		00.000.000.000	
01 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Data Administrasi Unit Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas	00,00 %	00,00 %	000.000.000	00,00 %	000.000.000	00,00 %	000.000.000	00,00 %	000.000.000	00,00 %	000.000.000	00,00 %	000.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
01 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Administrasi Dan Pengadaan Yang Dibutuhkan	00,00 %	00,00 %	000.000.000	00,00 %	000.000.000	00,00 %	000.000.000	00,00 %	000.000.000	00,00 %	000.000.000	00,00 %	000.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
01 02 05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Pembinaan Kinerja Aparatur	00,00 %	00,00 %	000.000.000							00,00 %	000.000.000	00,00 %	000.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
01 20 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	0 Dokumen			0 Dokumen	000.000.000							0 Dokumen	000.000.000	Sekretariat Daerah
01 20 21	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	000.000.000	0 Dokumen	000.000.000	0 Dokumen	000.000.000	0 Dokumen	000.000.000	0 Dokumen	000.000.000	0 Dokumen	000.000.000	Badan Pengelola Keuangan
01 20 25	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pendidikan	Meningkatnya Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan, Pelaksanaan Tugas Guru	0 Paket	0 Paket	000.000.000	0 Paket	000.000.000	0 Paket	000.000.000	0 Paket	000.000.000	0 Paket	000.000.000	00 Paket	000.000.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat
01 20 10	Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	00 Dokumen	00 Dokumen	000.000.000	00 Dokumen	000.000.000	00 Dokumen	000.000.000	00 Dokumen	000.000.000	00 Dokumen	000.000.000	00 Dokumen	000.000.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat

KODE	URUSAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PELAYANAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		OPD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020				
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 6+8+10+12+14	16 = 6+8+10+12+14	17
01 02 07	Program Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Persentase [illegible]	1 Unit	1 Unit	280.111.000	1 Unit	420.340.500	1 Unit	1.000.484.400	1 Unit	50.000.000	1 Unit	350.500.000	2 Unit	2.091.290.900	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
01 02 14	Program Pembinaan Kepemuda [illegible]	Meningkatnya [illegible]	84 Orang	84 Orang	[illegible]			84 Orang	140.000.000	84 Orang	120.000.000	84 Orang	[illegible]	84 Orang	[illegible]	Sekretariat Daerah
01 02 19	Program Pembinaan Anak [illegible]	Meningkatnya [illegible]	84 Orang					84 Orang	98.160.000	84 Orang	120.000.000	84 Orang	140.000.000	84 Orang	358.160.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 02 0	Pembinaan Penelitian Teknologi	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan
01 20	JUMLAH															
01 21 19	Program Pelayanan [illegible]	[illegible]										12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
01 21 16	Program Pemberdayaan [illegible]	[illegible]	12 Bulan	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	420.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01 22	JUMLAH															
01 23	JUMLAH KESELURUHAN															
01 25 25	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase [illegible]	12 Bulan	12 Bulan	700.000.000	12 Bulan	900.000.000	12 Bulan	1.000.000.000			12 Bulan	1.100.000.000	48 Bulan	3.500.000.000	Dinas Perhubungan
01 25 25	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Informasi [illegible]	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000.000	12 Bulan	1.200.000.000	12 Bulan	1.300.000.000	12 Bulan	1.400.000.000	12 Bulan	1.500.000.000	12 Bulan	6.400.000.000	Sekretariat Daerah
01 25 25	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	[illegible]										12 Bulan	700.000.000	12 Bulan	700.000.000	Sekretariat Daerah
01 25 25	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	[illegible]	-	-	-	-	-	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	650.000.000	12 Bulan	700.000.000	12 Bulan	700.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 26	JUMLAH PERPUSTAKAAN															
01 29 29	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	[illegible]	100,00%	100,00 %	400.000.000	100,00 %	600.000.000	100,00 %	700.000.000	100,00 %	800.000.000	100,00 %	900.000.000	100,00 %	3.400.000.000	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
01 29 29	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	[illegible]	100,00 %	100,00 %	150.000.000	100,00 %	50.000.000	100,00 %	40.000.000	100,00 %	30.000.000	100,00 %	120.000.000	100,00 %	390.000.000	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
01 29 29	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	[illegible]	100,00 %	100,00 %	10.000.000							100,00 %	15.000.000	100,00 %	25.000.000	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
01 29 29	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pemerintahan	[illegible]														Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
02	JUMLAH PELAYAN				10.271.350.750		20.415.330.343		50.101.696.805		30.096.300.000		20.290.800.737		140.275.333.611	
02 01	JUMLAH PERTANIAN				3.650.500.350		5.090.350.850		5.050.910.900		4.901.007.000		6.250.493.542		25.492.443.697	
02 01 12	Program Peningkatan [illegible]	[illegible]	100,00 %	-	-	100,00 %	120.000.000	-	-	-	-	100,00 %	150.000.000	100,00 %	450.000.000	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
02 01 16	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	[illegible]	0,00 %	0,00 %	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %	450.000.000	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
02 01 17	Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	[illegible]	1 Unit	-	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	110.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	130.000.000	5 Unit	460.000.000	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
02 01 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	[illegible]	5 Unit			5 Unit	150.000.000	5 Unit	170.000.000	5 Unit	190.000.000	5 Unit	210.000.000	25 Unit	720.000.000	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
02 01 19	Program Peningkatan Produksi Peternakan	[illegible]	0,00 %	0,00 %	450.000.000	0,00 %	1.000.000.000	0,00 %	1.200.000.000	0,00 %	1.400.000.000	0,00 %	1.600.000.000	0,00 %	5.650.000.000	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (CAWAL) PADA [2013]	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TARGET KINERJA PROGRAM PADA AKHIR PERIODE		ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
				2013		2014		2015		2016		2017				
				REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 5+7+9+11+13	16 = 6+8+10+12+14	17
03 01 02	Program Pembinaan Pengelolaan Pendidikan Perguruan Tinggi	Nama Indikator Kinerja Program	24 Nas	24 Nas	53.000.000	24 Nas	55.000.000	24 Nas	57.000.000	24 Nas	59.000.000	24 Nas	61.000.000	120 Nas	285.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
03 01 03	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Tinggi	Nama Indikator Kinerja Program								12 Orang	200.000.000	12 Orang	210.000.000	24 Orang	410.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
03 01 04	Program Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas	Persentase lulusan perguruan tinggi yang terserap di dunia kerja	8,00 %	8,00 %	1.000.000.000	8,10 %	1.050.000.000	8,20 %	1.100.000.000	8,30 %	1.150.000.000	8,40 %	1.200.000.000	8,40 %	5.500.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
03 01 05	Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi	Persentase lulusan perguruan tinggi berakreditasi A	5,00 %	-	-	5,10 %	100.000.000	5,20 %	105.000.000	5,30 %	110.000.000	5,40 %	115.000.000	5,40 %	430.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
03 01 06	Program Peningkatan Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Persentase lulusan perguruan tinggi berakreditasi A/B/C	0,00 %			0,10 %	200.000.000	0,20 %	210.000.000	0,30 %	220.000.000	0,40 %	230.000.000	0,40 %	860.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
03 02	BIDANG KESEHATAN				1.875.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		2.205.000.000		2.315.000.000		10.495.000.000	
03 02 01	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Angka Kematian Ibu Melahirkan														Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
03 02 02	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Angka Kematian Bayi	15 Bayi	15 Bayi	1.000.000.000	15 Bayi	1.050.000.000	15 Bayi	1.100.000.000	15 Bayi	1.150.000.000	15 Bayi	1.200.000.000	15 Bayi	5.500.000.000	Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
03 02 03	Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Pengawasan Obat dan Makanan	12 Kasus	12 Kasus	50.000.000	12 Kasus	50.000.000	12 Kasus	50.000.000	12 Kasus	50.000.000	12 Kasus	50.000.000	48 Kasus	200.000.000	Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
03 02 04	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya yang tertangani	0,00 %	0,00 %	175.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00 %	90.000.000	0,00 %	265.000.000	Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
03 03	BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN				45.000.000		50.000.000		315.000.000		420.000.000		525.000.000		1.355.000.000	
03 03 01	Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Pemuda	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan	2,00 %	-	-	0,20 %	20.000.000	2,00 %	105.000.000	2,00 %	110.000.000	2,00 %	115.000.000	0,20 %	350.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
03 03 02	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Persentase Pelajar dan Mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga	0,00 %	0,00 %	45.000.000	-	-	0,00 %	210.000.000	0,00 %	310.000.000	0,00 %	410.000.000	0,00 %	975.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
03 04	BIDANG PARIWISATA				14.000.000		5.614.370.000		5.200.000.000		5.460.000.000		5.730.000.000		11.730.000.000	
03 04 01	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	2,00 %	2,00 %	14.000.000	2,20 %	14.000.000	2,00 %	105.000.000	2,00 %	110.000.000	2,00 %	115.000.000	0,20 %	350.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
03 04 02	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	2,00 %			2,20 %	14.000.000	2,00 %	105.000.000	2,00 %	110.000.000	2,00 %	115.000.000	0,20 %	350.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
03 04 03	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	2,00 %	-	-	-	-	2,00 %	105.000.000	2,00 %	110.000.000	2,00 %	115.000.000	0,20 %	330.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
03 05	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				8.814.891.000		12.000.000.000		5.000.000.000		5.250.000.000		5.510.000.000		40.000.000.000	
03 05 01	Program Pembinaan Kepemudaan	Keberadaan Unit Pelayanan Teknis Daerah Sarana Pemuda Kreatif	100,00 %	100,00 %	6.000.000.000	100,00 %	6.000.000.000	100,00 %	2.500.000.000	100,00 %	2.625.000.000	100,00 %	2.756.000.000	100,00 %	13.881.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
03 05 02	Program Pembinaan Olahraga	Persentase Pelajar dan Mahasiswa yang Berprestasi di Tingkat Provinsi	100,00 %	100,00 %	2.814.891.000	100,00 %	6.000.000.000	100,00 %	2.500.000.000	100,00 %	2.625.000.000	100,00 %	2.754.000.000	100,00 %	13.881.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
03 05 03	Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	Persentase Pelajar dan Mahasiswa yang Berprestasi di Tingkat Provinsi	100,00 %	100,00 %	4.000.000.000	-	-	-	-	-	-	100,00 %	4.000.000.000	100,00 %	8.000.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

KODE	KEGIATAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL PADA AWAL RENSTRA (2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013*		2014		2015*		2016		2017				
				TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

TABEL 8.2
PERKIRAAN PAGU DANA INDIKATIF MENURUT URUSAN DAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	URAIAN	TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	
		2013*		2014*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Urusan Wajib	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Bidang Pendidikan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Dinas Pendidikan Kota Langsa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]
	- Dinas Perpustakaan Kota Langsa	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]
	- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Langsa	-	-	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
	- Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
	- Bidang Kesehatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Dinas Kesehatan Kota Langsa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	RSUD Kota Langsa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Bidang Pekerjaan Umum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
	- Bidang Perumahan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
	- Badan Perencanaan, Riset & Daerah Kota Langsa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Bidang Penataan Ruang	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
	- Bidang Perumahan Permukiman	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]

NO	SKPD	TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJPD	
		2013*		2014*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	2.343.011.443	2.682.787.109	2.046.813.965	4.461.191.403	2.170.438.141	4.207.645.342	3.188.766.193	4.670.944.261	3.369.405.658	4.727.820.000	13.131.787.517	27.197.888.659
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa		-	102.005.031	-	281.700.000	430.682.302		399.203.142		973.140.000		2.410.858.083
	- Sekretariat DPRK	3.331.138.140	1.701.538.810	3.477.680.046	3.315.039.028	2.600.333.161	6.143.725.114	3.126.227.382	5.804.395.842	3.168.479.782	3.737.954.286	12.702.364.475	24.310.775.643
	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	3.331.138.140	1.701.538.810	3.477.680.046	3.315.039.028	2.600.333.161	6.143.725.114	3.126.227.382	5.804.395.842	3.168.479.782	3.737.954.286	12.702.364.475	24.310.775.643
	- Dinas Lingkungan Hidup	3.331.138.140	12.555.959.126	3.701.755.843	15.370.033.501	6.057.975.971	14.141.207.030	5.201.953.639	13.195.306.975	6.667.573.765	9.876.061.293	22.281.363.383	65.242.670.311
	Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa	3.331.138.140	12.555.959.126	3.701.755.843	15.370.033.501	6.057.975.971	14.141.207.030	5.201.953.639	13.195.306.975	6.667.573.765	9.876.061.293	22.281.363.383	65.242.670.311
	- Dinas Pemadam Kebakaran Kota Langsa		-		-		-		-		-		-
	- Dinas Kesehatan Kota Langsa		-		-		-		-		-		-
	- RSUD Kota Langsa		-		-		-		-		-		-
	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa		-		-		-		-		-		-
	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa		-		-		-		-		-		-
	- Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa		-		-		-		-		-		-
	- Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan		-		-		-		-		-		-
	- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Langsa		-		-		-		-		-		-
	- Perkim		-		-		-		-		-		-
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa		-	1.021.191.000	-	1.673.500.000	-	6.028.140.000	-	946.414.231	-	4.643.114.231	11.648.116.962
	- Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa		-		-		-		-		-		-
	- Dinas Pekerjaan, Perumahan Dan Permukiman Kota Langsa		-		-		-		-		-		-
	- Dinas Perhubungan, Pertanggungan, Kebakaran dan UKM Kota Langsa		-		-		-		-		-		-
	- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.805.365.736	1.478.132.196	1.928.410.185	1.238.571.642	1.811.432.621	929.619.040	2.044.116.393	757.708.206	2.171.852.517	1.393.394.000	12.219.945.557	5.403.300.210
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	3.805.365.736	1.478.132.196	1.928.410.185	1.238.571.642	1.811.432.621	929.619.040	2.044.116.393	757.708.206	2.171.852.517	1.393.394.000	12.219.945.557	5.403.300.210

NO	SKPK	TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	
		2013*		2014*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.137.6.4.787	1.818.687.190	2.318.490.317	2.114.[illegible].790	2.577.345.428	3.041.076.484	2.829.869.845	3.859.519.265	2.858.361.545	3.452.760.950	12.511.119.036	9.281.090.449
	- Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	2.137.6.4.787	1.818.687.190	2.318.490.317	2.114.[illegible].790	2.577.345.428	3.041.076.484	2.829.869.845	3.859.519.265	2.858.361.545	3.452.760.950	12.511.119.036	9.281.090.449
	- Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera		279.881.300		586.406.000		1.373.050.300		1.129.541.500	-	1.442.116.000	-	3.737.335.900
	- Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	-	279.881.300	-	586.406.000	-	1.373.050.300	-	1.129.541.500	-	1.442.116.000	-	3.737.335.900
	- Bidang Sosial	2.092.2.3.=59	3.210.893.991	2.840.139.519	7.691.285.991	2.877.839.043	9.104.648.313	3.442.684.405	7.340.995.190	3.477.111.250	5.869.952.958	38.178.580.702	36.118.910.221
	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	2.092.6.3.=59	3.075.[illegible].991	2.840.139.519	7.691.285.991	2.877.839.043	9.072.697.313	3.442.684.405	7.051.722.790	3.477.111.250	5.869.971.758	38.178.580.702	35.188.303.026
	- Sekretariat Dewan Kota Langsa	-	134.400.000	-	103.940.000	-	99.203.000	-	99.203.000		138.950.500		926.476.000
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	-	-	1.787.078.000	-	3.030.[illegible].313	-	3.597.[illegible].000		3.300.030.500		2.106.830.826
	- Bidang Ketenagakerjaan	-	375.692.940	-	91.370.000	-	0.=8[illegible].000	-	[illegible].385.000		939.[illegible].=76	-	1.826.730.850
	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	-	375.892.940	-	91.370.000	-	63.[illegible].617	-	[illegible].385.000		838.878.000	-	1.226.730.850
	- Bidang Keluarga	-	491.869.010	-	-	-	306.063.030	-	22.900.000	-	1.341.301.200	-	2.164.751.000
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa		491.869.010		-		306.063.030		22.900.000		1.341.301.200	-	2.164.751.000
	- Bidang Pemuda dan Olah Raga	-	140.920.020	-	151.940.000	-	309.524.030	-	81.902.020		938.592.140	-	972.132.240
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	140.920.020	-	151.940.000	-	309.524.030	-	81.902.020	-	138.592.140	-	716.132.240
	- Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836.000.000	-	256.000.000
	- Bidang Kesejahteraan	-	1.261.930.020	479.267.317	3.909.44=.290	701.345.836	3.017.120.756	497.681.041	2.139.358.370	529.861.877	2.578.262.030	1.707.788.858	8.830.650.386
	- Dinas Pendidikan Kota Langsa	-	-	-	2= 143.250	-	5.=80.030	-	-		30.20[illegible].=35		191.088.740
	- Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	-	-	479.267.317	276.[illegible].000	701.345.836	80.[illegible].=81	497.681.041	329.658.010	529.861.877	836.[illegible].010	1.707.788.858	2.297.601.386
	- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa	-	1.261.930.020	-	1.=0=.=27.040	-	936.929.030	-	940.=9=.300		783.[illegible].000	-	6.=61.[illegible].300
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	1.[illegible].630.020	-	1.9=.214.000	-	1.972.259.030	-	914.826.010	-	731.821.020	-	6.289.289.040
	- Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa						98.[illegible].030		63.990.000	-	126.300.020	-	312.290.300
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa		139.830.020										139.890.040

NO	SKPD	TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	
		2013*		2014*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	2.650.302.202	2.950.660.970	3.256.180.192	4.231.396.803	3.268.232.777	5.426.740.324	3.669.097.585	5.612.801.246	3.715.385.658	5.482.715.000	11.977.295.198	29.257.334.649
	- Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa	2.650.302.202	4.400.360.970	3.256.180.192	4.231.396.803	3.268.232.777	5.426.740.324	3.669.097.585	5.612.801.246	3.715.385.658	5.586.353.000	11.977.295.189	29.257.334.649
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.920.000	-	97.920.000
	- Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	2.849.711.119	10.196.371.340	3.018.377.997	13.345.969.842	3.351.739.735	12.296.780.301	3.391.035.401	10.694.193.919	3.929.946.786	14.076.970.300	17.046.715.635	65.910.121.740
	- Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)	1.685.036.817	1.261.520.210	1.784.182.329	2.291.343.703	1.956.371.564	1.356.346.201	2.337.727.140	1.621.364.516	2.381.134.377	2.914.814.300	10.781.995.243	9.612.420.930
	- Kantor Satpol PP dan Wh Kota Langsa	1.164.734.012	6.285.848.825	1.367.465.651	5.292.849.841	1.488.363.587	8.335.380.710	561.503.306	7.640.387.623	1.469.812.388	9.864.234.200	6.562.280.323	35.579.943.811
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa	-	3.203.626.911	-	2.396.726.270		2.710.979.030		2.023.806.020		2.970.620.200		13.031.247.187
	- Sekretariat DPR Kota Langsa	-	-	-	-						137.580.200	-	137.580.200
	- Dinas Syariat Islam Kota Langsa	-	10.500.000	-	-						150.000.200	-	250.000.200
	- Biro Organisasi Daerah, Pemberdayaan Aparatur, Administrasi Keuangan, Investasi, Pengelola Daerah, Kepegawaian Dan Pendidikan	38.879.887.647	57.164.737.824	81.901.364.376	64.469.813.124	94.231.684.970	67.196.625.756	147.131.770.857	65.428.903.715	119.468.090.181	57.278.176.500	529.621.314.828	284.239.278.826
	- Biro Kesejahteraan Umum Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000	-	250.000.200
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	-	-	-	67.150.000	-	52.000.000	-	63.000.000	-	75.000.000	-	257.000.200
	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa										200.000.000	-	200.000.200
	- Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-		80.000.000		80.000.200
	- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kesbang Linmas				350.000.000						210.000.000	-	560.000.000
	Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Langsa	2.497.361.405	-	4.565.765.234	-	4.447.105.930	-	4.637.666.000	-	4.483.681.360		20.219.620.379	
	- Walikota dan Wakil Walikota Langsa	494.315.340	-	594.116.390	-	594.116.930		620.410.200		506.343.920		2.808.956.110	-
	- Sekretariat Dewan Kota Langsa	8.715.214.531	23.612.318.063	11.307.161.617	25.977.758.238	13.095.706.106	25.422.501.390	13.032.087.636	19.872.658.500	13.152.307.926	26.873.393.715	58.030.599.300	118.217.468.211
	- Sekretariat DPRK Kota Langsa	9.272.105.113	9.811.614.260	2.534.640.752	7.958.219.510	1.593.849.491	10.928.636.880	2.843.275.864	10.151.430.890	2.872.705.510	9.591.341.750	19.130.659.712	47.285.209.537
	- Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Langsa	31.621.561.813	13.956.476.380	86.374.267.242	18.929.211.180	91.745.561.636	13.432.288.460	92.803.156.412	9.843.754.740	91.731.101.326	10.171.384.071	304.876.751.367	66.413.419.917

NO	UNIT	TAHUN										SISA HASIL KERJA PADA AKHIR RENJA	
		2013*		2014*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Inspektorat Kota Langsa	3.213.333.157	9.497.861.359	3.709.765.650	3.291.975.025	3.691.086.572	2.657.838.797	3.976.137.361	1.582.782.502	1.011.938.634	3.225.0..6.000	19.011.8.0.378	10.305.0..1.681
	- Dinas Kesehatan Kota Langsa	1.974.927.375	13.446.006.210	2...22.80..700	1.317.137.050	2.152.49..884	1.418.620.220	2.387.008.921	1.690.0..5.002	3.0..2.879.218	2.1.1.949.7.4	11.480.477.942	6.311.861.210
	- Sekretariat DPRD Kota Langsa	823.387.157	200.000.0.0									823.387.157	200.000.000
	- Kecamatan Langsa Kota	1.703.337.900	575.741.976	1.605.639.851	555.217.676	1.672.284.021	826.005.410	2.788.175.330	706.325.000	2.1C0.050.1.2	916.650.200	2.087.366.923	5.371.923.646
	- Kecamatan Langsa Barat	1.782.626.000	560.0.6.876	1.903.027.220	504.788.2.0	1.498.740.276	656.726.707	2.181.492.165	693.890.000	1.8..1.347.1.6	776.954.200	2.284.780.849	5.644.2..5.702
	- Kecamatan Langsa Timur	1.425.648.476	505.060.276	1.691.952.990	393.427.050	1.696.845.736	610.774.421	2.361.028.342	761.319.000	1.8.0.294.2.6	850.060.200	2.486.187.215	5.219.051.182
	- Kecamatan Langsa Lama	1.285.168.768	496.170.620	1.167.826.200	365.126.050	1.390.480.203	546.306.731	1.612.062.732	688.742.000	1.951.479.200	756.697.500	2.211.264.221	5.204.476.707
	- Kecamatan Langsa Baru	1.126.238.168	581.765.126	1.417.218.442	524.829.000	1.686.503.967	597.405.727	1.960.403.388	681.342.000	2.0C0.237.415	776.851.125	2.221.864.341	5.181.853.957
	- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Langsa	863.954.000	537.646.840	1.215.868.647	567.2..9.000	1.215.418.312	630.485.020	1.385.415.702	664.805.953	1.0.6.771.0.0	676.511.1.0	5.705.526.540	3.432.678.760
	- Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemadam Kota Langsa	5.1.6.877.142	3.503.459.820	11.814.526.4.6	3.858.956.750	7.965.202.415	2.706.954.747	7.747.965.541	4.502.176.722	7.855.284.5.6	5.251.971.246	44.485.814.120	20.074.193.190
	- Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Kota Langsa			66.200.0.1	676.057.700	193.146.6.6	191.276.910	77.0.7.6.7	663.656.000	2.6.70.2.3	697.201.2.0	2.205.656.058	2.458.150.190
	- Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa			41.340.030	951.896.100	1.290.0.40.692	445.543.030	1.565.8.4.651	822.747.000	1.1.0.851.9.6	791.525.0.0	6.177.246.145	3.676.436.700
	- Biro Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Langsa	1.1.1.281.216	2.7.6.0.2.2.0	1.8.2.0.6.6.56	1.8.6.5.1.1.6	4.2.6.6.9.8.1	4.6.6.7.9.6.0	2.6.7.6.1.6.1.1	3.6.1.1.6.8.0	2.1.2.2.7.1.6	4.7.1.7.5.6.0	20.161.5.6.8.6	20.6.1.1.7.6.5
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa		2.1.1.1.1.0.2		2.1.1.7.1.1.0.2		146.0.0.6.0		1.0.0.2.0.0		1.8.5.6.6.0.0		6.5.1.6.6.2.0.5
	- Dinas Syariat Islam Kota Langsa		1.1.8.6.0.1.0.6		6.1.1.5.6.7.0.0		1.5.1.0.0.2.0.0		5.0.6.7.0.0.0.0		5.0.5.2.0.0.0.0		4.1.6.1.8.0.7.0.0
	- Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa	1.1.7.6.0.1.0.6	3.0.6.1.0.7.0.2	1.8.2.0.8.6.0.6	3.6.4.0.1.4.2.6.0	2.0.2.6.0.1.6.0.7.1	2.3.6.0.1.4.9.6.0.0	2.4.2.6.1.0.6.7.6.1	2.9.7.7.2.6.2.0.0	2.4.4.6.8.1.7.6.8	4.0.4.5.6.0.0.2.0	20.161.8.6.1.6.4	14.6.4.1.2.6.6.2.0.0
	Belanja Keuangan		37.280.002		37.280.002		22.206.003		20.002.300		133.320.000		235.372.310
	- Sekretariat DPRK Kota Langsa										83.320.000		83.320.000
	- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		37.280.002		37.280.002		22.206.003		20.002.300		47.000.000		152.572.310
	Belanja Bantuan Dan Insentif		2.121.228.302		7.458.157.302		2.654.0.0.602		4.2.0.0.0.300		2.069.221.100		8.093.669.710
	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa		75..128.302		586.300.302		374.6.0.2.0.3				145.1.6.1.0		1.5.1.6.6.5.0.0
	- Sekretariat Daerah Kota Langsa		1.3.6.5.0.0.2.0.2		1.8.2.1.5.0.3.0.3		1.6.1.7.0.0.0.0.3		9.0.7.3.0.3.0.0		1.0.7.1.3.5.6.0.0.0		5.0.1.3.3.6.0.7.0
	- Sekretariat DPRK Kota Langsa										2.0.1.1.0.0.0		2.0.1.1.0.0.0.0
	- Badan Pemberdayaan, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa						6.5.1.7.0.0.4.0.3		3.7.0.0.1.3.0.0		7.0.1.2.0.0.0.0		1.0.7.6.2.9.4.0.0
	Belanja Perjalanan Dinas	775.4.5.2.1.5	5.2.7.4.1.9.1.8.5	6.9.7.1.6.5.1.7.1	4.7.5.7.1.7.9.7.4	6.7.5.3.1.4.5.3.7	3.6.1.6.5.4.6.5.3	3.9.1.7.9.2.7.5.6	5.5.9.1.5.5.0.1.5	1.0.2.3.7.0.7.3.4	7.1.2.1.3.0.3.0.0	4.3.3.7.9.4.5.7.6.3	2.7.6.3.0.1.9.7.3.4
	- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	775.4.5.2.1.5	6.2.1.4.1.9.1.2.5	3.9.8.1.6.5.1.7.1	4.7.5.7.1.7.9.7.4	6.7.5.3.1.4.5.3.7	3.6.1.6.5.4.6.5.3	3.9.1.7.9.2.7.5.6	5.5.9.1.5.5.0.1.5	1.0.2.3.7.9.0.7.3.4	7.1.2.1.3.0.3.0.0	4.3.3.7.9.4.5.7.6.3	2.7.6.3.0.1.9.7.3.4
2.	Jumlah Pelja...	7.3.5.2.0.7.7.5.7	1.0.4.7.1.0.6.3.0.1.3	7.6.7.4.1.2.6.3.8.6.1	2.5.6.1.3.9.5.0.9.4.2	7.0.6.1.3.0.3.7.0.3	5.0.1.0.1.5.0.3.3.3.7	6.3.7.1.0.3.5.7.5.1	2.7.2.9.3.6.0.3.2.3.6	6.9.2.9.7.6.0.2.1.5	3.5.9.3.6.1.6.7.0.7	1.1.3.1.3.5.6.0.1	1.4.0.6.7.6.1.6.3.1.3

SO	SKPK	TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	
		2013*		2014*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Bidang Pemuda		2.482.691.149		5.091.365.063		8.050.618.902		4.601.307.305		5.226.458.247		25.452.440.457
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Pemuda Kota Tangsel	-	2.307.691.149	-	5.091.365.063		8.050.618.902		4.601.307.305		5.226.458.247	-	25.452.440.457
	Bidang Olahraga	-	1.574.265.020	-	516.920.000	-	1.548.208.010	-	6.277.635.020	-	2.738.140.500	-	15.206.856.620
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Pemuda Kota Tangsel	-	1.574.265.020	-	516.920.000	-	1.548.208.010	-	6.277.635.020	-	2.738.140.500	-	15.206.856.620
	Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	-	91.490.020	-	21.320.000	-	710.373.020	-	423.335.020	-	658.020.500	-	1.872.038.000
	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangsel	-	91.490.020	-	21.320.000	-	710.373.020	-	423.335.020	-	658.020.500	-	1.872.038.000
	Bidang Perhubungan	-	14.620.020	-	6.414.870.000	-	3.389.063.020	-	672.346.020	-	1.061.501.040	-	11.771.417.200
	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Dan Perhubungan Kota Tangsel	-	14.620.020	-	6.414.870.000	-	4.5-6.960.020	-	672.346.020	-	280.501.040	-	11.480.098.100
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Pemuda Kota Tangsel					-	3+0.643.020	-	-	-	650.200.040	-	1.090.743.100
	Bidang Kesatuan Bangsa Perlindungan	4.710.036.287	5.845.691.028	4.909.080.644	13.054.456.642	5.190.092.950	5.906.980.476	5.666.389.286	5.324.636.778	3.964.461.279	11.709.201.620	23.930.751.450	47.299.462.771
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Pemuda Kota Tangsel	4.710.036.287	5.845.691.028	4.909.080.644	13.054.456.642	5.190.092.950	5.906.980.476	5.666.389.286	5.324.636.778	3.964.461.279	11.709.201.620	23.930.751.450	47.299.462.771
	Bidang Pemberdayaan		22.736.856		778.240.000	-	25.148.128.148	-	2.054.229.406	-	9.735.900.020	-	37.489.267.735
	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan, Koperasi dan UKM Kota Tangsel		22.736.856		778.240.000	-	25.148.128.148	-	2.054.229.406	-	9.735.900.020	-	37.489.267.735
	Bidang Informasi	2.350.371.186	740.438.750	2.936.276.707	1.922.910.500	2.570.471.440	1.773.900.436	3.054.626.276	2.306.424.266	3.291.202.740	9.077.301.620	18.552.877.743	9.030.373.446
	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan, Koperasi dan UKM Kota Tangsel	2.350.371.186	740.438.750	2.936.276.707	1.922.910.500	2.570.471.440	1.773.900.436	3.054.626.276	2.306.424.266	3.291.202.740	9.077.301.620	18.552.877.743	9.030.373.446
	Bidang Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.300.920	-	192.300.920
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Tangsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.300.920	-	192.300.920
JUMLAH		323.353.913.193	253.287.613.856	374.948.485.838	403.781.386.246	433.969.687.854	456.871.905.684	462.420.740.465	490.936.593.677	487.054.137.990	466.097.394.178	2.049.729.494.846	1.960.493.668.616
TOTAL		576.641.196.997		777.798.742.973		890.841.493.909		953.376.334.142		953.301.497.042		4.010.223.163.461	

KETERANGAN
* Setelah Perubahan

TABEL 8.3
PERKIRAAN PAGU DANA INDIKATIF MENURUT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN										JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF	
		2013*		2014*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
..	Dinas Pendidikan Kota Langsa	65.947.557.462	24.118.572.136	203.099.681.946	26.415.293.787	220.156.296.376	25.018.146.147	208.681.545.478	36.075.753.283	31.639.785.864	42.008.930.711	1.009.880.857.758	179.818.980.128
	Urusan Wajib	65.947.557.462	24.118.572.136	203.099.681.946	26.415.293.787	220.156.296.376	25.018.146.147	208.681.545.478	36.075.753.283	31.639.785.864	42.008.930.711	1.009.880.857.758	179.818.980.128
	- Bidang Pendidikan	65.947.557.462	24.118.572.136	203.099.681.946	26.361.145.840	220.156.296.376	25.018.146.147	208.681.545.478	36.075.753.283	31.639.785.864	41.308.930.711	1.009.880.857.758	178.132.590.128
	- Bidang Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	-	600.000.000
	- Bidang Kesekretariatan	-	-	-	54.147.947	-	7.200.000	-	-	-	100.000.000	-	186.390.000
2	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa	-	-	-	-	109.414.000	418.524.665	999.821.930	49.385.000	20.843.000	49.261.646	1.579.542.484	1.386.196.504
	Urusan Wajib	-	-	-	-	374.915.650	413.524.665	898.821.930	49.385.000	101.843.000	191.861.818	1.574.972.498	1.386.196.504
	- Bidang Pendidikan	-	-	-	-	374.915.650	413.524.665	898.821.930	49.385.000	101.843.000	191.861.818	1.574.972.498	1.386.196.504
3.	Dinas Kesehatan Kota Langsa	25.535.903.150	13.930.790.484	27.760.956.083	15.650.028.638	38.773.856.142	38.791.281.618	29.691.170.791	24.795.815.032	29.936.050.739	85.296.753.125	141.741.348.664	195.204.931.937
	Urusan Wajib	25.535.903.150	13.930.790.484	27.760.956.083	15.650.028.638	38.773.856.142	38.791.281.618	29.691.170.791	24.795.815.032	29.936.050.739	85.296.753.125	141.741.348.664	195.204.931.937
	- Bidang Kesehatan	25.535.903.150	13.930.790.484	27.760.956.083	15.650.028.638	38.773.856.142	38.791.281.618	29.691.170.791	24.795.815.032	29.936.050.739	84.741.961.625	141.741.348.664	194.784.270.437
	- Bidang Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.791.500	-	403.771.500
4.	RSUD Kota Langsa	25.540.298.240	59.926.525.905	26.042.573.662	94.700.578.878	26.080.104.291	95.726.030.502	89.299.516.645	103.691.313.700	38.571.319.513	103.139.261.259	121.342.456.780	456.135.240.933
	Urusan Wajib	25.540.298.240	59.926.525.905	26.042.573.662	94.700.578.878	26.080.104.291	95.726.030.502	89.299.516.645	103.691.313.700	38.571.319.513	103.139.261.259	121.342.456.780	456.135.240.933
	- Bidang Kesehatan	25.540.298.240	59.926.525.905	26.042.573.662	94.700.578.878	26.080.104.291	95.726.030.502	89.299.516.645	103.691.313.700	38.571.319.513	101.139.261.259	121.342.456.780	454.135.240.933
	- Bidang Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000
5	Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	4.521.814.640	27.276.024.645	4.767.859.908	91.395.117.241	4.668.002.187	103.495.211.987	5.141.945.105	53.878.251.236	3.745.394.526	96.340.430.223	23.982.876.570	429.797.340.332
	Urusan Wajib	4.521.814.640	27.276.024.645	4.767.859.908	91.395.117.241	4.668.002.187	103.495.211.987	5.141.945.105	53.878.251.236	3.745.394.526	95.340.430.223	23.982.876.570	429.797.340.332
	- Bidang Pekerjaan Umum	4.521.814.640	26.716.024.645	4.767.859.908	91.089.772.241	4.668.002.187	88.670.670.987	5.141.945.105	50.011.751.736	3.745.394.526	80.719.301.203	23.982.876.570	357.956.416.382
	- Bidang Perumahan	-	469.957.020	-	8.420.210.102	-	13.951.872.000	-	3.866.391.500	-	11.200.000.000	-	44.864.126.200
	- Bidang Penataan Ruang	-	389.959.020	-	781.394.900	-	852.731.000	-	1.936.397.000	-	1.000.000.000	-	6.491.465.150
	- Bidang Penyediaan Perumahan	-	175.000.000	-	320.000.000	-	143.597.000	-	98.561.000	-	207.130.000	-	617.588.707
	- Bidang Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.374.097.225	-	1.374.097.225
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-	200.000.000

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN										JUMLAH ALOKASI PADU DANA INDIKATIF	
		2013*		2014*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	1.546.305.265	4.566.058.372	1.710.367.965	5.261.747.650	1.692.611.147	4.857.737.365	2.107.760.720	4.101.505.265	2.075.305.847	3.179.805.030	9.010.750.673	23.947.707.381
	Jumlah Wajib	1.546.305.265	4.566.058.372	1.710.367.965	5.261.747.650	1.692.611.147	4.857.737.365	2.107.760.720	4.101.505.265	2.075.305.847	3.179.805.030	9.010.750.673	23.947.707.381
	- Bidang Perencanaan	1.546.305.265	4.566.058.372	1.710.367.965	5.261.747.650	1.692.611.147	4.857.737.365	2.107.760.720	4.101.505.265	2.075.305.847	3.179.805.030	9.010.750.673	23.947.707.381
7.	Dinas Perumahan Pembangunan Daerah Kota Langsa	2.140.201.118	681.737.100	2.047.215.965	1.629.311.421	2.373.405.153	4.890.525.210	2.358.746.193	5.107.045.000	2.369.450.053	4.935.000.000	13.288.182.517	21.243.968.930
	Jumlah Wajib	2.140.201.118	547.737.100	2.047.215.965	1.499.311.421	2.373.405.153	4.890.525.210	2.358.746.193	5.103.045.000	2.369.450.053	4.935.000.000	13.288.182.517	21.243.968.930
	- Bidang Perumahan Rakyat	-	134.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-	134.000.000	-	268.000.000
	- Bidang Pembangunan Perumahan	2.140.201.118	413.737.100	2.047.215.965	1.499.311.421	2.373.405.153	4.890.525.210	2.358.746.193	4.103.045.000	2.369.450.053	4.737.000.000	13.288.182.517	20.975.968.930
	- Bidang Operasional Pemeliharaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan, Permukiman, Pertanahan Dan Penataan Ruang	-	-	-	67.750.000	-	57.000.000	-	65.000.000	-	75.000.000	-	267.000.000
8.	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	2.383.143.140	6.824.553.849	2.477.869.845	5.810.029.028	2.869.333.754	5.816.376.314	3.735.297.493	5.636.078.557	3.166.479.787	6.727.984.086	13.781.824.478	25.438.919.944
	- Dinas/ Wilh	2.383.143.140	6.824.553.849	2.477.869.845	5.810.029.028	2.869.333.754	5.816.376.314	3.735.297.493	5.636.078.557	3.166.479.787	6.727.984.086	13.781.824.478	25.438.919.944
	- Bidang Perhubungan	2.383.143.140	6.824.553.849	2.477.869.845	5.810.029.028	2.869.333.754	5.816.376.314	3.735.297.493	5.636.078.557	3.166.479.787	6.727.984.086	13.781.824.478	24.981.915.643
	- Bidang Komunikasi dan Informatika	-	731.784.000	-	366.000.000	-	374.621.200	-	-	-	148.896.000	-	1.620.615.200
	- Bidang Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620.000.000	-	620.000.000
9.	Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pemakaman Kota Langsa	1.969.0 0.0	10.000.000.000	1.0 .. 0.0	10.810.036.500	6.057.976.476	15.941.010.000	6.307.552.669	16.196.026.350	6.667.673.165	19.476.000.000	22.686.610.350	36.917.078.211
	- Dinas/ Wilh	1.969.0 0.0	10.000.000.000	1.0 .. 0.0	10.810.036.500	6.057.976.476	15.941.010.000	6.307.552.669	16.196.026.350	6.667.673.165	19.476.000.000	22.686.610.350	36.917.078.211
	- Bidang Pekerjaan Umum	-	136.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.000.000
	- Bidang Lingkungan Hidup	1.969.0 0.0	10.000.000.000	1.0 .. 0.0	10.810.036.500	6.057.976.476	15.941.010.000	6.307.552.669	16.196.026.350	6.667.673.165	19.476.000.000	22.686.610.350	36.917.078.211
	- Bidang Pemakaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620.000.000	-	620.000.000
10.	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Langsa	1.862.638.792	1.476.731.750	1.903.573.438	1.253.879.362	2.591.096.425	960.617.000	2.647.415.303	737.706.200	2.717.693.857	1.414.394.900	12.276.346.637	5.979.100.250
	Urusan Wajib	1.862.638.792	1.476.731.750	1.903.573.438	1.253.879.362	2.591.096.425	960.617.000	2.647.415.303	737.706.200	2.717.693.857	1.414.394.900	12.276.346.637	5.979.100.250
	- Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil	1.862.638.792	1.476.731.750	1.903.573.438	1.253.879.362	2.591.096.425	960.617.000	2.647.415.303	737.706.200	2.717.693.857	1.414.394.900	12.276.346.637	5.979.100.250
11.	Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	2.117.656.967	9.713.437.493	2.345.695.117	8.166.517.795	3.977.843.123	3.264.164.484	3.497.569.805	2.689.118.785	3.496.263.896	3.974.378.502	13.531.119.036	16.724.496.559
	Urusan Wajib	2.117.656.967	9.713.437.493	2.345.695.117	8.166.517.795	3.977.843.123	3.264.164.484	3.497.569.805	2.689.118.785	3.496.263.896	3.974.378.502	13.531.119.036	16.724.496.559

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN										JUMLAH ALOKASI PADA DATA INDIKATIF	
		2015*		2016*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Bidang Perlindungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620.040.000	-	620.040.000
	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.117.016.697	1.238.587.490	2.346.823.137	2.114.141.792	2.377.343.403	1.341.076.474	2.624.891.865	1.570.525.195	2.858.763.591	1.052.750.203	13.831.179.016	7.931.021.429
	Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera		979.521.000		988.000.000	-	1.315.088.000	-	1.129.563.000	-	1.443.110.000	-	5.719.008.000
10.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Kependudukan Pemberdayaan Kota Langsa	2.803.918.454	8.496.316.427	2.816.017.514	6.796.881.941	2.827.654.045	5.144.500.000	3.447.304.465	4.790.060.190	3.477.[illegible].350	6.010.307.201	19.176.850.028	21.777.[illegible].979
	Urusan Wajib	2.803.918.454	8.496.316.427	2.816.017.514	6.796.881.941	2.827.654.045	5.144.500.000	3.447.304.465	4.790.060.190	3.477.[illegible].350	6.784.307.393	19.176.850.028	24.031.039.891
	Bidang Sosial	2.803.918.454	8.496.493.847	2.816.017.514	6.707.511.941	2.827.654.045	5.070.097.000	3.447.304.465	4.691.776.190	3.477.[illegible].350	6.010.171.725	19.176.850.028	26.196.303.016
	Bidang Ketenagakerjaan	-	379.927.940	-	89.370.000	-	74.403.000	-	111.284.000	-	388.175.668	-	1.054.759.608
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Pemandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.700.000	-	386.700.000
	Urusan Pilihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.500.000	-	82.500.000
	Bidang Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.500.000	-	82.500.000
11.	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	476.397.354	393.119.000	321.243.636	502.364.135	447.581.051	781.963.803	342.656.872	906.415.050	1.787.793.913	2.384.361.988
	Urusan Wajib	-	-	476.397.354	393.119.000	321.243.636	502.364.135	447.581.051	781.963.803	342.656.872	906.415.050	1.787.793.913	2.384.361.988
	Bidang Kesbangpol	-	-	476.397.354	393.119.000	321.243.636	502.364.135	447.581.051	781.963.803	342.656.872	906.415.050	1.787.793.913	2.384.361.988
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Pemandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500.000	-	62.500.000
12.	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa	2.290.522.360	5.969.057.878	2.256.457.799	10.210.369.800	2.285.303.777	9.121.536.158	2.609.057.698	7.701.005.645	2.738.508.683	7.481.196.000	11.577.850.317	30.481.164.481
	Urusan Wajib	2.290.522.360	5.841.057.878	2.256.457.799	5.595.069.800	2.285.303.777	4.471.366.158	2.609.057.698	3.701.005.645	2.738.508.683	3.481.196.000	11.577.850.317	17.288.625.481
	Bidang Pemuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000
	Bidang Kebudayaan	-	3.357.120.000	-	1.944.937.000	-	1.650.526.000	-	941.994.000	-	746.572.000	-	8.665.171.000
	Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	2.290.522.360	2.483.937.878	2.256.457.799	3.650.132.800	2.285.303.777	2.820.840.158	2.609.057.698	2.759.011.645	2.738.508.683	1.734.624.000	11.577.850.317	16.623.454.481
	Urusan Pilihan	-	128.000.000	-	4.615.300.000	-	4.650.170.000	-	4.000.000.000	-	3.000.000.000	-	15.193.470.000
	Bidang Pariwisata	-	128.000.000	-	4.615.300.000	-	4.650.170.000	-	4.000.000.000	-	3.000.000.000	-	15.193.470.000

SO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN										JUMLAH ALOKASI PAGU DATA INDIKATIF	
		2013*		2014*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Lindung Masyarakat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Urusan Wajib	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pemandian	-	-	-	[illegible]						[illegible]	-	[illegible]
10.	Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Urusan Wajib	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.	Dinas Pendidikan Pemuda Kota Langsa	[illegible]		[illegible]		[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-
	Urusan Wajib	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Pemandian	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	
12.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Langsa	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
	Urusan Wajib	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-
	- Bidang Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Pemandian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-
13.	Sekretariat Daerah Kota Langsa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Urusan Wajib	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Bidang pendidikan	-	[illegible]		[illegible]							-	[illegible]
	- Bidang Pemberdayaan Perempuan		[illegible]		[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]

SO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN										JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF	
		2013*		2014*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Bidang Pemerintahan		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	- Bidang Sosial		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	- Bidang Pemberdayaan Desa,		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	- Bidang Kebudayaan		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	- Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]
	- Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Pemandian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
	- Bidang Komunikasi Dan Informasi	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
18.	Sekretariat DPRD Kota Cirebon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Urusan Wajib	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Bidang Kesatuan Bangsa	-	-	-	-						[illegible]		[illegible]
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Pemandian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Bidang Kesatuan Bangsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]
	Bidang Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]
19	Dinas Pengelola Keuangan, Dan Aset (DPKA) Kota Cirebon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Urusan Wajib	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Pemandian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22.	Kepolisian Kota Cirebon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Urusan Wajib	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN										JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF	
		2013*		2014*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Belanja Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat [illegible]	3.313.032.197	2.690.501.375	3.792.715.950	3.979.879.393	3.962.936.916	4.561.828.797	3.975.117.261	1.578.772.700	4.014.963.481	3.073.810.203	19.011.810.328	12.216.962.681
01.	Dinas Sosial Kota Langsa	7.926.927.375	3.730.881.707	8.192.971.750	8.188.487.365	8.163.926.488	3.791.170.521	8.367.206.791	3.980.978.200	8.619.579.815	8.961.920.745	41.270.612.219	16.091.481.238
	- Urusan Wajib	7.926.927.375	3.730.881.707	8.192.971.750	8.188.487.365	8.163.926.488	3.791.170.521	8.367.206.791	3.980.978.200	8.619.579.815	8.961.920.745	41.270.612.219	16.091.481.238
	- Bidang Pendidikan	-	-	-	1.270.000.000	-	636.000.000	-	-	-	600.000.000	-	2.550.000.000
	- Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000		250.000.000
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Umum Perangkat Daerah Kepegawaian dan Pendidikan	7.926.927.375	1.844.881.707	8.192.971.750	1.617.487.365	8.163.926.488	3.155.170.521	8.367.206.791	3.980.978.200	8.619.579.815	8.161.920.745	41.270.612.219	9.312.981.238
	- Bidang Perlindungan Masyarakat Desa	-	1.386.000.000	-	601.000.000	-	2.900.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000		4.186.000.000
02.	Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa	602.207.387	269.305.613	-	-	-	-	-	-	-	-	602.207.387	269.305.613
	- Urusan Wajib	602.207.387	269.305.613	-	-	-	-	-	-	-	-	602.207.387	269.305.613
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Umum Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pendidikan	602.207.387	269.305.613				-		-			602.207.387	269.305.613
03.	Kecamatan Langsa Kota	1.460.207.304	575.144.575	1.505.636.351	588.247.925	1.662.284.304	636.906.445	1.385.176.930	791.585.300	1.705.163.113	915.707.300	8.057.368.222	3.371.421.445
	- Urusan Wajib	1.460.207.304	575.144.575	1.505.636.351	588.247.925	1.662.284.304	636.906.445	1.385.176.930	791.585.300	1.705.163.113	915.707.300	8.057.368.222	3.371.421.445
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Umum Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pendidikan	1.460.207.304	575.144.575	1.505.636.351	588.247.925	1.662.284.304	636.906.445	1.385.176.930	791.585.300	1.705.163.113	915.707.300	8.057.368.222	3.371.421.445
04.	Kecamatan Langsa Baru	1.460.207.304	693.305.879	1.505.636.351	588.247.925	1.662.284.304	636.906.445	1.385.176.930	791.585.300	1.705.163.113	915.707.300	8.057.368.222	3.484.314.853
	- Urusan Wajib	1.460.207.304	693.305.879	1.505.636.351	588.247.925	1.662.284.304	636.906.445	1.385.176.930	791.585.300	1.705.163.113	915.707.300	8.057.368.222	3.484.314.853

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN										JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF	
		2013*		2014*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Pemantauan	1.469.595.306	787.990.896	1.678.677.220	801.783.220	1.438.774.175	658.725.707	1.745.492.165	641.190.000	1.803.787.155	775.855.000	8.836.726.849	3.464.514.507
26.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	1.425.995.476	905.050.275	1.651.559.565	575.497.050	1.439.853.775	602.774.457	1.821.619.232	750.000.000	1.883.296.774	550.000.000	9.483.167.823	3.383.961.782
	Urusan Wajib	1.425.995.476	905.050.275	1.651.559.565	575.497.050	1.439.853.775	602.774.457	1.821.619.232	750.000.000	1.883.296.774	550.000.000	9.483.167.823	3.383.961.782
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Pemantauan	1.425.995.476	905.050.275	1.651.559.565	575.497.050	1.439.853.775	602.774.457	1.821.619.232	750.000.000	1.883.296.774	550.000.000	9.483.167.823	3.383.961.782
26.	Kecamatan Langsa Lama	1.426.358.758	905.192.700	1.657.598.269	588.456.050	1.910.186.978	546.109.757	1.919.860.782	685.742.020	1.931.476.282	725.887.620	8.215.246.251	3.204.436.797
	Urusan Wajib	1.426.358.758	905.192.700	1.657.598.269	588.456.050	1.910.186.978	546.109.757	1.919.860.782	685.742.020	1.931.476.282	725.887.620	8.215.246.251	3.204.436.797
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Pemantauan	1.426.358.758	905.192.700	1.657.598.269	588.456.050	1.910.186.978	546.109.757	1.919.860.782	685.742.020	1.931.476.282	725.887.620	8.215.246.251	3.204.436.797
27.	Kecamatan Langsa Baro	1.335.356.458	831.763.735	1.417.215.642	614.639.000	1.685.900.657	597.456.757	1.950.408.385	651.312.020	2.000.207.415	775.851.121	9.228.616.351	3.171.858.677
	Urusan Wajib	1.335.356.458	831.763.735	1.417.215.642	614.639.000	1.685.900.657	597.456.757	1.950.408.385	651.312.020	2.000.207.415	775.851.121	9.228.616.351	3.171.858.677
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Pemantauan	1.335.356.458	831.763.735	1.417.215.642	614.639.000	1.685.900.657	597.456.757	1.950.408.385	651.312.020	2.000.207.415	775.851.121	9.228.616.351	3.171.858.677
28.	Kantor Pelayanan Perpajakan Bumi dan Bangunan	885.991.629	837.616.867	1.163.588.607	687.270.000	1.115.988.312	586.488.000	1.085.916.762	694.858.950	1.096.775.970	912.333.000	5.306.570.340	3.038.479.750
	- Urusan Wajib	885.991.629	837.616.867	1.163.588.607	687.270.000	1.115.988.312	586.488.000	1.085.916.762	694.858.950	1.096.775.970	912.333.000	5.306.570.340	3.038.479.750
	- Bidang Pemberdayaan Sosial										375.000.000		375.000.000

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN										JUMLAH ALOKASI PADA DASA INDIKATIF	
		2013*		2014*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Bidang Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Perundangan	965.967.019	837.010.240	1.163.585.627	857.219.000	1.115.915.373	706.495.070	1.053.010.703	691.828.958	1.076.778.703	675.518.000	5.305.535.540	3.768.678.798
29	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa	8.185.977.112	3.630.499.830	12.814.535.405	3.856.686.702	2.865.330.416	3.709.661.717	7.727.205.841	4.610.076.732	7.428.284.595	5.571.575.394	44.439.026.120	20.041.300.730
	- Urusan Wajib	8.185.977.112	3.630.499.830	12.814.535.405	3.856.686.702	2.865.330.416	3.709.661.717	7.727.205.841	4.610.076.732	7.428.284.595	5.571.575.394	44.439.026.120	20.041.300.730
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Perundangan	8.185.977.112	3.630.499.830	12.814.535.405	3.856.686.702	2.865.330.416	3.709.661.717	7.727.205.841	4.602.176.732	7.428.284.595	5.571.575.394	44.439.026.120	20.041.300.730
	- Bidang Komunikasi Dan Informatika.						859.709.400		37.900.000		70.200.000		737.809.400
30	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa			66.700.000	2.093.139.202	749.148.518	1.729.247.680	715.500.077	3.258.699.200	736.701.845	3.097.294.200	2.026.050.730	11.004.380.830
	- Urusan Wajib			66.700.000	2.093.139.202	749.148.518	1.729.247.680	715.500.077	3.258.699.200	736.701.845	3.097.294.200	2.026.050.730	11.004.380.830
	- Bidang Sosial				1.407.072.202		2.030.030.313		2.477.918.200		2.800.200.000		9.407.360.715
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah Perangkat Daerah Kepegawaian Dan Perundang.			66.700.000	686.067.000	749.148.518	469.370.240	715.500.077	780.981.000	736.701.845	297.294.200	2.026.050.730	1.596.780.955
31	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa			1.243.020	1.009.347.202	1.093.340.592	672.482.400	1.301.516.653	634.887.500	1.218.552.900	1.003.400.000	4.137.340.745	3.243.307.202
	- Urusan Wajib			1.243.020	1.009.347.202	1.093.340.592	548.313.000	1.301.516.653	634.887.500	1.218.552.900	1.003.400.000	4.137.340.745	3.196.307.202
	- Bidang Pendidikan				59.451.202				78.130.200		132.290.000		269.871.402
	- Bidang Kebudayaan						98.700.000		83.960.300		130.200.000		312.860.300
	- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Perundang.			1.243.020	951.896.202	1.093.340.592	449.613.000	1.301.516.653	482.797.200	1.218.552.900	740.910.000	4.137.340.745	2.668.936.000

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN										JUMLAH ALOKASI PAGU DANA DEKONSENTRASI	
		2013*		2014*		2015*		2016		2017			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kota Langsa	1.176.292.916	1.073.819.425	1.411.565.098	3.544.671.067	2.068.577.871	3.300.571.670	2.218.179.714	2.707.228.910	2.242.961.725	4.345.660.030	10.161.515.924	15.372.260.090
	- Urusan Wajib	1.176.292.916	973.819.425	1.411.565.098	3.544.671.067	2.068.577.871	3.300.571.670	2.218.179.714	2.707.228.910	2.242.961.725	1.615.660.030	10.161.515.924	12.372.260.090
	- Bidang Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.000.000	-	930.000.000
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.176.292.916	973.819.425	1.411.565.098	3.544.671.067	2.068.577.871	3.300.571.670	2.218.179.714	2.707.228.910	2.242.961.725	1.015.660.030	10.161.515.924	14.942.260.090
33.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	775.628.253	902.219.125	585.135.171	956.237.924	675.877.436	439.907.670	993.266.795	895.317.176	1.003.730.721	913.100.000	4.537.949.780	5.106.781.895
	Urusan Wajib	775.628.253	902.219.125	585.135.171	956.237.924	675.877.436	439.907.670	993.266.795	895.317.176	1.003.730.721	913.100.000	4.537.949.780	5.106.781.895
	- Bidang Pendidikan	-	231.300.000	-	59.630.000	-	15.968.000	-	14.400.000	-	150.000.000	-	459.300.000
	- Bidang Kearsipan	-	27.000.000	-	37.891.000	-	23.939.670	-	30.672.000	-	17.000.000	-	134.850.000
	- Bidang Perpustakaan	775.628.253	628.419.125	585.135.171	478.717.924	675.877.436	399.999.000	993.266.795	850.245.176	1.003.730.721	746.100.000	4.537.949.780	4.513.049.895
34.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Perbatasan Kota Langsa	4.715.876.567	9.049.453.175	4.905.013.644	9.614.291.264	5.150.858.462	12.780.146.570	5.406.389.385	11.730.420.404	5.661.451.279	21.928.946.567	26.866.771.858	55.879.670.727
	Urusan Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000.000	-	1.050.000.000
	- Bidang Pemuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000.000	-	1.050.000.000
	Urusan Pilihan	4.715.876.567	10.049.453.175	4.905.013.644	10.474.291.264	5.150.858.462	12.780.146.570	5.406.389.385	11.730.420.404	5.661.451.279	20.878.946.567	26.866.771.858	53.529.670.727
	- Bidang Pariwisata	-	2.253.895.155	-	5.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.821.057.200	-	6.228.493.547	-	15.049.445.902
	- Bidang Kebudayaan	-	1.874.265.000	-	316.300.000	-	1.910.828.000	-	984.289.500	-	2.170.140.000	-	7.256.022.500
	- Bidang Perbatasan	-	-	-	-	-	640.613.000	-	-	-	650.000.000	-	1.290.613.000
	- Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata	4.715.876.567	5.921.293.020	4.905.013.644	13.064.483.264	5.150.858.462	9.228.705.570	5.406.389.385	9.924.073.704	5.661.451.279	11.830.231.020	26.866.771.858	29.933.589.325
35.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	2.850.171.082	1.215.094.105	2.565.175.707	2.722.480.302	2.670.471.446	95.181.450.390	3.564.630.370	9.630.598.702	3.696.382.490	7.032.428.452	14.826.637.795	46.404.496.301
	Urusan Wajib	-	431.305.000	-	-	-	679.062.000	-	21.340.000	-	1.041.300.000	-	2.172.707.000
	- Bidang Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.300.000	-	600.300.000
	- Bidang Koperasi	-	991.305.000	-	-	-	509.062.000	-	21.340.000	-	1.341.300.000	-	2.164.761.000
	- Bidang Perindustrian	-	791.905.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791.905.000
	Urusan Pilihan	2.850.171.082	813.789.105	2.565.175.707	2.722.480.302	2.670.471.446	94.502.388.390	3.564.630.370	9.609.258.702	3.696.382.490	5.991.128.452	14.826.637.795	43.731.789.301
	- Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	-	41.493.000	-	316.300.000	-	730.000.000	-	430.305.000	-	600.000.000	-	1.818.298.000
	- Bidang Perdagangan	-	39.731.105	-	772.180.302	-	25.138.138.345	-	2.036.058.405	-	3.378.000.000	-	31.963.381.735
	- Bidang Industri	2.850.171.082	740.484.960	2.565.175.707	1.633.999.500	2.670.471.446	68.634.250.045	3.564.630.370	7.142.895.297	3.696.382.490	2.012.428.452	14.826.637.795	9.969.109.566
JUMLAH		388.388.643.131	353.357.818.865	374.065.465.825	400.730.186.246	433.569.383.884	486.891.908.681	463.639.740.468	496.936.853.677	467.084.107.870	436.037.289.173	2.040.732.494.945	1.950.420.468.616
TOTAL		876.643.168.997		774.795.742.071		920.941.492.209		960.576.594.145		903.101.457.043		3.991.152.963.461	

KETERANGAN
- Sampai Perubahan

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja.

Penetapan indikator kinerja kota pada dasarnya bertujuan untuk memberi gambaran lengkap tentang tingkat pencapaian hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungannya dengan hasil pembangunan kota pada setiap akhir periode perencanaan pembangunan kota. Penetapan indikator kinerja tersebut sangat penting agar manfaat *(outcome)* dari suatu program/kegiatan pembangunan dapat diukur tingkat pencapaian hasil dan manfaatnya. Tingkat capaian target dapat dipantau setiap saat, di samping permasalahan dan kendala yang dihadapai dapat dengan mudah diatasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Daerah, yang nantinya akan diukur pada setiap akhir tahun anggaran. Penetapan indikator-indikator tersebut tidak terlepas dengan isu-isu strategis, strategi dan kebijakan yang ditempuh sejak awal dalam menindaklanjuti penanganan isu-isu strategis yang dihadapi.

Sejalan dengan itu, penetapan indikator kinerja daerah juga turut memperhatikan isu-isu nasional dan provinsi, sekaligus memperhatikan keadaan dan kondisi di masa depan. Untuk menetapkan indikator kinerja daerah dalam lima tahun ke depan, juga mengacu kepada capaian kinerja akhir perencanaan pembangunan masa lalu, atau kinerja masa lalu, sebagai kondisi awal RPJM ke depan. Dengan cara ini tentu akan memudahkan dalam menilai capaian kinerja setiap tahun atau sampai akhir RPJM, karena adanya batas titik awal pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan. Dengan ini pula tingkat capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dengan mudah dapat di ukur.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
Pertumbuhan PDRB (ADHK)	%	4,75	4,57	4,43	4,62	4,76	4,87
PDRB Per Kapita (ADHK)	Juta	19,30	20,46	22,00	23,50	25,00	26,50
Persentase penduduk miskin	%	13,93	12,62	12,12	11,62	11,12	10,62
Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
Pendidikan							
Angka Melek Huruf	%	99,31	99,36	99,41	99,46	99,51	99,56
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,43	10,47	10,48	10,82	11,07	11,51
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	%	122	124,2	126,2	128,2	130,2	132,2
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	110	112,2	114,2	116,2	118,2	120,20
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	%	101	103,2	105,2	107,2	109,2	111,2
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	%	98,2	100	100	100	100	100
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	%	85	100	100	100	100	100
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	%	77,4	100	100	100	100	100

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kesehatan							
Angka Kematian Bayi	/1000 LH	4	11	14	10	7	5
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	/1000 LH	3.098	3.122	3.387	3.457	3.527	3.597
Angka Harapan Hidup	Tahun	68,75	68,78	68,79	68,83	68,85	68,89
Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,032	0,043	0,017	0,010	0,008	0
Ketenagakerjaan							
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	58,85	56,51	57,94	58,63	59,12	59,76
Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
Kebudayaan							
Jumlah Grup Kesenian	Sanggar	71	84	84	85	86	87
Jumlah Gedung Kesenian	Unit	3	3	3	3	3	3
Kepemudaan dan Olah Raga							
Jumlah Klub Olahraga	Klub	32	32	32	33	34	35
Jumlah Gedung Olahraga	Unit	1	1	1	1	1	1
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Fokus Layanan Urusan							
Wajib							
Pendidikan							
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	98,66	98,88	98,95	99,04	99,19	99,35
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	94,68	96,11	96,33	96,52	96,64	96,81
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	76,07	75,51	75,67	75,72	75,78	76,31
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,13	0,11	0,1	0,05	0	0
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,03	0,3	0,72	0,5	0	0
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	0,19	0,16	0,1	0,5	0,05	0
Angka Kelulusan SD/MI	%	99,09	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan SMP/MTs	%	86,17	99,7	100	100	100	100
Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%	98,4	99,58	99,75	99,75	99,75	99,75
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	67,39	110,18	100	100	100	100
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	83,87	99,63	99,74	99,76	99,78	99,8

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI	Rasio (per 10.000)	1:37	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36
Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs	Rasio (per 10.000)	1:27	1:26	1:26	1:26	1:26	1:26
Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/SMK/MA	Rasio (per 10.000)	1:24	1:22	1:22	1:22	1:22	1:22
Rasio Guru/Murid SD/MI	Rasio (per 10.000)	1:704	1:717	1:720	1:725	1:730	1:735
Rasio Guru/Murid SMP/MTs	Rasio (per 10.000)	1:857	1:821	1:831	1:836	1:841	1:846
Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA	Rasio (per 10.000)	1:1.182	1:1.177	1:1.182	1:1.187	1:1.192	1:1.197
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	%	71,16	73,35	80,85	80,95	90,35	90,79
Kesehatan							
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Rasio (per 1.000)	1:6	1:6	1:7	1:7	1:7	1:7
Rasio Puskemas, Poliklinik, Pustu dan Polindes Terhadap Satuan Penduduk	Rasio (per 1.000)	1:0,46	1:0,48	1:0,50	1:0,50	1:0,50	1:0,50
Rasio Rumah Sakit Terhadap Satuan Penduduk	Rasio (per 1.000)	1:0,02	1:0,03	1:0,02	1:0,02	1:0,02	1:0,02
Rasio Dokter Terhadap Satuan Penduduk	Rasio (per 1.000)	1:0,58	1:0,57	1:0,43	1:0,44	1:0,45	1:0,46
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Rasio (per 1.000)	1:5,7	1:4,87	1:2,26	1:3,5	1:4,6	1:4,9
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	58,88	89,73	90,41	95,86	98,97
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki potensi kebidanan	%	89,34	84,85	98,04	98,82	97,68	98,77
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	%	-	-	96,97	99,95	99,95	99,95
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	56,97	14,81	13,92	13,78	13,62	13,22
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	123,42	168,88	100	100	100	100
Cakupan kujungan bayi	%	89,67	90,3	99,94	100	100	100

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pekerjaan Umum							
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	80	79	82	85	87	89
Perkembangan panjang jalan	km	293,17	313,37	315,63	320	325	330
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	Rasio (per 1.000)	1:1,23	1:2,15	1:2,07	1:3	1:4	1:4
Perumahan							
Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	15	10	2	2	2	2
Jumlah Pengguna Listrik	Rumah Tangga	31.625	31.474	31.674	31.774	31.874	31.974
Rumah Tangga ber sanitasi	%	88,42	84,13	84,12	86,75	88,32	90,87
Rumah Layak Huni	%	85,22	87,09	87,45	88,91	89,62	90,45
Penataan Ruang							
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	0,26	5	10	15	20	25
Perencanaan Pembangunan							
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	dok	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	dok	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	dok	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Perhubungan							
Jumlah Terminal Bis	Unit	1	1	1	1	1	1
Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	1	1	1	1	1	1
Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang	6-7 Orang/Kenderaan	6-7 Orang/Kenderaan	6-7 Orang/Kenderaan	6-7 Orang/Kenderaan	6-7 Orang/Kenderaan	6-7 Orang/Kenderaan
Lingkungan Hidup							
Persentase Penanganan Sampah	%	14	15	28	50	65	75
Kependudukan dan Catatan Sipil							
Kepemilikan KTP	%	74,4	87,73	67,7	75,98	85,25	95,23
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	24,63	2,35	49,51	98	99	99
Penerapan KTP nasional berbasis NIK	sudah/belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	64,11	64,53	63,38	63,38	63,38	63,38
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
Cakupan Peserta KB aktif		73,4	73,4	75,05	75,6	75,9	75,2
Sosial							
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	4	4	4	4	4	4
Ketenagakerjaan							
Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	%	8,79	11,74	11,52	11,34	10,89	10,28
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
Koperasi aktif	%	55,42	34,37	9,88	29,47	47,39	68,26
Usaha mikro dan kecil	%	87,1	100	99,4	99,5	99,6	99,7
Kebudayaan							
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	6	6	6	6	6	6
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	3	3	3	3	3	3
Kepemudaan dan Olahraga							
Lapangan olah raga	Rasio (per 1.000)	1:1,58	1:1,16	1:1,14	1:2	1:2	1:2
Jumlah Organisasi Kepemudaan	OKP/Paguyuban	55	57	59	61	63	65
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	2	2	2	2	2	2
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	2	2	2	2	2	2
Otonomi daerah							
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	Rasio (per 10.000)	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, kriminalitas) di Kota	%	90.18	95	64,81	75	80	85

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pembinaan Penegakan Qanun (Syariat Islam)	Kali	624	617	590	550	525	500
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100
Posyandu	%	100	100	100	100	100	100
Statistik							
Buku "Kota Dalam Angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB Kota"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kearsipan							
Penerapan pengelolaan arsip secara baku	%	21,21	20,59	17,5	18,5	19,5	20,5
Komunikasi dan Informatika							
Website milik pemerintah daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Pameran/expo	Kali	3	2	1	1	1	1
Perpustakaan							
Jumlah Perpustakaan Daerah	Unit	1	1	1	1	1	1
Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Unit Buku	21.344	21.344	24.641	24.641	24.641	24.641
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 Tahun	Kunjungan	7.728	7.728	13.721	14.721	15.721	16.721
Fokus Layanan Urusan Pilihan							
Pertanian							
Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	%	5,5	5,43	5,18	5,19	5,20	5,21
Kehutanan							
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (ADHB)	%	0,26	0,25	0,24	0,33	0,22	0,21
Energi dan Sumber Daya Mineral							
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (ADHB)	%	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pariwisata							
Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (ADHB)	%	2	2,02	2,04	3,50	5,49	6,76
Kelautan dan Perikanan							
Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (ADHB)	%	3,62	3,55	3,42	3,51	3,57	5,63
Perdagangan							
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	%	28,98	29,2	29,62	30,23	31,79	32,02
Perindustrian							
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (ADHB)	%	10,24	10,18	9,75	10,11	10,15	10,87
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
Pengeluaran konsumsi rumah tangga (ADHB)	Juta	13,91	14,6	15,54	16,6	17,4	18,6
Pertanian							
Nilai Tukar Petani	Poin	101,14	103,16	95,63	98	102	104
Lingkungan Hidup							
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	18,19	96,17	96,19	96,25	96,3	96,35
Fokus Iklim Berinvestasi							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
Lama proses perijinan	hari	7	7	7	7	7	7

BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 yang telah disesuaikan ini merupakan dokumen perencanaan kota untuk periode 5 (lima) tahun, disusun berdasarkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Sesuai dengan rentang waktunya dan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2017, maka dokumen RPJM ini masih dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman pada masa periode transisi, sambil menunggu penetapan secara definitif Walikota dan Wakil Walikota periode berikutnya. Hal tersebut dimaksudkan dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan.

10.2 Kaedah Pelaksanaan

Program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 ini harus benar-benar dapat diimplementasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) dalam jajaran Pemerintah Kota. Agar proses implementasi program pembangunan menjadi lebih tepat, relevan, dan terarah, maka setiap SKPK diwajibkan pula menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra SKPK berpedoman pada RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017. Dalam Renstra SKPK memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi dan selaras dengan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Program dan kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran dalam Renstra SKPK bersifat indikatif yang merupakan penjabaran dari RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017.

Selanjutnya, proses implementasi program pembangunan dalam dokumen RPJM ini harus mengarah kepada pencapaian visi, melalui misi yang diemban oleh semua SKPK dan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, dan prinsip *value for money*, serta partisipatif. Artinya, selain penggunaan anggaran harus diketahui masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta setiap rupiah yang digunakan harus bernilai dan bermanfaat, proses implimentasinya haruslah mendapat

dukungan masyarakat sepenuhnya. Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antarSKPK dan lintas SKPK, agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama periode 2012-2017 dapat menuju kearah satu tujuan yang telah disepakati bersama dalam **Mewujudkan Langsa menjadi Kota Berperadaban dan Islami**.

BAB XI
P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa Tahun 2012-2017 merupakan arah pembangunan kota yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan kota. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa Tahun 2012-2017 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program-program pembangunan yang ditetapkan dalam perubahan RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 ini diharapkan agar dapat benar-benar diimplementasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) dalam jajaran Pemerintah Kota yang dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Renstra SKPK yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi dan selaras dengan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota.

RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 yang telah disesuaikan ini juga sebagai koridor dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), yang disusun setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota. Hal ini dinilai penting untuk diperhatikan mengingat RKPK merupakan rujukan utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK).